

# STRATEGI NASIONAL

---

Literasi dan Inklusi  
Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Indonesia

---

20  
24







# STRATEGI NASIONAL

---

Literasi dan Inklusi  
Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

---

20  
24



# STRATEGI NASIONAL

## Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

### PENGARAH

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim<br>Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman<br>dan Investasi | <b>Sugeng Santoso</b>         |
| 2. Direktur Eksekutif ME - Komite Nasional<br>Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)                         | <b>Sholahudin Al Aiyub</b>    |
| 3. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia   | <b>Guntur Iman Nefianto</b>   |
| 4. Kepala Departemen - Departemen Ekonomi<br>dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia (BI)                     | <b>Imam Hartono</b>           |
| 5. Deputi Bidang Makroekonomi dan Keuangan<br>– Kementerian Koordinator Bidang<br>Perekonomian RI          | <b>Ferry Irawan</b>           |
| 6. Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi<br>Keuangan dan Komunikasi                                     | <b>Mohammad Ismail Riyadi</b> |
| 7. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk<br>Halal (BPJPH)  | <b>Muhammad Aqil Irham</b>    |

### PENYUSUN

1. Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah ME -  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
2. Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)

### REVIEWER

1. Kepala Grup Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah - Departemen Ekonomi  
dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia
2. Kepala Group Literasi Inklusi Keuangan Syariah –  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Asisten Deputi Keuangan Inklusif Keuangan Syariah - Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian
4. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

### KONTRIBUTOR MATERI

1. Bank Indonesia
2. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)
7. Kementerian Keuangan
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Kementerian Agama
13. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
14. Otoritas Jasa Keuangan
15. Lembaga Penjamin Simpanan
16. Kamar Dagang dan Industri Indonesia
17. Majelis Ulama Indonesia
18. Sakinah Finance



# 16 LEMBAGA ANGGOTA KNEKS



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



BANK INDONESIA  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



BAPPENAS  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA  
MILIK NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA



KEMEN  
KOPUKM  
Kementerian Koperasi dan UKM  
Republik Indonesia



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN





## WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



**Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin**  
**Wakil Presiden Republik Indonesia**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai alternatif pilihan keuangan yang selaras dengan prinsip Islam, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus meningkat bahkan memiliki peluang untuk bertumbuh dengan memaksimalkan potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman dan literasi. Oleh karena itu, literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat ekonomi dan keuangan syariah.

Peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan melalui penguatan literasi pada ekosistem yang ada, baik di sisi *supply* (penawaran) maupun *demand* (permintaan). Dari sisi penawaran, peningkatan pemahaman pelaku usaha dapat mendorong perkembangan sektor industri halal dan keuangan syariah, memperbesar kontribusi dana sosial syariah, serta menumbuhkan inovasi di berbagai bidang. Di sisi permintaan, pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat akan memperkuat permintaan dan partisipasi aktif masyarakat. Penguatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan memperluas penerimaan dan penerapannya di masyarakat, memperkuat kontribusinya pada perekonomian nasional, serta meningkatkan indeks ekonomi syariah Indonesia secara global.

**Buku Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia** disusun sebagai panduan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif yang mencakup aspek pemahaman, akses, dan inovasi. Strategi literasi ini memudahkan pengambil kepentingan dalam mengambil kebijakan dengan pemodelan dinamika sistem (*system dynamics*) sebagai pendukung keputusan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan strategi, simulasi, dan pengujian skenario berbasis data dan bukti, yang diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, masyarakat, dan dunia usaha. Strategi berbasis simulasi ini juga diharapkan berdampak positif dan terukur dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Saya berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman komprehensif untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Melalui langkah-langkah sinergis dan implementasi yang tepat, kita dapat mewujudkan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih inklusif, stabil, dan berdaya saing, serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Saya juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan strategi ini di lingkungan masing-masing. Semoga langkah ini membawa manfaat besar bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat ekonomi syariah sebagai kekuatan baru menuju Indonesia Emas 2045, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT memberikan inayah-Nya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan.

*Wallahulmuwaffiq ilaa aqwamith thariiq.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabaraakatuh.*

Jakarta, 15 Oktober 2024  
Wakil Presiden Republik Indonesia



K.H. Ma'ruf Amin





**KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.,  
Direktur Eksekutif KNEKS**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku **Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam serta keluarga dan para sahabat yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Di tengah dinamika perubahan global dan transformasi digital yang pesat, ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan yang diusung keuangan syariah menawarkan solusi atas berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa kita. Strategi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan instrumen dan layanan keuangan syariah secara lebih luas, sembari memastikan prinsip-prinsip tersebut dipahami dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut hasil survei berkala yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait Indeks Literasi Ekonomi Syariah pada 2023 terlihat bahwa pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan, dari survei tersebut didapatkan bahwa indeks literasi ekonomi syariah sebesar 28,01%.

Sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS dalam rapat pleno KNEKS pada Desember 2022 mengenai peningkatan target indeks literasi ekonomi syariah sebesar 50% pada akhir 2025,

dipandang perlu untuk menyusun **Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah**, kolaborasi bersama Kementerian dan Lembaga khususnya anggota KNEKS serta pemangku kepentingan yang lain guna merincikan langkah-langkah strategis untuk peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

**Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah** ini disusun untuk menguraikan langkah-langkah dan kebijakan komprehensif yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemangku kepentingan guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah yang berdampak pada percepatan pertumbuhan literasi ekonomi syariah dan inklusi dalam sektor keuangan syariah.

Sasaran utamanya adalah kelompok-kelompok kunci di masyarakat, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas untuk mencapai hasil yang nyata.

Untuk mengoptimalkan kegunaannya, strategi ini juga menerapkan penggunaan metode pemodelan **Dinamika Sistem (System Dynamics)** sebagai pendekatan inovatif yang merupakan ikhtiar bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis data yang akurat, tetapi juga memperhitungkan berbagai interaksi kompleks di antara variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menyusun dan mengimplementasikan aksi-aksi strategis dengan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan demikian, SNLIEKSI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata dan terukur bagi peningkatan literasi serta inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang menyeluruh di Indonesia.

Kami berharap strategi nasional ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan agar strategi ini menjadi semakin baik yaitu sinergi antar Kementerian dan Lembaga terkait, perumusan komunikasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan pada saatnya, penggunaan teknologi yang mendukung implementasi secara efektif, dan penyusunan materi komunikasi dan edukasi untuk setiap segmen dan sektor ekonomi.

Semoga melalui langkah-langkah yang sinergis dan implementatif, sistem ekonomi dan keuangan syariah bisa mencapai tingkat *agility*, inklusivitas, stabilitas serta daya saing yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran serta secara aktif baik setiap Kementerian dan Lembaga serta elemen masyarakat sangat kami harapkan. Semoga langkah ini membawa manfaat besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Selanjutnya saya harapkan kita dapat membawa semangat kolaboratif ke dalam tindakan nyata. Saya juga menghimbau kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta pemangku kepentingan terkait ekonomi dan keuangan syariah untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi secara berkesinambungan sesuai dengan yang dituliskan dalam buku ini.

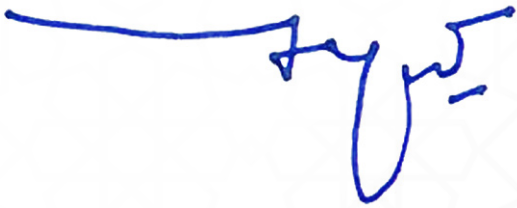
Kita memiliki kesempatan luar biasa untuk menciptakan perubahan positif yang akan dirasakan oleh masyarakat kita. Literasi dan inklusi sangat penting dan keberhasilan kita tidak hanya akan diukur oleh kebijaksanaan strategis saja, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut kedalam tindakan nyata yang konsisten guna mewujudkan **Kebaikan Untuk Semua.**

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi yang luar biasa dari perwakilan Kementerian dan Lembaga khususnya anggota KNEKS serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan telah bekerjasama secara aktif dalam menyampaikan masukan yang inovatif untuk dapat menyusun strategi nasional tersebut.

Terima Kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Direktur Eksekutif KNEKS**



**Sholahudin Al Aiyub**



# DAFTAR ISI

02

Ringkasan Eksekutif

---

04

**Bab 01.**  
**Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia**

- 1.1. Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah
  - 1.2. Peta Konsep dan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
  - 1.3. Peran Literasi dalam Pembangunan Nasional
  - 1.4. Visi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI)
  - 1.5. Prinsip Dasar Literasi serta Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah
  - 1.6. Tujuan Penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI)
  - 1.7. Ruang lingkup Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia
- 

68

**Bab 02.**  
**Indikator dan Interkoneksi SNLIEKSI**

- 2.1. Kerangka Konseptual Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia
  - 2.2. Indikator Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah
  - 2.3. Interkoneksi Program Dalam SNLIEKSI
  - 2.4. Pemodelan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 

98

**Bab 03.**  
**Program Utama Nasional**

- 3.1. Program Peningkatan Literasi
  - 3.2. Program Peningkatan Inklusi
  - 3.3. Program Penguatan Infrastruktur Pendukung
  - 3.4. Rencana Aksi dan Implementasi
  - 3.5. *Dashboard Monitoring*
- 

156

**Bab 04.**  
**Penutup**

---

158

**Lampiran & Daftar Pustaka**

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat tergantung pada besarnya minat masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan. Saat ini ekonomi dan keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang baik dan memiliki prospek yang menjanjikan. Namun demikian, masih terdapat ruang yang sangat luas bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk dapat berkiprah lebih signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu area yang sangat penting untuk dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan *supply* dan *demand* di sektor ini adalah peningkatan kualitas literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. *Supply* untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah harus ditingkatkan untuk memenuhi *demand* masyarakat dan pasar, yaitu melalui pengembangan industri halal, industri keuangan syariah, dan keuangan sosial syariah. Selain itu, infrastruktur ekosistem syariah perlu diperkuat sebagai fondasi utama berjalannya *supply-demand linkage*. Adapun target program Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) mencakup berbagai segmen masyarakat baik dari sisi konsumen dan produsen serta berbagai lapisan masyarakat dari tingkatan korporasi sampai kepada individu.

Pada saat ini, telah terdapat beberapa kerangka literasi yang dikembangkan oleh beberapa kementerian dan otoritas, seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, serta Strategi Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.

Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) ini disusun sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka transformasi ekonomi jangka panjang hingga Tahun 2045.



Transformasi ekonomi ditunjang oleh transformasi sosial dan transformasi tata kelola terutama manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor. SNLIEKSI merupakan panduan untuk memformulasikan strategi peningkatan literasi dan inklusi melalui peningkatan efektivitas dan koordinasi program-program yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait, penyusunan dan pemanfaatan materi-materi edukasi, serta program monitoring dan evaluasi (melalui survei dan pemanfaatan teknologi terkini terkait dengan analisis pasar).

Implementasi SNLIEKSI secara efektif diharapkan dapat membangun preferensi masyarakat yang komprehensif terhadap ekonomi dan keuangan syariah, sejalan dengan upaya memperkuat preferensi masyarakat dalam penggunaan produk dalam negeri. Langkah ini juga merupakan aksi afirmatif dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang bertujuan memperkuat permintaan domestik. Dengan penguatan permintaan dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pasokan produk sehingga ke depannya dapat menjadi pemasok utama di pasar halal global.

Implementasi strategi diharapkan dapat mendorong efektivitas program pengembangan keuangan sosial syariah sebagai bentuk inovatif *financing*, penguatan inisiatif nasional dalam implementasi konsep ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan, serta melengkapi pilar pembangunan nasional.





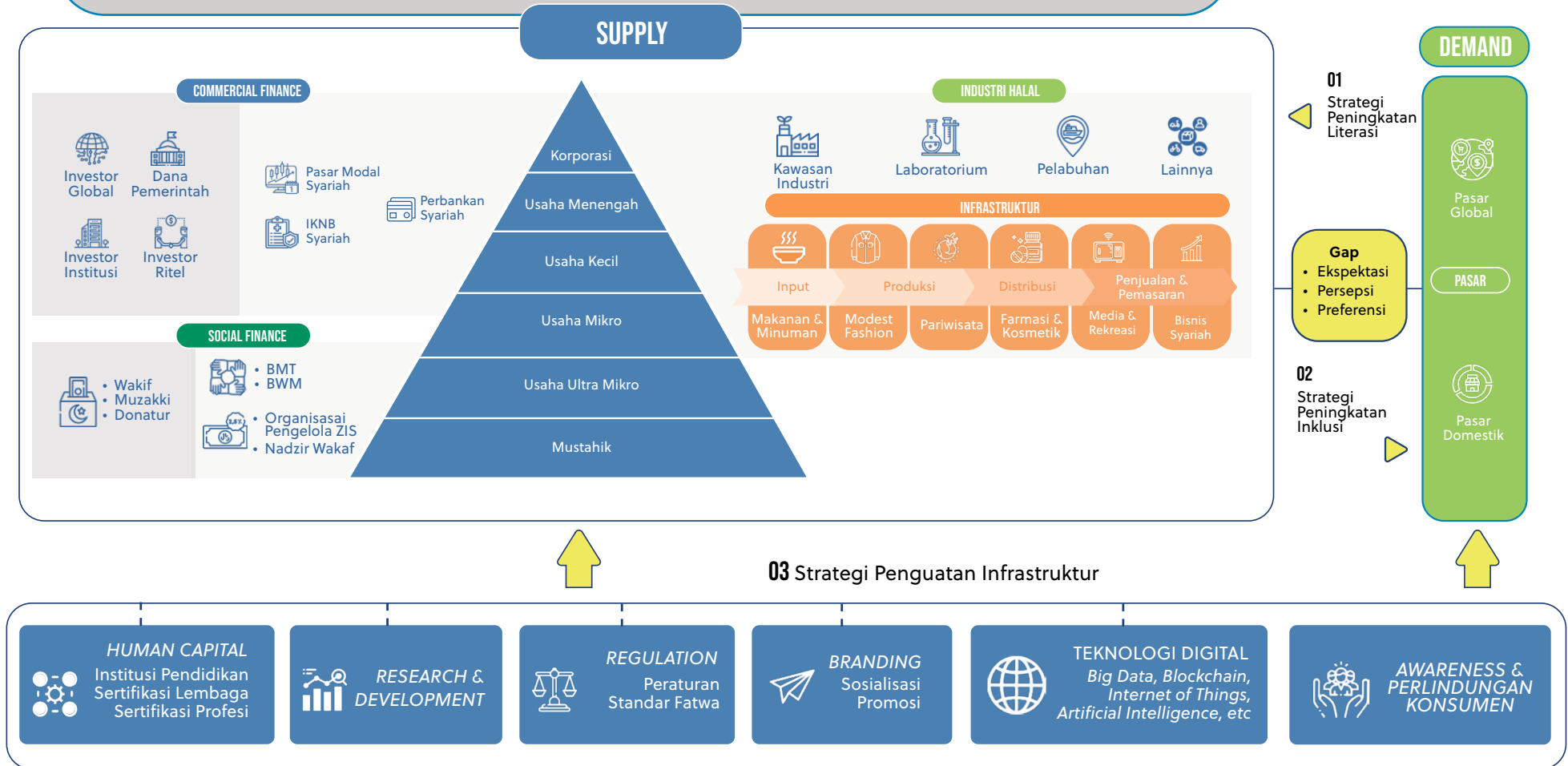
# **STRATEGI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA**

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, literasi dan inklusi keuangan memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat stabilitas keuangan melalui proses pembentukan preferensi, peningkatan akses keuangan dan ekonomi.

Di tengah dinamika perekonomian global dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi semakin relevan sebagai salah satu pilar dalam pengembangan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Keberadaan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI), diharapkan akan dapat berperan aktif dalam pembentukan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah di dalam masyarakat dan penguat dalam pembentukan nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Menjadikan Masyarakat Indonesia Memahami dan Menggunakan Prinsip Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Pilihan Utama



Gambar 1. Hubungan Sinergi Permintaan, Penawaran, dan Infrastruktur Pendukung dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Sumber (KNEKS, 2023)



Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan Gambar 1, ekosistem ekonomi syariah mencakup sisi *supply* dan *demand* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sisi *supply* terdiri dari pembiayaan yang terdiri dari komersial dan sosial yang merupakan modalitas untuk mendorong pertumbuhan industri halal, infrastruktur, dan pemberdayaan komunitas. Sisi *supply* tersebut dikembangkan untuk memenuhi *demand* dari pasar global dan domestik. Ekosistem tersebut ditunjang dengan *human capital*, *research and development*, regulasi, *branding*, teknologi digital, dan perlindungan konsumen.

Literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam tataran teknis implementasi, literasi keuangan syariah yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara optimal.

**Inklusi keuangan syariah, di sisi lain, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional, memiliki akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.**

Melalui pemahaman yang baik dan menyeluruh terkait literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, masyarakat Indonesia diharapkan dapat memiliki kehidupan yang baik dengan nilai-nilai syariah yang bersifat universal. Secara konsepsi, literasi ekonomi dan keuangan syariah diharapkan akan dapat memperkuat tumbuhnya nilai-nilai luhur sebagai salah satu *economic driver* dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan.

---

**Bab ini akan membahas secara komprehensif strategi nasional dalam literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah untuk meletakkan fondasi syariah tidak hanya sebagai indikator namun sebagai tatanan bermasyarakat. Fokus utama pembahasan adalah untuk memahami perkembangan dan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan nasional, serta visi, prinsip dasar, tujuan, dan ruang lingkup dari strategi nasional ini.**

---

# 1.1. KONSEP EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Konsep ekonomi dan keuangan syariah harus merepresentasikan nilai *rahmatan lil'alam*, yaitu prinsip kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bertujuan untuk membangun pilar ekonomi yang tangguh guna mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini berarti proses penyusunan sistem ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan spiritual dan sosial. Dengan cara ini, ekonomi syariah yang disusun selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa akan dapat berkontribusi pada pencapaian masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan harmonis bagi seluruh bangsa Indonesia. Pesan yang terbangun dalam konsep ekonomi dan keuangan syariah harus dapat merepresentasikan nilai *rahmatan lil'alam*, yang berarti "rahmat bagi seluruh alam semesta." Nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan yang diusung oleh Islam untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, ini berarti bahwa sistem dan praktik ekonomi harus membawa manfaat luas dan positif, termasuk inisiatif-inisiatif strategis baik yang bersifat domestik maupun global.

Konsep ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah pandangan hidup (*worldview*) dalam Islam melampaui tataran institusi dan kelembagaan maupun produk-produk keuangan Islam. Konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi). Ekonomi dan keuangan syariah tentunya sejalan dengan tujuan syariah (*Maqasid al Shariah*) yang mencakup:

- a Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)
- b Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*)
- c Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- d Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*)
- e Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

### a. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)

Ekonomi dan keuangan syariah disusun berdasarkan nilai-nilai luhur moralitas, kaidah hukum serta ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi) yang memiliki tujuan mulia dalam penciptaan manusia yaitu membawa kesejahteraan bagi kemanusiaan secara utuh bersama lingkungan di sekitarnya. *Hifz al-Din* menjaga optimasi pencapaian elemen kesejahteraan yang lain yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan (dimensi *sustainability*), menjaga akal dan budi sebagai salah satu ciri keberadaan makhluk ciptaan yang paling sempurna, serta menjaga sumber daya dan memuliakan keturunan. Dengan demikian, *Hifz al-Din* merupakan dasar preferensi seseorang dalam menentukan sikap, perilaku dan alternatif pilihan yang akan dibuat dalam kehidupannya, termasuk didalamnya pembentukan perilaku ekonomi seseorang. Program literasi ekonomi dan keuangan syariah sangat sejalan dengan tujuan *Hifz al-Din* yang pada dasarnya sangat mendorong pembentukan preferensi masyarakat ke arah kemaslahatan bangsa dan negara secara umum.

---

*Hifz al-Din* menjaga optimasi pencapaian elemen kesejahteraan yang lain yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan (dimensi *sustainability*), menjaga akal dan budi sebagai salah satu ciri keberadaan makhluk ciptaan yang paling sempurna, menjaga sumber daya dan memuliakan keturunan.

---





## b. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Pemeliharaan akal (*Hifz al-'Aql*) adalah salah satu tujuan utama dari *Maqasid al-Shariah*, yang mencakup perlindungan dan pengembangan kapasitas intelektual manusia guna mewujudkan kesejahteraan di muka bumi.

Dengan demikian, hal-hal yang bertentangan dengan akal sebenarnya melawan prinsip Islami dalam upaya pengembangan kesejahteraan di bumi. Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, pemeliharaan akal berarti memastikan bahwa aktivitas ekonomi mendukung perkembangan intelektual, pendidikan, serta alokasi *resources* guna meningkatkan efektivitas produksi melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ekonomi syariah mendukung pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai dasar untuk pemeliharaan akal termasuk didalamnya pemahaman berbagai konsep ekonomi yang ada pada saat ini, yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan umat. Namun demikian, berbagai upaya tambahan perlu untuk selalu dilakukan dalam hal pemanfaatan teknologi guna melengkapi konsep-konsep ekonomi syariah yang semakin efektif.

Selain itu, dalam ekonomi syariah terdapat larangan keras terhadap produksi dan konsumsi barang-barang yang merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa menjaga akal sehat adalah esensial untuk kehidupan yang produktif dan bermakna. Dengan mencegah produksi dan distribusi barang-barang ini, ekonomi syariah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang bisa merusak kapasitas intelektual dan kesehatan mental mereka.

Ekonomi syariah juga mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Ini termasuk pengembangan teknologi yang mendukung produksi halal, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan mendorong inovasi, ekonomi syariah berkontribusi pada pengembangan akal dan peningkatan kualitas hidup.

Ekonomi syariah menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari pemeliharaan akal. Program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan keterampilan adalah aspek penting dari ekonomi syariah yang memastikan bahwa individu dapat terus berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam ekonomi. Dengan menginvestasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, ekonomi syariah memastikan bahwa individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam ekonomi.





### c. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, pemeliharaan jiwa berarti memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual individu. Ekonomi syariah menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Dalam sistem keuangan syariah, terdapat mekanisme seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, ekonomi syariah berkontribusi pada pemeliharaan jiwa. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk *safety-net* yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan institusi dan instrumen keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas pengembangan *safety-net* khususnya yang berbasis pada sistem keuangan sosial syariah akan sangat tergantung pada kuatnya preferensi untuk dapat berbagi. Hal ini membutuhkan proses yang cukup panjang dan sistematis.

Ekonomi syariah juga memperhatikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pemeliharaan jiwa. Lingkungan yang sehat adalah prasyarat bagi kesehatan fisik dan mental. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang harus menjaga dan merawat lingkungan. Dengan mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, ekonomi syariah berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang sehat dan layak huni bagi semua makhluk. Sehingga *sustainable development goals* (SDGs) yang saat ini berkembang sejatinya sejalan dengan tujuan dari ekonomi syariah.

---

Ekonomi syariah memperhatikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pemeliharaan jiwa, dimana lingkungan yang sehat adalah kunci bagi kesejahteraan fisik dan mental.

---

#### d. Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-mal*)

Pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) adalah salah satu tujuan utama dari *Maqasid al-Shariah* yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan perlindungan harta benda. Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, pemeliharaan harta berarti memastikan bahwa kekayaan dan aset dimanfaatkan secara adil, etis, bermanfaat dan selaras dengan pemenuhan 5 elemen *Maqasid al-Shariah*.

Pemeliharaan harta dalam ekonomi syariah dimulai dari pengelolaan keuangan pribadi yang bijaksana. Individu diajarkan untuk hidup dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Islam, menghindari pemborosan, hutang yang tidak perlu, dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah seperti menabung, menghindari riba, dan berinvestasi dengan bijaksana, individu dapat memastikan bahwa kekayaan mereka terjaga dan berkembang sesuai fitrah penguasaan harta kepemilikan yang akan dapat memberikan manfaat baik secara pribadi maupun kemasyarakatan. Adapun kekuatan ekonomi secara makro ditopang secara langsung maupun tidak langsung oleh perilaku ekonomi dari individu baik perilaku konsumsi maupun produksinya.

Konsep syariah mendorong mekanisme perlindungan harta yang sesuai dengan fitrah dinamika ekonomi dimana proses pengembangan aset diwajibkan untuk dilakukan melalui investasi di dalam sektor riil sehingga mekanisme bagi hasil merupakan konsekuensi kegiatan ekonomi selain transaksi perdagangan. Oleh karena itu, pelarangan kegiatan spekulatif yang bertujuan untuk melakukan pengembangan aset yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak boleh dilakukan apalagi hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan perekonomian yang berpotensi untuk dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat secara luas dianggap sebagai sebuah kezaliman.



---

Sistem hukum syariah memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak properti, sehingga mencegah pencurian, penipuan, atau eksploitasi terhadap aset dan kekayaan seseorang.

---



Ekonomi syariah mendorong pengelolaan investasi yang halal dan berkualitas. Hal ini mencakup investasi dalam sektor-sektor yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti alkohol, tembakau, perjudian, dan industri lain yang dianggap haram. Selain itu, ekonomi syariah juga mempromosikan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemeliharaan harta dalam ekonomi syariah juga mencakup perlindungan hak kepemilikan negara, individu dan perusahaan. Sistem hukum syariah memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak properti, sehingga mencegah pencurian, penipuan, atau eksploitasi terhadap aset dan kekayaan seseorang. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi individu dan bisnis untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan mereka tanpa takut akan penyalahgunaan atau pelanggaran hak mereka.

Zakat adalah salah satu pilar ekonomi syariah yang mendukung pemeliharaan harta secara sosial. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan mereka yang berhak menerima zakat lainnya. Ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan dan keberkahan dari sumber yang halal didistribusikan secara adil dalam masyarakat. Ekonomi syariah menekankan pentingnya etika bisnis dan transparansi dalam semua aktivitas ekonomi. Bisnis yang dilakukan dalam ekonomi syariah harus transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Ini mencakup penyampaian informasi yang jelas kepada semua pihak terkait dalam setiap transaksi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam dalam berdagang dan berinvestasi. Dengan mempraktikkan etika bisnis yang baik, ekonomi syariah membantu memelihara integritas dan keberlanjutan dalam pengelolaan harta benda.



### e. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memuliakan keturunan (*Hifz al-Nasl*) adalah salah satu tujuan utama dari *Maqasid al-Shariah*, yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan keturunan serta kelangsungan generasi manusia. Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, pemeliharaan keturunan berarti memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan kebijakan keuangan mendukung pembentukan, pemeliharaan, dan kesejahteraan keluarga serta generasi masa depan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan yang dilakukan antar generasi. Ekonomi syariah menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Kebijakan keuangan syariah mendukung stabilitas dan kesejahteraan keluarga dengan mendorong pengelolaan keuangan yang baik, investasi yang halal, dan tabungan untuk masa depan.

Instrumen keuangan syariah seperti *takaful* (asuransi syariah) juga menyediakan perlindungan bagi keluarga terhadap risiko finansial, memastikan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.

Pemeliharaan keturunan juga mencakup investasi dalam pendidikan anak-anak. Sistem ekonomi syariah mendukung pengalokasian dana zakat, infaq, dan sedekah untuk pendidikan, memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih cerah tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang berpengetahuan dan berakhlak, yang mampu meneruskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka.

Kesehatan yang baik adalah prasyarat untuk pemeliharaan keturunan yang sehat. Sistem keuangan syariah mendukung investasi dalam layanan kesehatan dan perlindungan sosial, yang mencakup penyediaan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. Dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk anak-anak dan ibu hamil, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, ekonomi syariah berkontribusi pada kesejahteraan dan kesehatan generasi mendatang.

Pemeliharaan keturunan juga mencakup pengelolaan warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem warisan dalam Islam mengatur distribusi harta secara adil di antara ahli waris, memastikan bahwa keluarga dan keturunan mendapatkan bagian yang layak dari harta peninggalan. Ini tidak hanya mencegah konflik keluarga tetapi juga memastikan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk kebaikan generasi mendatang.

---

Pendidikan yang baik tidak hanya membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, akan tetapi membentuk mereka menjadi individu yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu meneruskan nilai-nilai Islam.

---



Zakat, sebagai pilar ekonomi syariah, mendukung pemeliharaan harta secara sosial melalui distribusi kekayaan yang adil, sementara etika bisnis yang baik menjaga integritas dan keberlanjutan dalam pengelolaan harta benda.



# 1.2.

## PETA KONSEP SERTA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

---

Subbab ini akan menguraikan keselarasan pembangunan ekonomi syariah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045, serta konsep *Indonesia Islamic Economic Super Corridor* dan potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah yang merupakan **“low-hanging fruits”**. Hal ini akan membantu membentuk kerangka berpikir yang komprehensif dan terarah dalam upaya memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

---

# Peta Konsep

Peta konsep ini memberikan gambaran keseluruhan tentang strategi, tujuan, dan program yang akan diimplementasikan untuk mencapai visi besar ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan peta konsep yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat memahami hubungan antar program dan bagaimana setiap inisiatif berkontribusi terhadap tujuan akhir.

## 1. RPJPN 2025 – 2045

Ekonomi syariah diharapkan sebagai sumber pertumbuhan baru selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045. Ekonomi syariah berkontribusi dalam beberapa bagian berikut.

### Misi (Agenda) Pembangunan

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025 – 2045. Dalam menjalankan fase 1 RPJPN 2025-2045 terkait Pengembangan Ekonomi Syariah disusun Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029 adalah kontribusi PDB Syariah terhadap perekonomian nasional.

*“Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi”*

### Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas - Transformasi Sosial

Pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari ekonomi syariah tidak hanya mendukung aspek ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam transformasi sosial, khususnya dalam mewujudkan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Ekosistem halal berkontribusi pada terciptanya sistem kesehatan yang lebih baik melalui standar dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas.

*“Kebijakan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, difokuskan pada: ... pengembangan ekosistem halal”.*

### Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas - Transformasi Ekonomi

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas, khususnya melalui penguatan ekonomi dan keuangan syariah yang dapat mendukung transformasi ekonomi nasional. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta produktivitas ekonomi, sektor industri pengolahan memiliki potensi besar sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. Penguatan ekosistem ekonomi syariah dan pengembangan industri halal menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

*“Penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal untuk menjadi pusat industri halal dunia”.*

RPJPN 2025–2045 memberikan arahan yang jelas dan komprehensif dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Arahan ini mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah Indonesia di kancah global, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Selain itu, ekosistem industri halal juga menjadi fokus utama dengan penguatan sektor-sektor kunci seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik, obat-obatan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

*“Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui antara lain: (i) peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global; (ii) peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi; (iii) penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal; serta (iv) penguatan literasi, regulasi, kelembagaan serta infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah”.*

### **Stabilitas Ekonomi Makro**

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu elemen kunci dalam menjaga stabilitas ini adalah sektor keuangan yang sehat dan kondusif, yang mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Sektor keuangan yang kuat tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu dalam menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada penguatan dan integrasi sektor keuangan syariah ke dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas, guna memastikan sinergi yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*“Sektor keuangan yang kondusif diperlukan untuk memastikan optimalnya fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan sektor keuangan diarahkan melalui: ... **penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah**”.*

---

### **Pembangunan Wilayah & Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas**

Pembangunan wilayah dan penguatan sarana prasarana merupakan elemen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor, termasuk sektor publik dan nonpublik, dalam pembiayaan pembangunan. Selain pembiayaan publik, sektor nonpublik berperan penting dalam memperluas sumber daya finansial melalui optimalisasi dana masyarakat, seperti filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan. Inovasi dalam skema pembiayaan syariah juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pembiayaan sektor publik, sehingga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan wilayah

*“Sementara itu, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan antara lain melalui optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan; pengembangan inovasi skema-skema pembiayaan syariah untuk sektor publik”.*

---





## Mengawal Indonesia Emas : Kekinambungan Pembangunan

### a. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik

RPJPN 2025–2045 menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Salah satu tantangan utama dalam mencapai visi ini adalah pendanaan pembangunan, yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik menjadi strategi kunci dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan nasional. UU ini mendorong pengembangan inovasi produk pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil. Inovasi ini dirancang untuk memperluas akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

*“Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik melalui ... Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil”.*

### b. Penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

Kesinambungan pembangunan nasional memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Salah satu komponen penting dalam mengawal pembangunan menuju Indonesia Emas adalah penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Penerapan manajemen risiko di setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga *monitoring*, memastikan bahwa program-program pembangunan, termasuk yang terkait dengan ekonomi syariah, dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dapat diminimalkan, sambil memaksimalkan peluang keberhasilan di berbagai sektor.

*“Peningkatan kapasitas pendanaan sektor nonpublik dilakukan ... yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi **risiko finansial** bagi partisipasi sektor nonpublik dalam pembangunan nasional.”*

Dalam penyusunan peta konsep, **cascading** atau perincian melalui kerangka makro-meso-mikro sangat penting untuk memastikan pendekatan yang terstruktur dan efektif. Selain itu, penyesuaian dengan klaster industri prioritas nasional yang tercantum dalam RPJPN tahap 1 (2025-2029) juga menjadi kunci dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang Indonesia. Klaster industri prioritas ini meliputi Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), Industri Barang Konsumsi Berkelanjutan, Industri Berteknologi Menengah dan Tinggi, Industri Berbasis Inovasi dan Riset, serta Industri Kreatif.

Hilirisasi industri berbasis SDA, misalnya, sangat berkaitan dengan industri halal, seperti sektor makanan dan minuman serta farmasi halal, yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut dari hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Sementara itu, industri berbasis inovasi dan riset dapat bersinergi dengan pengembangan produk-produk halal dan keuangan syariah yang inovatif, seperti sukuk hijau dan produk perbankan syariah digital. Dengan begitu, peta konsep tidak hanya fokus pada penguatan sektor syariah semata, tetapi juga mendukung pencapaian target industri nasional melalui integrasi antara pengembangan ekonomi syariah dan sektor industri prioritas.

Selain itu, Industri **Barang Konsumsi Berkelanjutan** juga relevan dengan upaya pengembangan ekosistem halal yang berkelanjutan, terutama dalam industri fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim. Dengan menyesuaikan peta konsep untuk mendukung klaster industri nasional ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri nasional di pasar global, sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN dan RPJMN.

Peta konsep tidak hanya fokus pada penguatan sektor syariah semata, tetapi juga mendukung pencapaian target industri nasional melalui integrasi antara pengembangan ekonomi syariah dan sektor industri prioritas.



## 2. INDONESIA ISLAMIC ECONOMIC SUPER CORRIDOR

Tujuan utama dari pengembangan pilar ekonomi dan keuangan syariah adalah terbentuknya *super corridor* yang mendukung interkoneksi setiap subsistem yang mencakup *flow of products and services*, *flow* investasi dan *grants*, *flow* data dan informasi, serta interkoneksi regulasi dan supervisi.

### 6 PRINSIP DASAR YANG MENJADI ACUAN DALAM PENGEMBANGAN ISLAMIC SUPER CORRIDOR ADALAH SEBAGAI BERIKUT.



#### 1. **EFISIENSI**

Sistem keuangan syariah harus mencapai tingkat efisiensi yang tinggi agar dapat menjadi pilihan bagi masyarakat selain juga melaksanakan aspek *compliance* dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Adapun efisiensi yang dicapai meliputi aspek produksi dalam *halal-value-chains* dan keuangan syariah yang menghasilkan *affordable* dan *fortifiable cost of funds*.

#### 4. **ETHICS**

Pengembangan dan diseminasi konsep *ethics* dalam ekonomi syariah diharapkan untuk memberikan dampak yang mendalam khususnya dalam aspek pembentukan preferensi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sepatutnya menjadi *'social capital'* yang senantiasa perlu dilestarikan.

#### 2. **PRODUCTIVE INNOVATION**

Pengembangan ekonomi syariah harus selalu di *'lead'* oleh *innovative and creative thinking* yang memungkinkan industri untuk memberikan solusi-solusi implementatif bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi syariah akan sangat bersifat pro terhadap pengembangan teknologi di berbagai bidang. Dengan batasan etik yang jelas, proses inovasi harus selalu diarahkan kepada kemanfaatan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

#### 5. **DIGITAL TECHNOLOGY**

Implementasi dari teknologi digital menjadi keharusan di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan visi yang ingin dikembangkan yaitu membangun interkoneksi antar segmen dalam subsistem perekonomian syariah.

#### 3. **PRUDENCE**

Sistem produksi maupun keuangan syariah perlu untuk mengembangkan suatu metoda untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi dan keuangan selalu berada di dalam koridor kehati-hatian yang akan menjaga sistem dari potensi terjadinya kerugian yang tidak diantisipasi sebelumnya.

#### 6. **HARMONY WITH THE GLOBAL INITIATIVES**

Pengembangan ekonomi syariah dilakukan dalam suatu harmoni dengan inisiatif-inisiatif global maupun nasional yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperluas arti kesejahteraan ekonomi dalam suatu konsep keberlangsungan.

Gambar 2 Prinsip Indonesia Islamic Super Corridor  
Sumber: Bank Indonesia (2024)



Prinsip-prinsip dasar pengembangan ekonomi syariah tersebut diterjemahkan ke dalam program-program yang nyata dan memberikan *impact* yang bersifat *tangible* dan signifikan.

Hal ini diperlukan untuk menjaga keterukuran program pengembangan dan memungkinkan dilakukannya *assessment* dan penyusunan program intervensi agar *trajectory* dari pengembangan ekonomi syariah senantiasa berada pada kondisi yang diharapkan. *Interlink* antara program pengembangan dengan klasifikasi *ordnance* dalam perhitungan Produksi Domestik Bruto (PDB) sektoral syariah akan sangat dibutuhkan. Dengan kemampuan *monitoring* yang kuat, stratifikasi program berdasarkan prioritas akan dapat dilakukan secara lebih efektif berdasarkan klasifikasi *probability of success*, *controllability*, dan *impacts* yang dihasilkan.

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dari sub-sub sistem ekonomi dan keuangan yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan modern yang menggambarkan interkoneksi antar subsistem dalam kausalitas *Input-Output* secara nasional. Oleh karena itu, keberadaan *human resource* yang memahami *positioning* dan dinamika sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan. Gambar 2 memuat prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan *Islamic Super Corridor*.

Program literasi ekonomi dan keuangan syariah akan selalu berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar di atas. Dengan demikian, interkoneksi dengan sub-sub sistem yang lain akan terbangun dengan baik dalam suatu sistem informasi yang akurat dan *timely*. Beberapa manfaat program literasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah:

### ***SIGNAL TO NOISE RATIO***

Diseminasi informasi yang dilakukan melalui strategi nasional ekonomi dan keuangan syariah harus dapat berfungsi sebagai *information mainstream* di dalam masyarakat yang dapat secara efektif mengatasi *noise* yang terjadi.

### ***FEEDING APPROPRIATE INFORMATION***

Informasi yang disusun harus memiliki konten yang sesuai dengan tujuan *audience* berdasarkan sektor ekonomi dan segmen yang diharapkan untuk dapat bergerak. Sebagai contoh, metoda penyampaian dengan teknologi digital terkini dan segmen apakah pada level konsumen atau produsen besar akan sangat berbeda.

### ***THE POWER OF BIG NUMBER***

Program literasi ekonomi dan keuangan syariah harus dapat mengharmonisasikan program dan konten literasi sehingga diharapkan akan terjadi '**program resonance**'.

## **3. THE LOW-HANGING FRUITS**

Secara umum terdapat delapan klaster, yang merupakan kesepakatan tim penyusun PDB Syariah, yang menjadi fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. makanan minuman halal
2. pariwisata ramah muslim (PRM)
3. fesyen muslim
4. ekonomi kreatif syariah
5. farmasi dan kosmetik halal
6. energi terbarukan
7. keuangan syariah
8. sektor syariah lainnya.

Delapan sektor tersebut merupakan klaster dari PDB syariah.

Kedepannya, implementasinya akan dikolaborasikan oleh KNEKS, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia serta didukung sektor keuangan syariah sebagai *enabler*. Kedelapan sektor diatas dikelompokkan lagi ke dalam tiga area utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari rantai nilai industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. Pengembangan dari setiap klaster dilandasi dengan prinsip *Maqasid al-Shariah*, sehingga akan dapat mendorong produktivitas, stabilitas dan pemerataan ekonomi serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pra-sejahtera (dhuafa'). Potensi ekonomi syariah global yang diperkirakan meningkat setiap tahunnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi domestik, salah satunya dengan mendorong berbagai *drivers* pertumbuhan baik dari sisi *supply* maupun sisi *demand*.

# Perkembangan Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tanggal 2 Agustus 2016 melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2016. Komite ini memiliki tujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah.

Setelah berjalan 4 tahun melalui Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020, dalam rangka peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, perlu dilakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

KNEKS memiliki fungsi pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah, perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah, dan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan

Secara struktural organisasi KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua KNEKS dan dibantu ketua harian yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketua Harian KNEKS memiliki peran membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif. KNEKS bertanggung jawab untuk merumuskan, merekomendasikan, mengawasi dan mengevaluasi arah kebijakan dan strategi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

KNEKS memiliki 16 anggota Kementerian dan Lembaga yang mempunyai tugas bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional serta melaksanakan arah kebijakan Ketua Harian dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam tata kerjanya KNEKS memiliki agenda melaksanakan rapat pleno KNEKS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

---

Dengan 16 anggota Kementerian dan Lembaga, KNEKS berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan kebijakan, penyusunan program strategis, dan pelaksanaan program sesuai bidang tugas masing-masing.

---

# Perkembangan Industri Halal Nasional



**241,7 Juta**  
muslim di Indonesia,  
setara dengan  
**89,02%**  
penduduk Indonesia

Sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan ceruk market yang besar bagi pengembangan industri halal. Data Kemenag (2022) menyebutkan, terdapat 241,7 juta muslim di Indonesia. Jumlah ini sebanding dengan 89,02% dari populasi keseluruhan. Secara definisi, industri halal diartikan sebagai kegiatan industri yang pada setiap prosesnya mencakup segala sumber daya dan cara yang diperbolehkan secara syariat Islam, mulai dari proses pengolahan dari bahan mentah hingga menjadi produk halal. Sementara itu, berdasarkan survei terhadap preferensi makanan halal, masyarakat muslim Indonesia mengartikan produk makanan/minuman sebagai makanan/minuman halal apabila kandungan bahan bakunya menggunakan bahan yang halal serta ada logo halal.

**Layanan/jasa diartikan halal jika sistem pengelolaannya sesuai dengan syariah. Secara keseluruhan, 69% masyarakat meyakini produk/jasa menjadi halal dari adanya logo halal pada produknya atau banyaknya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan layanan jasanya**

*(Bank Indonesia, 2022)*

Berdasarkan Indonesia Halal Market Report (IHMR) 2021/2022, Indonesia berpeluang menambah USD 5,1 miliar atau IDR 72,9 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor yang termasuk pada industri halal. Selain itu, State of the Global Islamic Report 2023 melaporkan, Indonesia berada di posisi ketiga dalam perkembangan industri halal global, perkembangan tersebut terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan riset preferensi masyarakat terhadap industri halal yang dipublikasikan oleh Populix, sebesar 83% responden menjadikan logo halal sebagai pertimbangan utama mereka ketika melakukan pembelian produk. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan preferensi masyarakat terhadap produk halal. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei, makanan dan minuman kemasan siap saji menjadi dua produk halal yang paling sering dibeli oleh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.

Kontribusi industri halal pada PDB tahun 2022 sebesar:

**US\$ 5,1 miliar**



**83%**

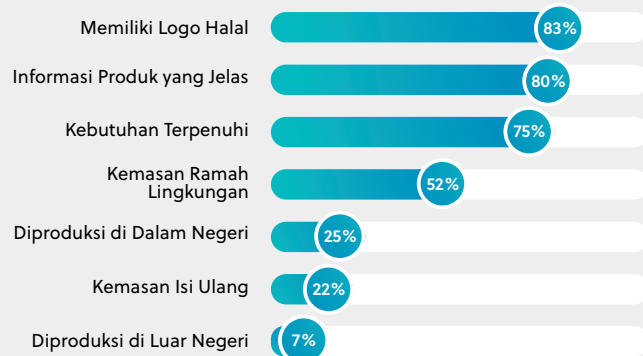
menjadikan logo halal sebagai pertimbangan utama ketika melakukan pembelian produk



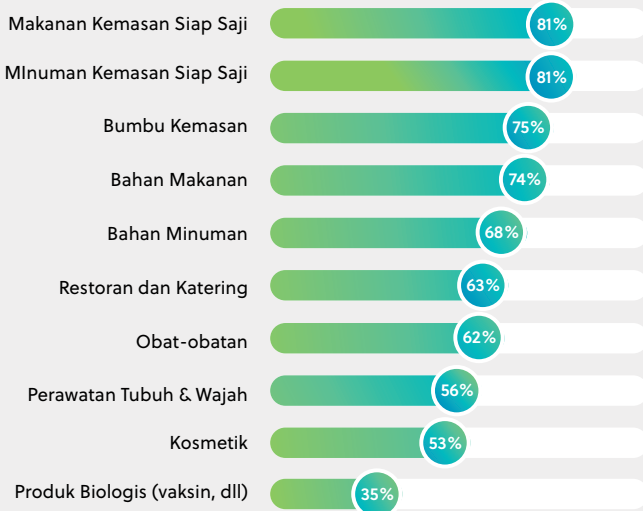
## BASIS PEMILIHAN PRODUK & JASA HALAL

(Insight and Customer Perspective of Halal Industry in Indonesia | Populix)

### Faktor Pertimbangan Masyarakat Ketika Membeli Suatu Produk



### Kategori Produk Halal yang Paling Sering Dibeli Masyarakat



Gambar 3 Basis Pemilihan Produk Dan Jasa Halal (Populix, 2023)

Pada tahun 2025, industri halal di Indonesia diperkirakan bertumbuh sebesar 14,96% sehingga mencapai US\$ 281,6 miliar. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia dengan 11,34% dari total pengeluaran halal global. Pertumbuhan yang pesat ini antara lain didorong oleh strategi pengembangan, sertifikasi, dan pemberdayaan industri.

### Perkiraan Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia TAHUN 2025

# 14,96%

Mencapai

# US\$ 281,6 MILIAR

Di masa depan, seiring dengan dengan terbitnya Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029, pertumbuhan industri halal dapat didukung dengan implementasi percepatan dan penguatan sertifikasi halal secara masif. Terlebih lagi, diharapkan akan terjalin sinergi dan kerjasama yang kuat antara seluruh elemen bangsa Indonesia demi mewujudkan cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.



# Perkembangan Keuangan Syariah Nasional

Keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama enam tahun terakhir dan masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh. Gambar 4 menunjukkan perkembangan industri keuangan syariah. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2022, total aset Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS) mencapai Rp2.375,84 triliun dengan pertumbuhan 15,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara lebih detail, aset pasar modal syariah, yang merupakan penyumbang terbesar mencapai Rp1.427,48 triliun, perbankan syariah Rp802,28 triliun, sementara aset Industri Keuangan Nonbank (IKNB) syariah mencapai Rp146,12 triliun.



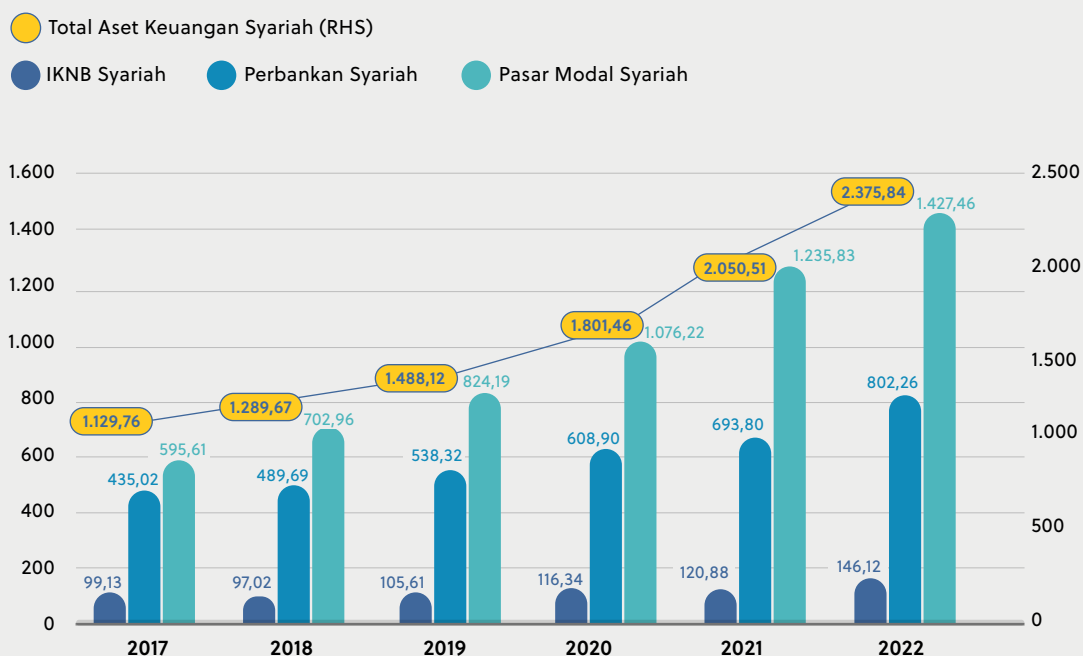
Pertumbuhan  
15,87% yoy

Total Aset Industri Jasa  
Keuangan Syariah (IJKS)  
pada tahun 2022 mencapai

**Rp2.375,84  
triliun**

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

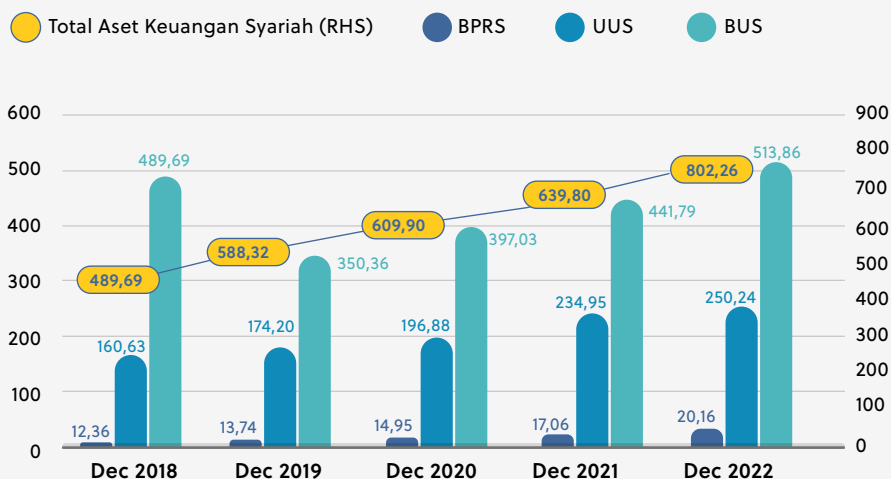
## PERKEMBANGAN TOTAL ASET INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH



Gambar 4 Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah Nasional (OJK, 2023)

Selanjutnya, Gambar 5 mengilustrasikan perkembangan aset perbankan syariah yang mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Perkembangan ini didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang meningkat 16,31% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp513,86 triliun pada tahun 2022. Unit Usaha Syariah menyusul di posisi kedua dengan pertumbuhan 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp250,24 triliun pada tahun 2022. Meskipun memiliki aset terkecil, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total aset BPRS mencapai Rp20,16 triliun pada tahun 2022, meningkat sebesar 18.17% dibandingkan tahun sebelumnya.

## PERKEMBANGAN ASET PERBANKAN SYARIAH NASIONAL



Gambar 5 Perkembangan Aset Perbankan Syariah Nasional (OJK, 2023)

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah sebagai salah satu indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan syariah turut mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 1, jumlah rekening Dana Pihak Ketiga pada tahun 2022 mencapai 53.985 ribu. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 27.56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1: Perkembangan Jumlah DPK Perbankan Syariah

Tahun	Jumlah Rekening DPK (dalam ribuan)
2018	29.068
2019	33.786
2020	38.144
2021	42.321
2022	53.985

Sumber: OJK (2023)

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2022 juga berekspansi sangat baik. Jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2022 sebanyak 8.198 juta. Jumlah ini meningkat 14.29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam Tabel 2. Berdasarkan peningkatan rekening DPK dan pembiayaan, terdapat peningkatan preferensi masyarakat terhadap jasa perbankan syariah meskipun pertumbuhan masih relatif rendah.

Tabel 2: Perkembangan Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah

Tahun	Jumlah Rekening PYD (dalam Jutaan)
2018	5.672
2019	6.162
2020	6.248
2021	7.173
2022	8.198

Sumber: OJK (2023)



Adapun data pengguna produk perbankan konvensional dan syariah salah satunya dicerminkan oleh jumlah rekening pembiayaan untuk Bank Syariah atau rekening kredit untuk Bank Konvensional serta DPK masing-masing, sebagaimana terdapat pada Tabel 3.

Pada tahun 2022, terdapat 508.546.341 rekening simpanan pada bank syariah dan konvensional. Angka ini meningkat 31,64% dibandingkan dengan jumlah rekening simpanan pada tahun sebelumnya. Peningkatan yang sama juga ditemukan pada jumlah rekening kredit/pembiayaan. Terdapat 123.526.253 rekening pembiayaan/kredit pada tahun 2022. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 68,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kedua jumlah rekening ini merepresentasikan membaiknya tingkat inklusi masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah rekening simpanan pada bank syariah dan konvensional sebanyak 31,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam rentang tahun yang sama, rekening pembiayaan/kredit juga mengalami pertumbuhan sekitar 68,10%

Tabel 3: Penggunaan Produk Perbankan Konvensional dan Syariah

Indikator Penggunaan			
	Des 2021	Des 2022	Perubahan (YoY)
Jumlah rekening simpanan	386.319.094	508.546.341	31,64%
Jumlah rekening kredit/pembiayaan	73.485.471	123.526.253	68,10%

Sumber: Kemenko Perekonomian (2023)

Berdasarkan riset OJK terkait keuangan syariah pada tahun 2022 (LPKSI OJK, 2023), Edi Setijawan, Endang Nuryadin, dan Sulistyoningsih menemukan bahwa fungsi sosial bank syariah meningkatkan profitabilitas dan menurunkan risiko kredit. Peningkatan ini terlihat lebih besar pada BUS dibandingkan UUS. Insentif bagi bank syariah yang melaksanakan fungsi sosial dapat berupa Peningkatan Peringkat Komposit (PK) satu level dan Insentif pajak korporasi/perusahaan.

Selain itu, Endang Nuryadin, Edi Setijawan, dan Sulistyoningsih juga mencatat bahwa peningkatan kinerja fungsi sosial dapat meningkatkan profitabilitas (ROA), dan menurunkan *Non Performing Financing* (NPF). Lebih lanjut, peningkatan kinerja fungsi sosial berupa pinjaman *Qardh/hasan* untuk UMKM dapat meningkatkan profitabilitas bank.

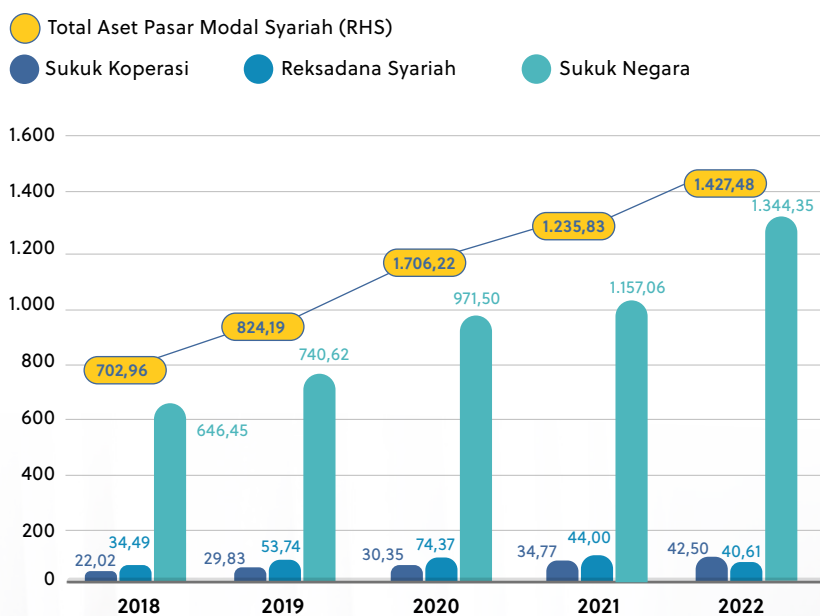
Riset OJK 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah, terutama dalam bentuk pinjaman qard/hasan untuk UMKM, tidak hanya meningkatkan profitabilitas (ROA) dan menurunkan risiko kredit (NPF), tetapi juga berpotensi meningkatkan peringkat komposit dan memberikan insentif pajak bagi bank.

Adapun Gambar 6 menunjukkan perkembangan aset pasar modal syariah yang mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Perkembangan ini didominasi oleh sukuk negara yang meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp1.344,35 triliun dibandingkan dengan tahun 2021, sebesar Rp1.157,06 triliun. Kemudian sukuk korporasi menyumbang perkembangan aset pasar modal syariah, dimana pada tahun 2022 aset sukuk korporasi mencapai Rp42,50 triliun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai Rp34,77 triliun. Sedangkan reksadana syariah menyumbang perkembangan terkecil, dimana pada tahun 2022 perkembangan asetnya mencapai Rp40,81 triliun, menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp44 triliun. Total penambahan pada perkembangan aset pasar modal syariah, pada tahun 2022 mencapai Rp1.427,48 triliun.

Peningkatan  
sukuk negara  
tahun 2021 ke tahun  
2022 sebesar

**Rp187,29  
triliun**

## PERKEMBANGAN TOTAL ASET PASAR MODAL SYARIAH

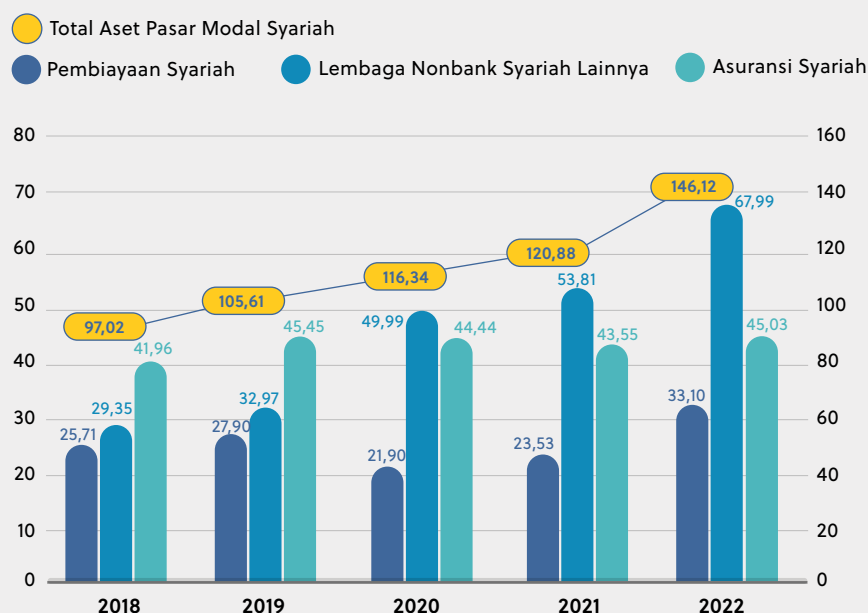


Gambar 6 Perkembangan Total Aset Pasar Modal Syariah Nasional (OJK, 2023)



Gambar 7 menunjukkan perkembangan aset industri keuangan nonbank (IKNB) syariah yang mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Perkembangan ini didominasi oleh lembaga nonbank syariah lainnya yang meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp67,99 triliun dibandingkan dengan tahun 2021, sebesar Rp53,81 triliun. Kemudian asuransi syariah menyumbang perkembangan aset IKNB syariah, dimana pada tahun 2022 aset asuransi syariah mencapai Rp45,03 triliun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai Rp43,55 triliun. Sedangkan pembiayaan syariah menyumbang perkembangan terkecil, dimana pada tahun 2022 perkembangannya mencapai Rp33,10 triliun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai Rp23,53 triliun. Total penambahan pada perkembangan aset IKNB syariah, pada tahun 2022 mencapai Rp148,12 triliun.

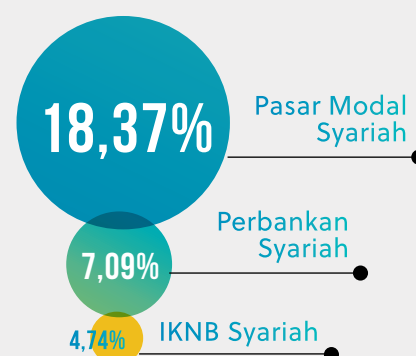
## PERKEMBANGAN TOTAL ASET IKNB SYARIAH



Gambar 7 Perkembangan Total Aset Pasar Modal Syariah Nasional (OJK, 2023)

Gambar 8 menunjukkan perkembangan *Market share* keuangan syariah. *Market share* keuangan syariah mencapai 10,69% terhadap keuangan nasional pada tahun 2022. Secara parsial, industri perbankan syariah memiliki *market share* sebanyak 7,09% terhadap pangsa pasar keuangan nasional; IKNB syariah memiliki pangsa pasar sebanyak 4,74% terhadap keuangan nasional, dan terakhir pasar modal syariah memiliki pangsa pasar sebanyak 18,37% terhadap pangsa pasar keuangan nasional.

## MARKET SHARE SEKTOR KEUANGAN SYARIAH



Gambar 8 Market Share Perkembangan Aset Sektor Keuangan syariah Nasional Sumber: OJK (2023)



# Perkembangan Keuangan Sosial Syariah Nasional

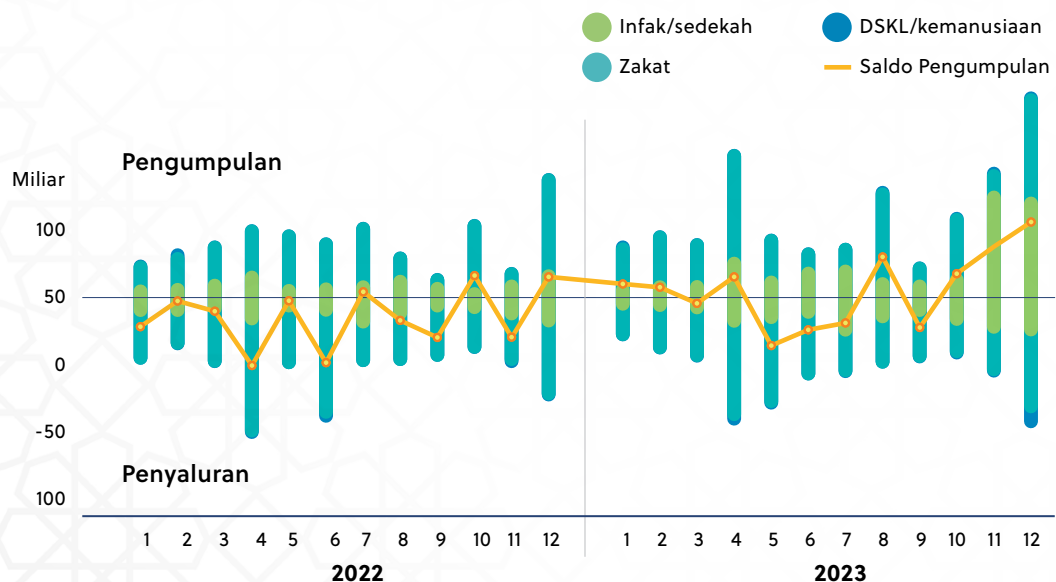
Kinerja pengelolaan dana sosial masyarakat semakin baik, terlihat dari meningkatnya pengumpulan dan penyaluran dana melalui perbankan syariah.

Keuangan sosial syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh lebih optimal. Hal ini didukung dengan potensi besar filantropi masyarakat Indonesia. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan **World Giving Index (WGI)** yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation (CAF).

Predikat tersebut menunjukkan keberhasilan para pegiat filantropi, khususnya badan dan lembaga pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dalam menggalang, mengelola dan mendayagunakan dana keuangan sosial syariah. Kinerja pengelolaan dana sosial masyarakat semakin baik, terlihat dari meningkatnya pengumpulan dan penyaluran dana melalui perbankan syariah.

Hingga Desember 2023, total pengumpulan keuangan sosial melalui perbankan mencapai Rp741,45 miliar, meningkat 54% dibandingkan pengumpulan sepanjang 2022 yang sebesar Rp481,7 miliar. Porsi pengumpulan terbesar dana keuangan sosial syariah adalah dana zakat (62%), disusul infak/sedekah (37%) dan DSKL/kemanusiaan (1%). Di sisi lain, total penyaluran keuangan sosial melalui perbankan hingga Desember 2023 mencapai Rp671 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp659 miliar. Perkembangan keuangan sosial syariah tercermin pada Gambar 9 berikut ini.

## PENGUMPULAN & PENYALURAN KEUANGAN SOSIAL SYARIAH ANTAR BANK



Gambar 9 Pengumpulan dan Penyaluran Keuangan Sosial Syariah Antarbank  
Sumber: Bank Indonesia (2023)

Warna ● menunjukkan realisasi pengumpulan dan penyaluran dana. Terlihat adanya gap antara angka pengumpulan dan penyaluran, hal ini dikarenakan proses penyaluran membutuhkan waktu dan proses verifikasi.

Pada tahun 2023, total penerima manfaat BAZNAS dari semua bidang sebanyak 2,481,502 juta orang, jumlah ini meningkat sebesar 3.29% dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya, sebagaimana terdapat pada Tabel 4. BAZNAS telah menetapkan 5 bidang program penyaluran melalui 8 program prioritas nasional. Delapan Program Prioritas Nasional BAZNAS Tahun 2023 yaitu Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB), BAZNAS Microfinance, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Zmart, ZChicken, Beasiswa dan Santripreneur.

Tabel 4: Perbandingan Penerima Manfaat BAZNAS Tahun 2022 dan 2023

No.	Bidang Program	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Pertumbuhan (%)
1	Kemanusiaan	1.780.465	1.675.615	-5,89
2	Kesehatan	400.921	315.384	-21,34
3	Pendidikan	61.144	98.501	61.10
4	Ekonomi	25.258	49.415	95.64
5	Dakwah-advokasi	134.638	342.587	154.45
<b>Total</b>		<b>2.402.426</b>	<b>2.481.502</b>	<b>3.29</b>

Sumber: BAZNAS, 2023





Ekonomi syariah  
bukan hanya tentang  
menghindari riba,  
tetapi juga tentang  
membangun  
sistem ekonomi  
yang berkeadilan,  
berkelanjutan, dan  
bermanfaat bagi seluruh  
umat manusia.

- Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin



# 1.3. PERAN LITERASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

---

Program literasi pada dasarnya mencakup program edukasi baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan preferensi dari masyarakat yang positif dan konstruktif terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

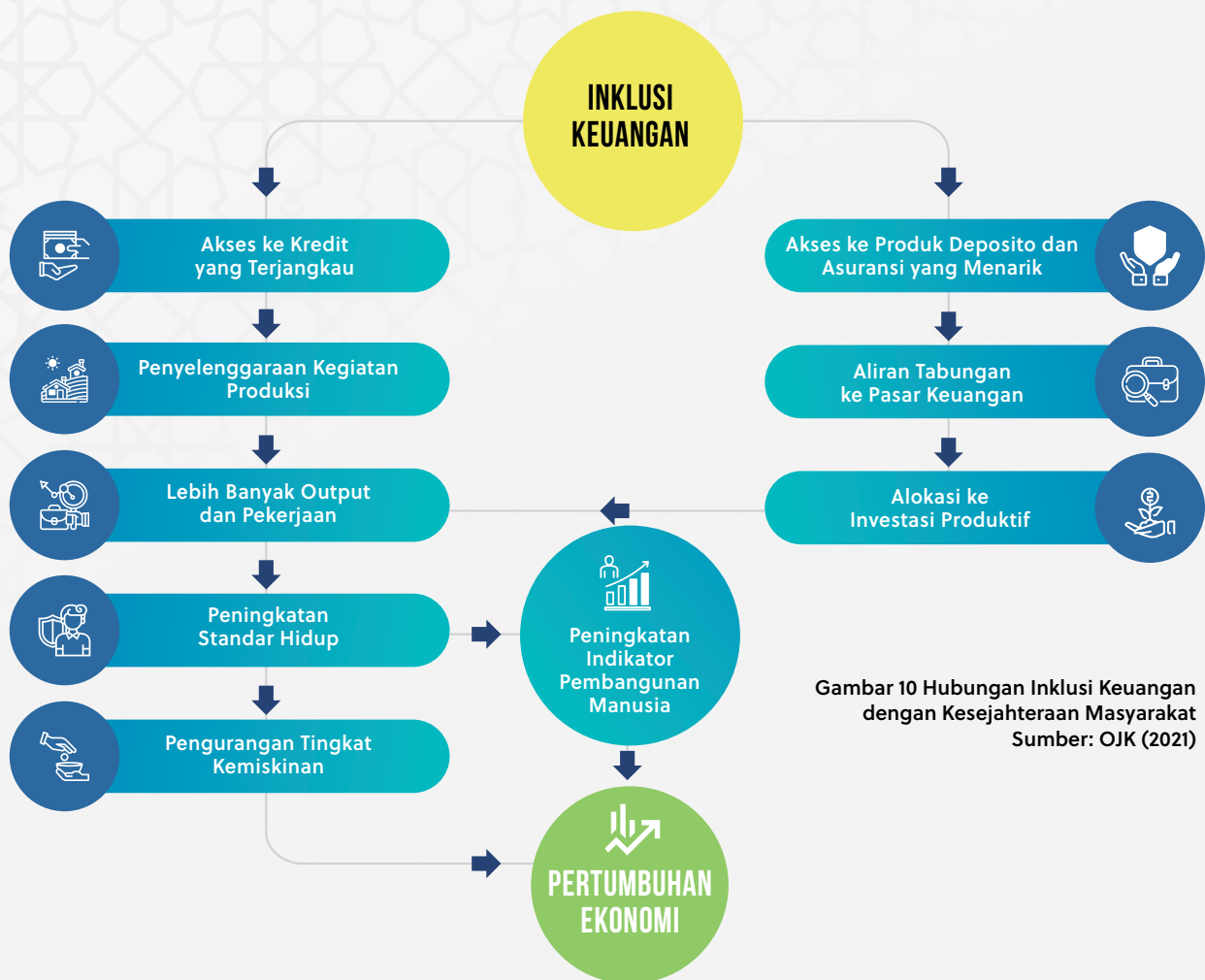
---

Pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sangatlah ditentukan oleh kapasitas produksi dan konsumsi di suatu negara. Oleh karena itu, dalam suatu sistem ekonomi yang kuat, selain ditopang oleh proses produksi yang efisien, sistem ekonomi tersebut diharapkan memiliki preferensi konsumsi yang loyal terhadap produksi lokal dan preferensi investasi yang mendukung proses produksi. Program literasi pada dasarnya mencakup program edukasi baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan preferensi dari masyarakat yang positif dan konstruktif terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat peran penting program literasi tersebut, upaya peningkatan literasi telah menjadi perhatian berbagai negara. Upaya ini dilakukan melalui penyiapan berbagai kebijakan program yang terstruktur sebagai bagian dari peningkatan literasi keuangan melalui cetak biru strategi nasional literasi keuangan. *Organization for Economic Co-operation and Development International Network for Financial Education (OECD/INFE)* melaporkan, pada tahun 2017 terdapat lebih dari 80 negara/ otoritas pemerintah telah mengimplementasikan strategi nasional literasi keuangan.

Lebih lanjut, beberapa studi menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Sethi dan Acharya (2018) menunjukkan, kebijakan literasi keuangan akan mendorong *demand-side* partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas produk dan layanan jasa keuangan. Kebijakan inklusi keuangan berupa peningkatan kapasitas, akses, distribusi, dan diversifikasi segmentasi produk akan menyebabkan peningkatan *supply-side* partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas dan layanan produk dan jasa keuangan. Kemudian, studi oleh Demertzis, Domínguez-Jiménez, dan Lusardi (2020) serta Clark, Lusardi, dan Mitchell (2021) menunjukkan, setelah pandemi COVID-19 dan dislokasi ekonomi yang diakibatkannya, semakin jelas bahwa setiap orang harus memiliki tabungan untuk berjaga-jaga dan mengelola uang dengan baik agar dapat menjamin kesejahteraan ekonomi mereka. Studi oleh Lusardi, Michaud, dan Mitchell (2017) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, perbedaan dalam literasi keuangan juga berkontribusi pada ketidaksetaraan kekayaan.

Upaya peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah telah dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga. Bank Indonesia secara konsisten melaksanakan kegiatan tahunan berupa Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di 3 (tiga) kawasan, yaitu Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia, dan kegiatan Indonesia Sharia *Economic* Festival (ISEF). Kegiatan Fesyar dan ISEF berisi aneka ragam kegiatan yang dimaksudkan agar literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat semakin meningkat. Sejalan dengan BI, OJK juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024, dan Karya Riset Ilmiah (KARISMA) 2024.

Gambar 10 menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya sekedar akses ke layanan keuangan, tetapi juga memiliki dampak luas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan akses terhadap kredit, deposito, dan asuransi, masyarakat dapat meningkatkan standar hidup mereka, mengurangi kemiskinan, dan secara keseluruhan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diiringi oleh peningkatan Indikator Pembangunan Manusia.



Gambar 10 Hubungan Inklusi Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat  
Sumber: OJK (2021)

Agenda berikut merupakan contoh program literasi yang kontributif terhadap pembangunan ekonomi dan mencakup berbagai inisiatif global. Selandia Baru telah menjadi pelopor dalam membangun situs web nasional untuk pendidikan keuangan. Di lain pihak, banyak negara yang kini mendedikasikan satu minggu atau bulan untuk literasi keuangan, seperti bulan April di Amerika Serikat, bulan November di Kanada, dan bulan Oktober di Italia, sebagai cara efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi keuangan. Kemudian, sejak diluncurkan pada tahun 2012, *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang dijalankan oleh OECD telah menambahkan literasi keuangan ke dalam seperangkat topik-topik yang harus diketahui oleh siswa berusia 15 tahun untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat modern dan berhasil di pasar tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan kini telah dianggap sebagai keterampilan esensial seperti membaca, menulis, dan pengetahuan sains.

Pengembangan sektor keuangan sosial syariah sangat dipengaruhi oleh kemauan masyarakat untuk berdonasi (*marginal propensity to donate*), yang ternyata berkaitan erat dengan tingkat religiusitas dan rasionalitas seseorang.





Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara tersebut, seperti membuat situs web nasional untuk pendidikan keuangan; mendedikasikan waktu khusus untuk kampanye literasi keuangan; dan memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum sekolah, untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi.

# 1.4. VISI STRATEGI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA (SNLIEKSI)

Untuk merumuskan dokumen strategi yang komprehensif dan efektif, diperlukan analisis situasi strategis yang mendalam. Analisis ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, serta memahami dinamika dan tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, analisis lingkungan strategis menjadi langkah awal yang krusial sebelum menetapkan Visi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI). Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi tersebut realistis, relevan, dan dapat dicapai dalam konteks yang ada. Selanjutnya, bagian ini akan membahas lingkungan strategis yang menjadi landasan dalam menyusun strategi tersebut.

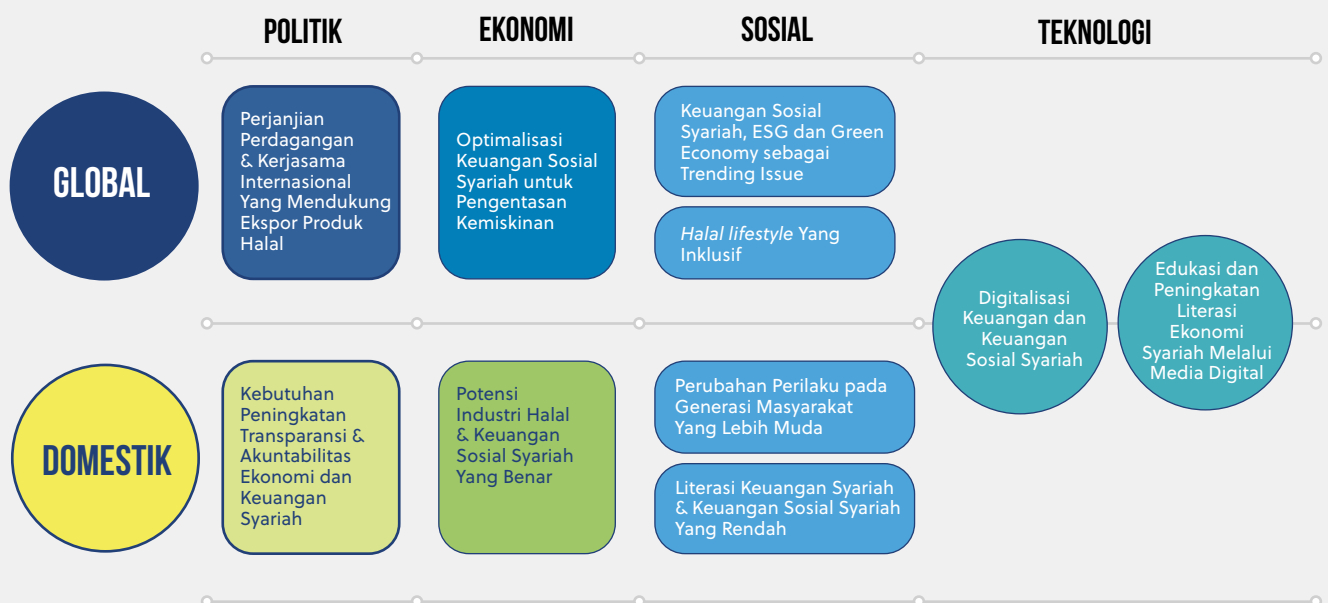
# Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis secara makro dilakukan untuk memahami kondisi eksternal, baik pada lingkungan global maupun domestik. Analisis lingkungan, yang terdiri dari analisis eksternal dan internal, merupakan langkah krusial dalam memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi strategi yang akan diterapkan, baik faktor yang dapat dikontrol maupun tidak.

**Analisis eksternal** mengkaji peluang dan ancaman yang muncul dari situasi politik dan regulasi, sosial-ekonomi, dan kondisi global.

Di sisi lain, **analisis internal** mengkaji kekuatan dan sumber daya yang saat ini dimiliki untuk menjalankan program strategis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

*Framework* yang digunakan dalam analisis situasi ini adalah dimensi **PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi)** terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal, sebagaimana terdapat pada Gambar 11.



Gambar 11 Analisis Lingkungan Global dan Domestik

**Dalam konteks global**, faktor politik meliputi perjanjian perdagangan dan kerjasama internasional yang mendukung ekspor produk halal.

**Pada tingkat domestik**, ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ekonomi dan keuangan syariah.



Perekonomian global saat ini mengalami tantangan signifikan, ini ditandai dengan pertumbuhan yang melambat dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini tidak hanya mempengaruhi negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan ini diantaranya konflik geopolitik yang berkepanjangan, seperti perang di Ukraina dan konflik lainnya di berbagai belahan dunia. Konflik ini mengganggu perdagangan dan investasi internasional, serta menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Karmer, et al, 2022).

Selain itu, meningkatnya tingkat inflasi di banyak negara juga menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli konsumen dan kepercayaan bisnis, juga mengurangi investasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (World Economic Forum, 2022). Selain itu, terdapat kekhawatiran akan fragmentasi dan perlambatan dalam perdagangan global, yang dapat berdampak negatif pada ekspor Indonesia.

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara nasional maupun secara global. Namun demikian, tantangan global dan nasional juga sedikit banyak akan berpengaruh pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kedepan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, belum dapat memaksimalkan potensinya untuk dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka. Upaya untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi preferensi utama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, tentunya menghadapi tantangan yang lebih besar dengan dinamika lingkungan strategis yang berubah baik global maupun nasional.

Meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan ini, perekonomian Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5,05% pada tahun 2023, bersama dengan peningkatan permintaan domestik, telah membantu mengimbangi perlambatan perdagangan global. Perekonomian syariah dan pertumbuhan industri halal diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dari sisi ekonomi, secara global terdapat optimalisasi keuangan sosial syariah untuk penanggulangan kemiskinan, yang mencakup berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi keuangan sosial syariah di Indonesia sangat besar. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui zakat dan wakaf mencapai triliunan rupiah. Jika dana ini dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.







Pertumbuhan ekonomi  
Indonesia pada tahun 2023

**5,05%**

---

Perekonomian syariah dan pertumbuhan industri halal diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

---

Masa depan perekonomian Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana tren global dan domestik ini berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut, meskipun dengan laju yang sedikit lebih lambat daripada tahun sebelumnya (Purwanto, 2023). Konsumsi rumah tangga diprediksi tetap kuat, hal ini akan memberikan dukungan penting bagi aktivitas perekonomian dalam negeri (Nasution, 2023). Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Perlambatan ekonomi global dapat berdampak negatif pada ekspor Indonesia, sementara meningkatnya harga barang global dapat memberikan tekanan pada tingkat inflasi di dalam negeri.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu diantisipasi. Perlambatan ekonomi global berpotensi menekan ekspor Indonesia, sementara kenaikan harga komoditas global dapat memicu inflasi di dalam negeri.

Walaupun menghadapi beberapa tantangan, upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap iklim ekonomi. Melalui upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan, masyarakat diharapkan akan lebih mampu mengelola uang mereka secara efektif, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap program literasi keuangan, karena masyarakat yang melek finansial cenderung lebih kritis dan selektif dalam memilih produk dan layanan keuangan, mendorong inovasi di sektor ini.

Selain itu, dengan memperluas akses terhadap layanan keuangan, terutama di daerah pedesaan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan, pemerintah berupaya agar sebanyak mungkin masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang esensial.



Secara sosial, terjadi beberapa perubahan besar di masyarakat baik di masyarakat Indonesia maupun masyarakat global.

Empat poin perubahan utama berada pada:



ESG dan ekonomi hijau



faktor perubahan demografi



halal lifestyle



literasi keuangan, keuangan syariah, dan keuangan sosial syariah yang rendah.

Dominasi generasi milenial dan Gen Z di Indonesia membawa tantangan tersendiri karena karakteristik unik mereka yang mempengaruhi cara mereka mengonsumsi informasi, gaya hidup, investasi, dan belanja.

Menguatnya perhatian dunia terkait isu *Environmental, Social, and Governance (ESG)* mendorong permintaan yang besar terkait ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Hal ini mempengaruhi pola konsumsi dan pola perekonomian masyarakat dan bisnis secara umum. Berikutnya, beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan terkait proporsi demografi masyarakat Indonesia yaitu meningkatnya dominasi generasi milenial dan Gen Z yang terkenal memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan generasi sebelumnya. Karakter ini mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan mendapatkan informasi, gaya hidup, pola investasi dan pola belanjanya. Saat ini, gaya hidup halal berkembang seiring dengan gaya hidup sehat, pembelanjaan dan perilaku sadar (*conscious and mindful*) yang menghindari konsumerisme yang dijadikan rujukan oleh generasi muda. Hal ini merupakan peluang besar untuk menanamkan *halal lifestyle* sebagai gaya hidup yang mengarah kepada tata kehidupan lebih baik dan inklusif, tidak terbatas pada pemeluk agama Islam. Keuangan sosial syariah menjadi tren utama secara global, namun tantangan besar ada pada literasi keuangan syariah dan keuangan sosial syariah di dalam negeri yang masih cukup rendah.

Pada aspek terakhir dari perspektif teknologi, terjadi digitalisasi keuangan dan keuangan sosial syariah secara global. Sementara di tingkat domestik, terdapat dominasi dan konsumsi informasi digital yang cukup tinggi melalui kanal digital maupun sosial media. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan adalah fokus pada edukasi dan peningkatan literasi ekonomi syariah melalui media digital.

Meluasnya adopsi teknologi digital dalam transaksi ekonomi dan keuangan serta akselerasi transformasi digital sektor keuangan dapat meningkatkan akses dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.





# Analisis Gap

Analisis *gap* dalam konteks peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah mengacu pada proses identifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan tujuan yang diinginkan terkait pemahaman dan partisipasi dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Langkah pertama adalah menentukan tujuan akhir yang ideal yang ingin dicapai bersama melalui Strategi Nasional. Tujuan ideal yang ingin dicapai antara lain terkait aspek kontribusi keuangan syariah dan keuangan sosial syariah dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi, sosial, stabilitas perekonomian dan tata kelola. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat memiliki literasi yang tinggi terhadap keuangan syariah dan keuangan sosial syariah. Langkah kedua adalah evaluasi situasi saat ini terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Ini termasuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan penggunaan produk keuangan syariah saat ini, serta hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami atau menggunakan produk tersebut.

Untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut, yaitu kesenjangan dalam pengetahuan, kesenjangan dalam akses, atau kesenjangan dalam minat atau persepsi terhadap keuangan syariah dan keuangan sosial syariah diperlukan pemilihan strategi dan intervensi. Intervensi tersebut diwujudkan dalam strategi utama dan strategi pendukung. Ketiga strategi utama mencakup aspek inovasi, regulasi, dan edukasi, yang di dalam Strategi Nasional diwujudkan dalam Strategi Peningkatan Literasi, Inklusi, dan Infrastruktur Pendukung, sebagaimana terdapat pada Gambar 12.



Gambar 12 Analisis Gap

Potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat besar, sehingga masih banyak ruang di sektor tersebut yang dapat terus dioptimalkan. Namun salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya preferensi produk dan jasa keuangan syariah dan penerapan *halal lifestyle* di kalangan masyarakat Indonesia. Preferensi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah perlu didorong agar ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat. Saat ini masyarakat belum menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai preferensi utama. Hal ini ditunjukkan dengan indeks literasi ekonomi syariah yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia tahun 2023, indeks literasi ekonomi syariah sebesar 28,01%. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 23,3%.

Literasi ekonomi syariah merupakan pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*economic & financial knowledge*) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama.

---

Dengan meningkatnya literasi ekonomi syariah, diharapkan terdapat peningkatan preferensi dari masyarakat dalam rangka mengarusutamakan (*mainstreaming*) ekonomi dan keuangan syariah.

---



## Visioning SNLIEKSI

Secara periodik Indonesia telah merancang berbagai strategi untuk mencapai target literasi dan inklusi oleh berbagai lembaga antara lain sebagai berikut.

1. Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan Executive Summary Penyusunan MEKSI 2025-2029 (KNEKS,2024)
2. Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi (SINALEKSI)
3. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025
4. Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia (SNLKSI)
5. Rancangan Akhir Indonesia Emas 2045
6. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (Bappenas, 2023)

Untuk memperkuat lembaga inklusi keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan kemudian diterbitkan kembali Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang SNKI. SNKI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka mengelola keuangan mereka sendiri.

Dalam mendukung pelaksanaan SNKI ditopang oleh 5 (lima) pilar yakni, edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan sektor pemerintah serta perlindungan konsumen.

Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai angka keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024. Akan tetapi, peningkatan inklusi ini dapat meningkatkan risiko dalam industri keuangan seiring dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal. Kemudahan ini berpotensi menimbulkan utang berlebih (*overindebtedness*) atau kondisi negatif lain yang tidak diharapkan karena kondisi masyarakat yang masih rentan. Salah satu penyebab hal tersebut adalah terbatasnya pengetahuan tentang produk keuangan. Oleh karena itu, pendekatan peningkatan keuangan inklusif dapat dimulai dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang barang dan jasa keuangan. Informasi penting tentang pasar keuangan formal, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko adalah hal-hal yang perlu dipahami masyarakat. Pendidikan keuangan mencakup (1) pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai produk dan jasa keuangan; (2) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan produk keuangan; dan (3) perlindungan konsumen.



### Pendidikan Keuangan Mencakup:

Pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai produk dan jasa keuangan

Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan produk keuangan

Perlindungan konsumen

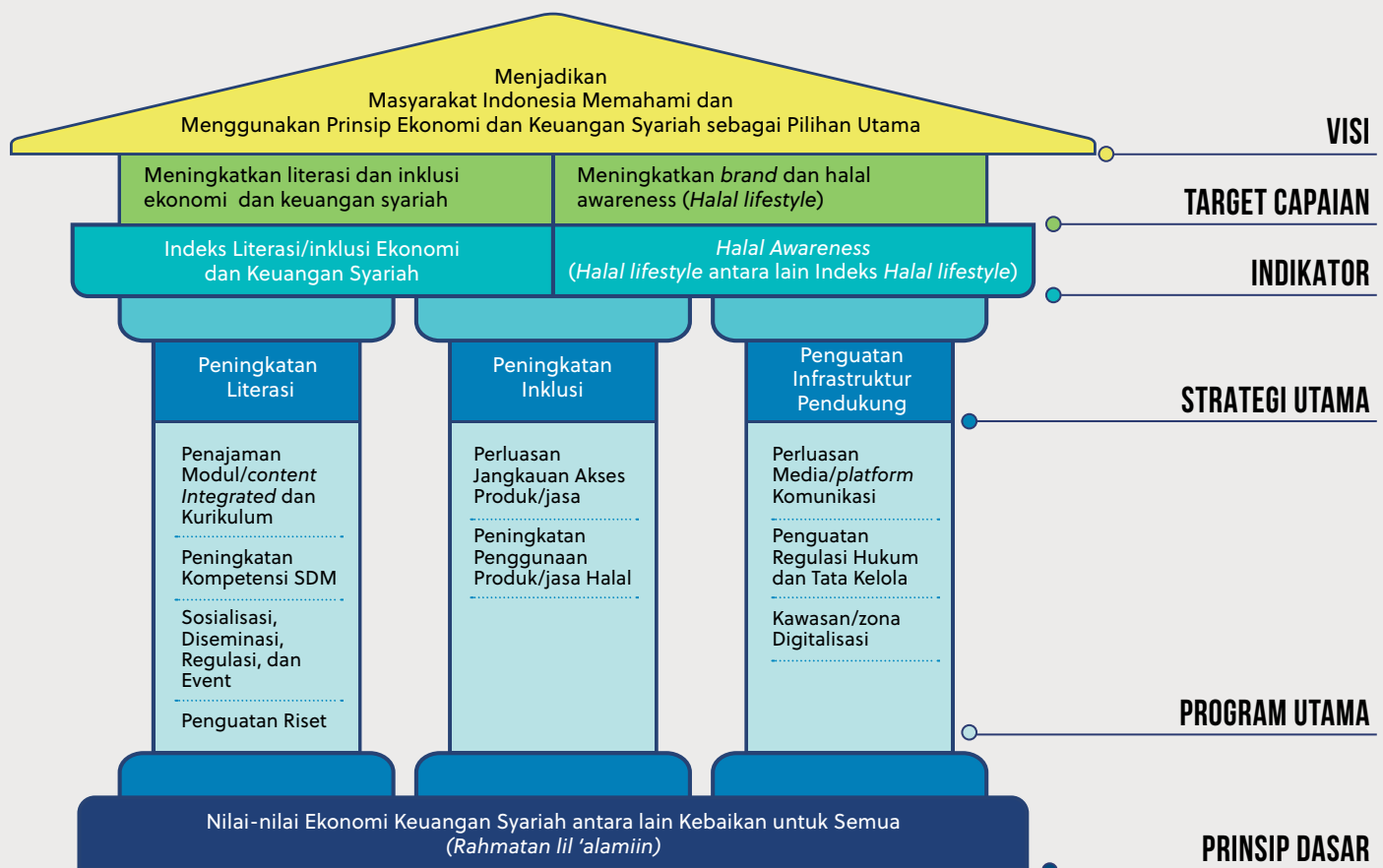


## A. VISI (VISION)

Penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia ditujukan dengan visi sebagai berikut:

**“Menjadikan masyarakat Indonesia memahami dan menggunakan prinsip ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilihan utama”**

Lebih lanjut, di dalam kerangka strategi literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang yang diinginkan atau diharapkan untuk dicapai. Hal ini merupakan pernyataan tentang masa depan yang diinginkan, yang memberikan arah dan tujuan bagi langkah-langkah dan keputusan saat ini. Visi seringkali mencerminkan aspirasi, nilai-nilai, dan tujuan yang mendasari identitas atau misi suatu entitas. Hal ini juga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan demikian, visi tidak hanya memberikan fokus yang jelas, tetapi juga memotivasi tindakan dan inovasi yang dapat membawa perubahan positif dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu visi dirancangannya Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia adalah menjadikan masyarakat Indonesia memahami dan menggunakan prinsip ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilihan utama. Gambar 13 menunjukkan *Visioning* dan Pilar Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.



Gambar 13 Visioning dan Pilar Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

## B. MISI (*MISSIONS*)

Visi yang telah ditetapkan kemudian dicapai melalui langkah-langkah pelaksanaan misi yang dapat membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia, dengan memfasilitasi sinergi antara penawaran dan permintaan serta memperkuat infrastruktur pendukung yang diperlukan, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 halaman 8.

**Adapun pelaksanaan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut.**

Meningkatkan literasi masyarakat Indonesia terkait pemahaman terhadap ekosistem ekonomi syariah yang meliputi produk dan jasa keuangan syariah serta implementasi *halal lifestyle*.

Meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas jangkauan produk dan jasa keuangan syariah dan meningkatkan utilisasi produk dan jasa halal.

Memperkuat infrastruktur pendukung melalui perluasan *platform* komunikasi, penguatan regulasi hukum dan tata kelola, digitalisasi, dan persepsi positif.

Pelaksanaan misi di atas dilakukan melalui koordinasi berbagai program dan materi komunikasi secara terkoordinasi yang difasilitasi infrastruktur pendukung terutama platform aplikasi yang dapat meningkatkan komunikasi antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasi KNEKS.



# 1.5.

## PRINSIP DASAR LITERASI SERTA INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

---

Subbab ini akan menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah. Dengan memahami konsep-konsep literasi keuangan dari perspektif internasional dan nasional, serta mempelajari strategi-strategi yang telah diterapkan sebelumnya, kita dapat membentuk dasar yang kokoh untuk mengembangkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

---



# Konsep Literasi Keuangan secara Internasional - OECD

Pada tahun 2010, OECD mengembangkan dan menyebarkan kuesioner survei yang dirancang untuk mengukur dan menciptakan ukuran literasi keuangan internasional. Inti dari kuesioner ini mencakup beberapa aspek yang berfokus pada serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat. Secara spesifik, terdapat tiga pilar inti yang digunakan sebagai survei. Yang pertama, yaitu pengetahuan keuangan. Seseorang yang terliterasi secara keuangan, mempunyai pengetahuan dasar mengenai konsep keuangan. Kedua, sikap keuangan. Cara seseorang berperilaku akan berdampak signifikan pada kesejahteraan finansial mereka. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu yang penting dalam mengukur literasi keuangan. Beberapa pertanyaan mengenai indikator ini membahas berbagai perilaku, seperti berpikir sebelum melakukan pembelian, membayar tagihan tepat waktu dan membuat anggaran, serta menabung dan meminjam untuk memenuhi kebutuhan.

Tabel 5 Matriks OECD terhadap Literasi Ekonomi Syariah

		Elemen Survei Literasi Keuangan Internasional (OECD)			
		Pengetahuan Keuangan	Perilaku Keuangan	Sikap Keuangan	
<b>Relevansi indikator literasi oleh OECD dapat dilihat melalui tabel berikut.</b> Keterangan: NR: Not Related, Y: Related	<b>Elemen Strategi Indeks Literasi Ekonomi Syariah</b>	Istilah-istilah Ekonomi Syariah	NR	NR	NR
		Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah	NR	NR	NR
		Produk dan Jasa Halal	NR	NR	NR
		Pengelolaan Keuangan Secara Syariah	NR	NR	NR
		Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah	NR	NR	Y
		Sikap terhadap Masa Depan	Y	Y	Y

Seseorang dapat dikatakan memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, apabila memiliki pemahaman dasar keuangan yang baik. Oleh karena itu, dalam rangka mengukur pemahaman masyarakat, OECD menggunakan 8 parameter pertanyaan seputar *time-value of money*, perhitungan bunga, risiko dan tingkat pengembalian (*return*), inflasi, serta diversifikasi aset. Selanjutnya, dalam hal perilaku keuangan, OECD menyatakan bahwa perilaku seorang individu dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan finansial. Untuk mengukur hal ini, OECD menggunakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keputusan masyarakat dalam menggunakan uangnya, baik untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk maupun menabung. Lebih lanjut, OECD juga menetapkan parameter yang dapat mengukur perilaku dan preferensi masyarakat didalam surveinya, yaitu sikap masyarakat dalam mengelola penghasilan.

# Konsep Literasi Keuangan secara Internasional – World Bank

Lebih lanjut, untuk mengetahui tingkat penggunaan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan di suatu negara, World Bank menggunakan beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

Ketersediaan layanan keuangan, seperti halnya sistem pembayaran yang mumpuni; kualitas produk tabungan; dan pinjaman perbankan merupakan elemen yang krusial untuk menunjang tingkat inklusi keuangan suatu negara.

Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di berbagai negara, *World Bank* melakukan survei dengan mengukur preferensi masyarakat terkait perilaku belanja, yang memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai inklusi keuangan. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis tiga pilar utama, yaitu akses keuangan; tingkat penggunaan jasa keuangan; dan kesejahteraan finansial.

Dalam rangka mengukur kualitas akses keuangan yang ada pada suatu negara, *World Bank* juga menetapkan tingkat kepemilikan akun bank dan tabungan, serta lingkungan/ infrastruktur yang mendukung sebagai indikator yang relevan.

1. Tingkat penggunaan masyarakat terhadap pembayaran digital, tabungan dan pembiayaan
2. Kondisi ekosistem keuangan
3. Kesempatan dalam pengembangan kegunaan akun
4. Kesempatan untuk meningkatkan tingkat kepemilikan akun bank melalui pembayaran digital.

Tabel 6 Matriks World Bank terhadap Literasi Ekonomi Syariah

		Elemen Survei Literasi Keuangan Internasional (World Bank)			
		Kepemilikan Akun Bank	Penggunaan Produk/jasa Keuangan	Kesejahteraan Finansial	
Matriks World Bank terhadap Literasi Ekonomi Syariah Dapat Dilihat pada Tabel Berikut.  Keterangan: NR: Not Related, Y: Related	Elemen Strategi Indeks Literasi Ekonomi Syariah	Istilah-istilah Ekonomi Syariah	NR	NR	NR
		Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah	NR	NR	NR
		Produk dan Jasa Halal	NR	NR	NR
		Pengelolaan Keuangan Secara Syariah	NR	NR	NR
		Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah	NR	NR	Y
		Sikap Terhadap Masa Depan	NR	NR	Y

# Konsep Literasi Keuangan Nasional

Pada subbab ini, akan dibahas dua strategi utama yang diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

1. **Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)** berfokus pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu.
2. **Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)** bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki Indeks literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Kedua strategi ini berperan penting dalam memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan ekonomi dan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

## A. STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF (SNKI)

SNKI merupakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bersama 27 Kementerian Lembaga dibawah naungan Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana yang diamanahkan dalam Permenko No 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI. Strategi ini bertujuan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu.

Tabel 7 Matriks SNKI terhadap Literasi Ekonomi Syariah

		Elemen Survei Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)			
		Akses	Penggunaan	Kualitas Produk	
<b>Relevansi SNKI terhadap Literasi Ekonomi Syariah ditunjukkan pada Tabel 7 berikut.</b> Keterangan: NR: Not Related, Y: Related	<b>Elemen Strategi Indeks Literasi Ekonomi Syariah</b>	Istilah-istilah Ekonomi Syariah	Y	NR	Y
		Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah	Y	NR	Y
		Produk dan Jasa Halal	Y	Y	Y
		Pengelolaan Keuangan Secara Syariah	Y	NR	Y
		Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah	Y	Y	Y
		Sikap terhadap Masa Depan	Y	Y	Y

Berdasarkan analisis pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator survei pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) relevan dengan Indeks Literasi Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator survei yang mengukur jumlah nasabah terhadap produk/jasa keuangan syariah, seperti KUR syariah, nasabah Bank Wakaf Mikro, dan nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil*.



## B. STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA (SNLKI)

SNLKI atau Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia merupakan sebuah kajian strategi yang disusun oleh OJK.

Tujuan dari penyusunan strategi ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (*Well Literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.

Tabel 8 Matriks SNLKI terhadap Literasi Ekonomi Syariah

**Relevansi SNLKI terhadap Literasi Ekonomi Syariah ditunjukkan pada Tabel 8 berikut**

Keterangan:  
NR: Not Related,  
Y: Related

		Elemen Survei Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)		
		Kecakapan Keuangan	Sikap & Perilaku Keuangan Bijak	Akses Keuangan
Elemen Strategi Indeks Literasi Ekonomi Syariah	Istilah-istilah Ekonomi Syariah	Y	Y	Y
	Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah	NR	NR	NR
	Produk dan Jasa Halal	Y	Y	Y
	Pengelolaan Keuangan syariah	NR	NR	Y
	Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah	Y	NR	NR
	Sikap terhadap Masa Depan	Y		Y

Secara garis besar, relevansi Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia dengan indeks literasi ekonomi syariah terletak pada beberapa hasil survei yang menunjukkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan secara syariah, sektor-sektor jasa keuangan syariah, serta pengetahuan dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.



# Konsep Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pada subbab ini, kita akan membahas indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Indikator literasi ekonomi syariah akan menguraikan berbagai aspek yang digunakan untuk menilai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam masyarakat. Sementara itu, indikator literasi keuangan syariah nasional akan fokus pada pengukuran tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penggunaan masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Kedua indikator ini penting bagi implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.

## A. INDIKATOR LITERASI EKONOMI SYARIAH

Literasi ekonomi syariah yaitu pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*Economic & Financial knowledge*) menurut aturan Islam (*syariah*), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama.



Bank Indonesia melaksanakan survei literasi ekonomi syariah secara nasional setiap tiga tahun.

**ASPEK YANG DIUKUR DALAM INDEKS LITERASI EKONOMI SYARIAH TERDIRI DARI:**

01. Istilah-istilah Ekonomi Syariah

---

02. Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah

---

03. Produk dan Jasa Halal;

---

04. Pengelolaan Keuangan Secara Syariah;

---

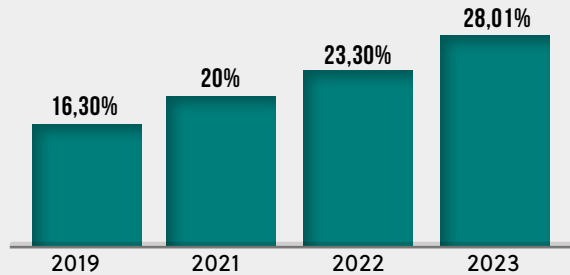
05. Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah;

---

06. Sikap terhadap Masa Depan.

## INDEKS LITERASI EKONOMI SYARIAH 2019-2023 (WELL LITERATE)

■ Indeks Literasi Ekonomi Syariah 2019-2023



Gambar 14 Indeks Literasi Ekonomi Syariah 2019 - 2023 (Well literate)  
Sumber: Bank Indonesia (2023)

Berdasarkan survei literasi ekonomi syariah yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2023, secara umum terdapat peningkatan tingkat literasi ekonomi syariah pada kelompok *well literate*. Artinya, secara umum terdapat lebih banyak kelompok masyarakat yang melek dengan ekonomi syariah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019.

01 Pada aspek pertama yaitu istilah-istilah ekonomi syariah,

# 64,4%

masyarakat memahami istilah ekonomi syariah sebagai sistem yang sesuai dengan syariah Islam/agama yang mengandung nilai-nilai dalam pengelolaan ekonomi dan tidak mengandung riba.

02



Pada aspek kedua yaitu lembaga keuangan/dana sosial syariah,

diketahui dalam dua tahun terakhir hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mengeluarkan dana sosial berupa zakat fitrah dan shodaqoh. Penyaluran dana sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh disalurkan langsung ke penerima kecuali wakaf yang sebagian besar disalurkan lewat lembaga.

Darimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah komersial

## 40,4%

Dari lembaga perbankan

## 56,1%

Dari teman/saudara/pasangan

Dalam hal penggunaan lembaga jasa keuangan komersial

24,3% masyarakat muslim Indonesia menggunakan bank syariah

## 66,7%

masyarakat muslim Indonesia sudah menggunakan bank konvensional

Gambar 15 Darimana Masyarakat Mengenal Lembaga Keuangan Syariah Komersial

Gambar 16 Dalam Hal Penggunaan Lembaga Jasa Keuangan Komersial



### 03 Pada aspek ketiga yaitu produk dan jasa halal

Masyarakat muslim Indonesia mengartikan produk makanan/minuman halal apabila kandungan bahan baku menggunakan bahan yang halal serta ada logo halal.

Sementara itu, layanan/jasa diartikan halal jika sistem pengelolaannya sesuai dengan syariah.

69%

masyarakat meyakini produk/jasa menjadi halal dari adanya logo halal atau jumlah masyarakat muslim yang menggunakan.

Sementara, hal yang membuat kurang/tidak yakin adalah bahan bakunya tidak halal dan apabila media/hiburan mengandung konten mengandung pornografi.



Dalam konteks *willingness to pay*, aspek yang dianggap paling penting dalam membeli produk pangan/bahan pangan adalah harga, baru kemudian tercantumnya logo halal pada kemasan.

### 04 Pada aspek keempat yaitu pengelolaan keuangan secara syariah

81%

8 dari 10 masyarakat muslim Indonesia melakukan pengelolaan uang dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

24%

Di sisi lain, masih terdapat 1 dari 4 ( $\pm 24\%$ ) masyarakat muslim Indonesia relatif *"impulsive"* dalam melakukan pembelian barang yang bukan kebutuhan pokok.

### 05 Pada aspek kelima yaitu kemampuan numerik ekonomi syariah

Aspek ini diukur dengan pemahaman terhadap perhitungan pembagian dan besaran besaran zakat fitrah dan diketahui sudah sangat baik. Sedangkan perhitungan terkait zakat mal relatif masih banyak belum dipahami.

### 06 Pada aspek keenam yaitu sikap terhadap masa depan

Lebih dari 70% responden setuju dan sangat setuju dalam bekerja keras untuk menjadi yang terbaik dalam menyikapi masa depan. Hal ini mengindikasikan sikap positif mayoritas responden terhadap masa depan.

## B. INDIKATOR LITERASI KEUANGAN SYARIAH NASIONAL

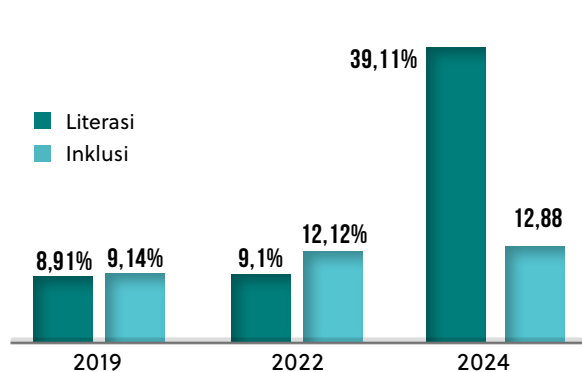
**Literasi keuangan** adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

**Literasi keuangan syariah** diartikan sebagai seseorang yang memiliki kesadaran; pengetahuan; keterampilan; sikap; dan perilaku sesuai dengan prinsip syariah untuk mengelola; menginvestasi; dan mengatur keuangannya secara bijak dan sesuai kebutuhan demi keberlangsungan hidupnya, serta mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

**Inklusi Keuangan** didefinisikan sebagai kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Inklusi keuangan syariah** sebagai Individu yang memiliki akses ke produk layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia diukur dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,91% di tahun 2019 menjadi 9,10% di tahun 2022. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah menunjukkan peningkatan menjadi 12,12% di tahun 2022 dari sebelumnya 9,14% pada periode survei tahun 2019. Artinya, secara umum terdapat peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dalam periode tersebut.



Pada tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah meningkat secara signifikan menjadi 39,11%, menunjukkan kemajuan yang pesat dibandingkan dengan data sebelumnya. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 12,88% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan positif yang terus berlanjut dalam literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia

Gambar 17 Perbandingan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah  
Sumber: OJK (2023, 2024)

# Strategi Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Terdahulu

Indonesia memiliki berbagai strategi literasi/inklusi keuangan dan ekonomi yang sudah berjalan. Berbagai keterkaitan antar strategi dapat dilihat melalui substansi pertanyaan dan hasil survei pada masing-masing strategi. Lebih lanjut, penjabaran mengenai strategi beserta elemen-elemen pilarnya dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9 Matriks Summary Framework Literasi dan Inklusi di Indonesia serta *International Benchmarking*

Strategi	Objektif	Elemen	Tools	Program/output	Monitoring & Evaluation
<i>Framework literasi keuangan internasional (OECD)</i>	Menciptakan ukuran literasi keuangan yang internasional, berbasis luas dan kuat serta indikator inklusi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan keuangan</li> <li>2. Perilaku keuangan</li> <li>3. Sikap keuangan</li> </ol>	Survei kuesioner	Pedoman/ <i>framework</i> pengukuran inklusi keuangan	<i>Evaluation of National Strategies Financial Literacy Report</i>
<i>Framework inklusi keuangan internasional (World Bank)</i>	Menciptakan ukuran inklusi keuangan yang internasional, berbasis luas dan kuat serta indikator inklusi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan akun bank</li> <li>2. Tingkat penggunaan produk/jasa keuangan</li> <li>3. Kesejahteraan keuangan</li> </ol>	Survei	Pedoman/ <i>framework</i> pengukuran inklusi keuangan	
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	Mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses layanan keuangan</li> <li>2. Tingkat penggunaan layanan keuangan</li> <li>3. Kualitas produk dan layanan keuangan</li> </ol>	Survei keuangan inklusif	Pedoman penetapan kebijakan Kementerian dan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Data Management Integration System</i></li> <li>• Peta akses layanan keuangan</li> <li>• Laporan Pelaksanaan SNKI</li> </ul>



(Lanjutan)

Tabel 9 Matriks Summary Framework Literasi dan Inklusi di Indonesia serta International Benchmarking

Strategi	Objektif	Elemen	Tools	Program/ output	Monitoring & Evaluation
Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan (SINALEKSI)	Mengembangkan materi edukasi dengan <i>output</i> berupa cetak biru atau laporan hasil studi SINALEKSI yang ditujukan untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah	Pengetahuan mengenai manajemen harta secara Islam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Survei</li><li>• Interview</li><li>• FGD</li></ul>	<i>Blueprint</i> dan laporan hasil studi SINALEKSI	
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi ( <i>well literate</i> ) sehingga dapat memanfaatkan produk layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecakapan keuangan</li><li>2. Sikap dan perilaku keuangan bijak</li><li>3. Akses keuangan</li></ol>	Survei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan</li><li>• <i>Roadmap</i> Program Strategis SNLKI 2021-2025</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Learning Management Sistem</i></li><li>• <i>Database</i> Nasional Materi Literasi Keuangan</li></ul>
Strategi Indeks Literasi Ekonomi Syariah	Sebagai instrumen evaluasi terhadap strategi-strategi yang telah diimplementasikan oleh Bank Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekonomi syariah</li><li>2. Lembaga keuangan/dana sosial syariah</li><li>3. Produk dan jasa halal</li><li>4. Pengelolaan keuangan secara syariah</li><li>5. Kemampuan numerik ekonomi syariah</li><li>6. Sikap terhadap masa depan</li></ol>	Survei	Indeks Literasi Ekonomi Syariah	<i>Dashboard</i> indeks literasi ekonomi syariah
Strategi Nasional Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Membangun preferensi masyarakat yang utuh mengenai ekonomi dan keuangan syariah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Literasi</li><li>2. Inklusi</li><li>3. Infrastruktur pendukung</li></ol>	Survei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Literasi Ekonomi dan Keuangan syariah</li><li>• Pedoman penetapan kebijakan K/L</li><li>• Pedoman preferensi masyarakat</li></ul>	<i>Dashboard</i> Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Selain berbagai strategi literasi/inklusi keuangan dan ekonomi yang telah dijabarkan pada Tabel 9, KNEKS juga telah menyusun SINALEKSI atau Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan materi edukasi dengan *output* berupa cetak biru atau laporan hasil studi SINALEKSI untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Relevansi dari elemen survei SINALEKSI dengan indeks literasi ekonomi syariah dijabarkan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10 Elemen Survei SINALEKSI dan Indeks Literasi Ekonomi Syariah

Elemen Survei Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia (SINALEKSI)

		Kemampuan Manajemen Harta Secara Islami
Elemen Strategi Indeks Literasi Ekonomi Syariah	Istilah-istilah Ekonomi Syariah	NR
	Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah	NR
	Produk dan Jasa Halal	Y
	Pengelolaan Keuangan Secara Syariah	NR
	Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah	NR
	Sikap terhadap Masa Depan	Y

Keterangan:  
NR: Not Related,  
Y: Related

Secara garis besar, relevansi survei Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia (SINALEKSI) dengan Indeks Literasi Ekonomi Syariah terletak pada indikator survei yang mengukur pemahaman masyarakat terhadap manajemen kekayaan secara islam.

Beberapa contoh pertanyaan yang relevan diantaranya adalah pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan halal, kebiasaan menabung, pengeluaran ZISWAF, penggunaan LKS, dan instrumen ZISWAF, serta perhitungan mengenai pembagian harta waris.



# 1.6.

## TUJUAN PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA (SNLIEKSI)

---

Tujuan Penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) adalah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan, melalui berbagai inisiatif yang menyentuh aspek pemahaman, akses, dan inovasi keuangan syariah.

---

Pertama, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai prinsip, produk, dan layanan keuangan serta ekonomi syariah. Pemahaman yang mendalam ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan edukasi yang efektif dan komprehensif mengenai ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

Selanjutnya, strategi ini berfokus pada perluasan akses keuangan syariah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, kesenjangan akses keuangan dapat diminimalisir, dan menciptakan inklusi keuangan yang lebih merata dan adil. Hal ini juga akan memperkuat kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, mendukung pertumbuhan sektor industri halal, infrastruktur, dan pemberdayaan komunitas.

Strategi ini juga bertujuan untuk mendorong stabilitas keuangan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang sehat, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dengan demikian, risiko keuangan dapat dikurangi, menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan terpercaya. Di samping itu, pengembangan sumber daya manusia berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi fokus utama, melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan yang relevan. Ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja di sektor ini memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan layanan keuangan syariah secara profesional.



Inovasi juga menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ini. Mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan memastikan bahwa sektor ini terus berkembang dan mampu bersaing di pasar global.

Peningkatan kepercayaan dan kepatuhan terhadap lembaga keuangan syariah juga merupakan tujuan penting, dengan memastikan transparansi dan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan standar syariah.

Selain itu, strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur syariah dalam kehidupan ekonomi dan keuangan sehari-hari masyarakat Indonesia, mendukung penerapan nilai-nilai universal syariah yang dapat memperkuat tatanan sosial dan ekonomi bangsa. SNLIEKSI juga berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

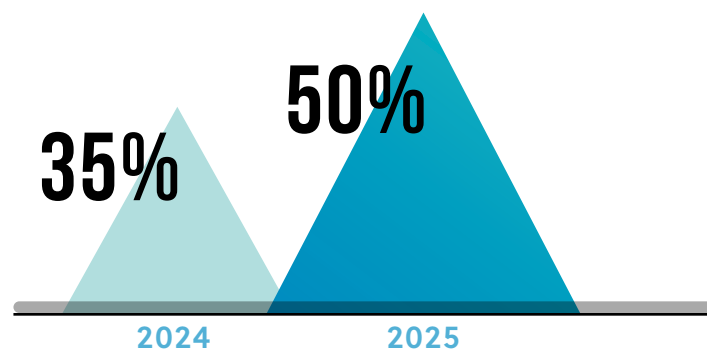
Memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui dukungan *human capital*, teknologi digital, *branding*, dan perlindungan konsumen adalah tujuan yang tidak kalah penting. Hal ini akan memastikan sinergi antara sisi *supply* dan *demand*, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika perekonomian global dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Pada akhirnya, implementasi strategi ini menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antara Kementerian, Lembaga, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyediakan edukasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian tujuan. Disamping itu, inisiatif untuk mempromosikan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam prinsip-prinsip syariah sebagai pilihan utama dalam kegiatan ekonomi dan keuangan akan diperkuat dengan kampanye dan program yang terstruktur.

Target tinggi yang ditetapkan yaitu mencapai indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah sebesar 35% pada tahun 2024 dan 50% pada tahun 2025. Target ini mengacu pada arahan Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS pada rapat pleno KNEKS tanggal 20 Desember 2022. Beliau memandang bahwa pemahaman masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan, dimana pada saat itu indeks literasi ekonomi syariah telah mencapai 23.01%. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan syariah serta tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Atas target yang diberikan tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat suatu strategi nasional yang akan menyatukan setiap program kerja dari setiap anggota KNEKS guna bisa meningkatkan indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia.

## TARGET CAPAIAN INDEKS LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Gambar 18 Target Capaian Indeks Literasi Ekonomi & Keuangan syariah

Dengan demikian, SNLIEKSI diharapkan dapat menjadi *“Platform komunikasi yang efektif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi nasional.”*

# 1.7.

## RUANG LINGKUP STRATEGI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

---

Strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah memiliki ruang lingkup sebagai berikut.

---

**1.7.1.**  
*Global  
Positioning*

---

**1.7.2.**  
*Positioning terhadap  
Strategi Nasional  
Literasi yang Lain*

---

**1.7.3.**  
*Cakupan  
Operasionalisasi  
Strategi*

---

## ***Global Positioning***

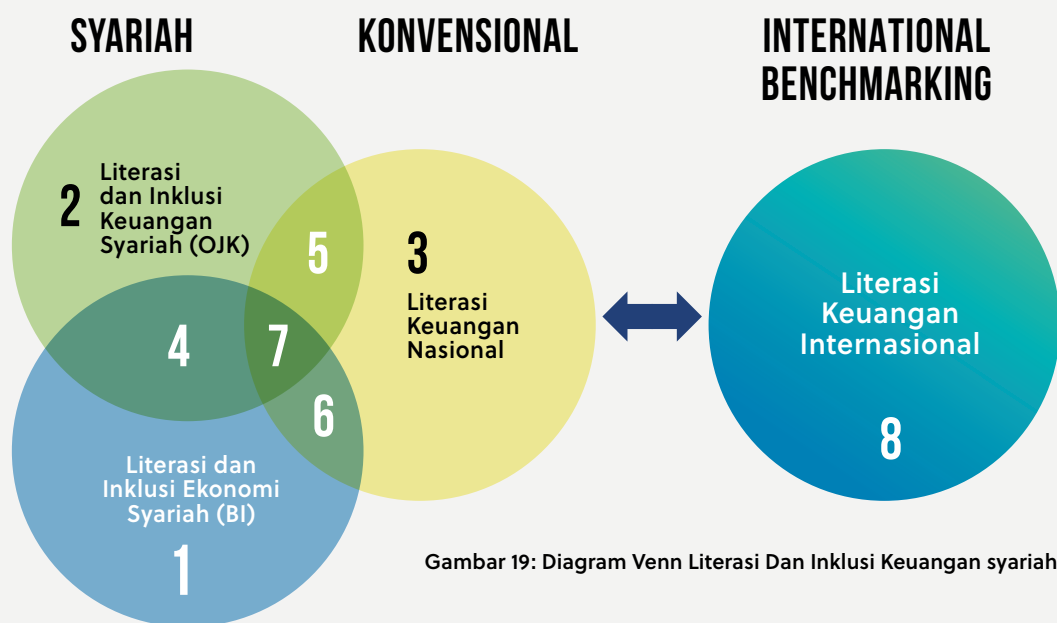
SNLIEKSI ini diposisikan memiliki peran yang krusial dalam strategi nasional Indonesia. Strategi nasional ini diposisikan dengan jelas sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa dan terintegrasi dengan baik dengan strategi nasional lainnya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Selain itu, strategi nasional ini juga merupakan langkah penting dalam mencapai visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, melalui peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.





# Positioning terhadap Strategi Nasional Literasi yang Lain

Berdasarkan usulan pilar strategi literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada (1) **Peningkatan Literasi**; (2) **Peningkatan Inklusi**; (3) **Penguatan Infrastruktur Pendukung**, maka terdapat beberapa ruang lingkup terkait yang harus diselaraskan antara satu lembaga dengan lembaga lain, yang memiliki irisan kesamaan *output* pekerjaan yang dapat dikolaborasikan. Perhitungan indeks literasi ekonomi, inklusi dan keuangan syariah setidaknya memiliki keterkaitan antara 2 survei indeks syariah yang telah dilakukan oleh BI dan OJK dan 1 survei indeks inklusivitas keuangan konvensional yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. Untuk menciptakan satu strategi nasional yang komprehensif, seluruh indeks tersebut harus memiliki kesamaan arah pengukuran yang dapat dicapai dengan melakukan pemetaan pada Diagram Venn di bawah.

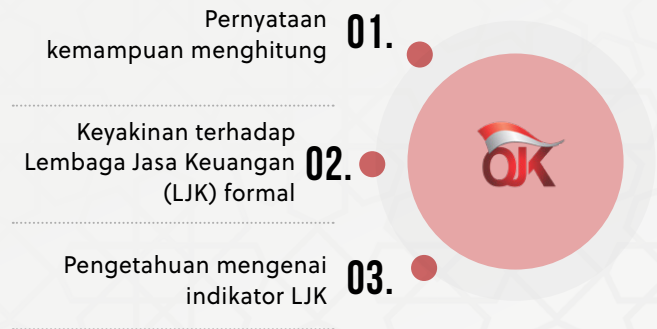


Gambar 19: Diagram Venn Literasi Dan Inklusi Keuangan syariah

Berdasarkan Diagram Venn pada Gambar 19 di atas, berikut delapan area literasi dan inklusi keuangan syariah:

1. Fokus terhadap perkembangan ekonomi syariah antara lain *Halal Value Chain* (HVC), keuangan sosial syariah, dan literasi *halal lifestyle*.
2. Menitikberatkan pada akses terhadap produk dan jasa keuangan syariah, termasuk bagaimana pengelolaannya.
3. Menargetkan inklusivitas keuangan antara lain melalui *digital financial inclusion*, akses keuangan dan pengelolaannya.
4. Fokus terhadap *interlinkage* sektor usaha dengan keuangan syariah serta integrasi keuangan komersial dan sosial syariah.
5. Strategi mendorong inklusivitas keuangan dan *financial outreach* melalui produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia.
6. Ekonomi syariah menjadi bagian dari strategi keuangan nasional untuk meningkatkan inklusivitas.
7. Titik optimal yang menjadi sasaran utama Stranas.
8. *Benchmarking* terhadap standar internasional.

Berdasarkan perbandingan antara Survei Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah yang dilakukan BI dengan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang dilakukan OJK, terdapat beberapa irisan ruang lingkup sebagai berikut.



Kedua survei tersebut, jika dipetakan lebih dalam juga memiliki irisan pendalaman yang searah dengan survei literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian pada beberapa indikator yaitu sebagai berikut.

**01.** Pengetahuan masyarakat dan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah

**02.** Pengetahuan masyarakat terhadap indikator perhitungan keuangan (numerik) baik konvensional dan syariah

Memperhatikan irisan di antara seluruh survei yang dilakukan oleh BI, OJK dan Kemenko Perekonomian, maka perumusan survei literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah perlu memperhatikan ruang lingkup yang komprehensif yang setidaknya mencakup:

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap ragam kewajiban pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dapat ditopang oleh layanan keuangan syariah yang tersedia saat ini.
- b. *Interlinkage* sektor keuangan komersial dan sosial syariah yang dapat mendorong ukuran aktivitas perekonomian syariah
- c. Keterkaitan pengembangan ekonomi syariah dengan keuangan syariah yang ditopang oleh pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah.
- d. Aspek digitalisasi yang dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah yang dapat dikaitkan dengan produk digital keuangan syariah.
- e. Pemanfaatan indikator survei internasional lainnya yang juga dapat dimanfaatkan untuk memperkaya ruang lingkup perumusan survei indeks literasi dan inklusi keuangan syariah.

# Cakupan Operasionalisasi Strategi

## **MONITORING**

*Monitoring* dapat dilakukan melalui *big data analytics*, *Dashboard*, dan survei untuk memantau pencapaian indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia

## **PROGRAM DISEMINASI**

Diseminasi dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat terekspos terhadap materi sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

## **Cakupan Operasionalisasi Strategi**

## **REPOSITORY KNOWLEDGE**

Sebagai bentuk *knowledge management* terhadap literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Tahapan mengenai pengembangan sistem informasi sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi strategi nasional ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab 3.5.1 tentang Prinsip Penyusunan *Dashboard*.



Pada akhirnya,  
implementasi strategi ini  
menitikberatkan pada  
penguatan kolaborasi  
antara Kementerian,  
Lembaga, dan  
pemangku kepentingan  
untuk mempercepat  
peningkatan literasi dan  
inklusi ekonomi serta  
keuangan syariah.



2



# INDIKATOR & INTERKONEKSI SNLIEKSI

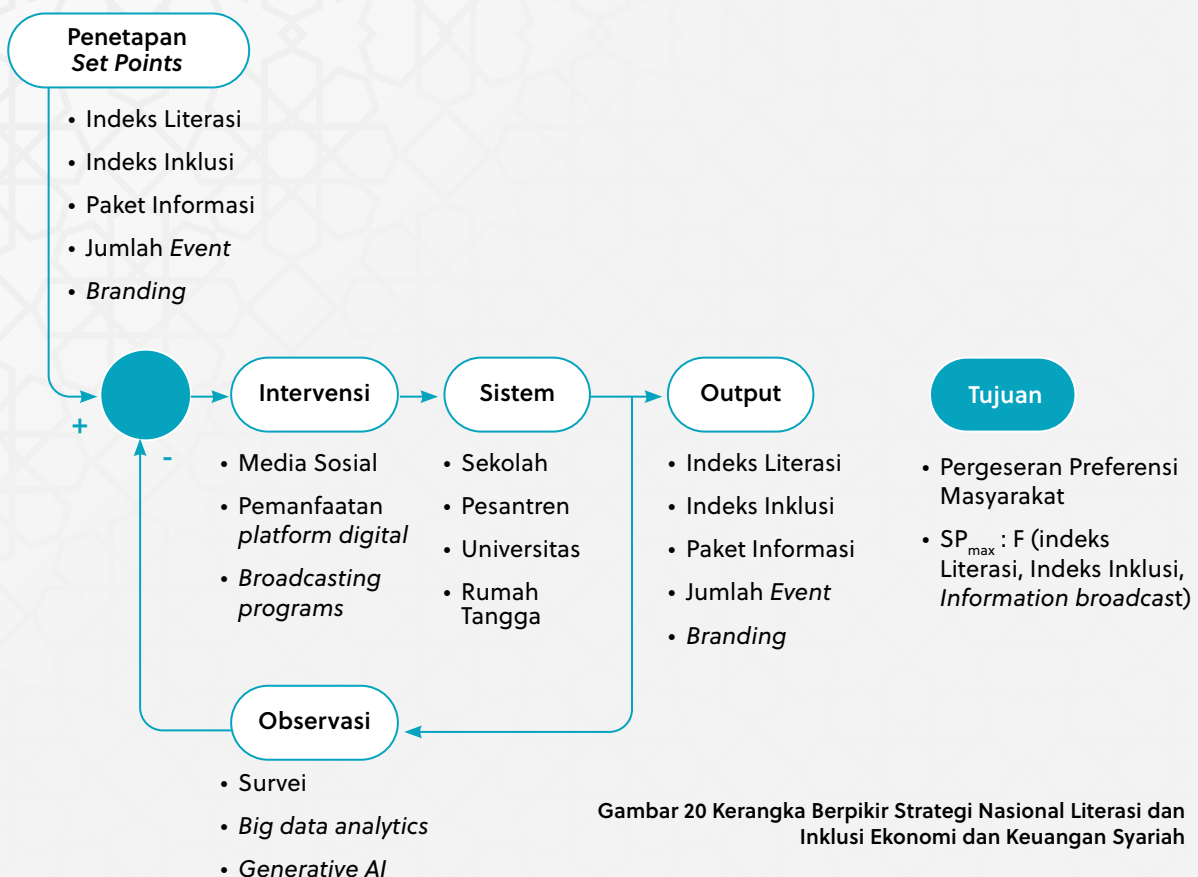
Bab ini akan membahas secara rinci mengenai target capaian, indikator, serta interkoneksi program dalam Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI).

Fokus utama adalah untuk menetapkan kerangka konseptual, mengidentifikasi target yang ingin dicapai, menentukan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan, serta menguraikan interkoneksi antara berbagai program yang ada.



# 2.1. KERANGKA KONSEPTUAL STRATEGI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Kerangka pengembangan konsep literasi ekonomi dan keuangan syariah disusun dalam suatu konsep *feedback loop* yang secara efektif mengaktifkan mekanisme monev dan intervensi kebijakan



Gambar 20 Kerangka Berpikir Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, diperlukan metodologi yang robust melalui pemanfaatan sistem informasi yang dapat menjangkau masyarakat yang luas. Metodologi robust merujuk pada pendekatan sistem dinamik yang dikembangkan oleh Jay W. Forrester pada tahun 1961, yang menggabungkan umpan balik dan simulasi komputer untuk memahami dan memodelkan perilaku sistem kompleks secara holistik dan dinamis.

## KEGIATAN UTAMA DARI SISTEM PENINGKATAN LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

### 1 SET POINTS

*Literacy index, inclusion index*, paket informasi, jumlah *events*, dan *branding* merupakan *set points anchor* dalam hal pencapaian literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Target-target tersebut ditentukan berdasarkan riset terapan yang dianggap dapat memberikan *impact* yang signifikan terhadap laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

### 2 SISTEM

Strategi literasi nasional ditujukan untuk proses transformasi preferensi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yaitu konsumen dan produsen. Dari sisi konsumen, kelompok masyarakat bisa dikelompokkan berdasarkan sektor industri. Begitu juga halnya dengan kelompok produsen yang bisa dikelompokkan berdasarkan sektor ekonomi dan skala produksinya.

### 3 PROSES OBSERVASI

Proses *monitoring* dilakukan pada berbagai level *output* dan *outcome*. *Output* program strategi literasi dapat dinyatakan dalam bentuk pencapaian pelaksanaan program di setiap kementerian dan lembaga yang relevan. Sementara *outcome* dari program literasi dapat dihasilkan dari tiga kegiatan *monitoring* utama yaitu: kegiatan survei, survei terbatas (*tracking*) yang dilakukan dengan resolusi waktu yang lebih sering (tahunan) serta pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan *proxy* terhadap preferensi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Untuk kepentingan tersebut, disusun sebuah *Dashboard monitoring* yang dapat dipantau oleh seluruh anggota kementerian dan lembaga terkait.

### 4 INTERVENSI

Intervensi terhadap deviasi hasil capaian dilakukan melalui penyusunan berbagai materi edukasi dan konten yang dapat disiarkan melalui media sosial secara *Below the Line* (BTL) ataupun materi pendidikan formal secara *Above the Line* (ATL) yang tersedia dalam sistem ekonomi syariah yaitu sekolah, universitas, pendidikan dan rumah tangga (RT) sekalipun.

### 5 RESEARCH

setiap elemen pelengkap di dalam strategi literasi ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan melalui berbagai kegiatan riset terapan yang memenuhi kaidah ilmiah.

### 6 FUNGSI OBJEKTIF

Dalam implementasi program literasi ini diasumsikan (yang didukung oleh berbagai riset terapan yang mendukung) efektivitas sistem ekonomi dan keuangan syariah akan meningkat dalam mendukung program pembangunan ekonomi nasional.

Target capaian mengacu pada tujuan khusus atau pencapaian yang diidentifikasi dan diinginkan untuk dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah sasaran konkret yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau visi yang lebih besar. Target capaian memberikan arah dan fokus bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan memiliki target capaian yang jelas dan terukur, akan memperjelas target yang dituju juga dapat diukur kemajuannya, diidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan, dan memotivasi diri untuk mencapai hasil yang diinginkan.

# 2.2.

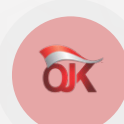
## INDIKATOR LITERASI SERTA INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Indikator adalah parameter atau tanda yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, atau menunjukkan kondisi, perkembangan, atau kinerja dalam suatu konteks tertentu. Mereka memberikan informasi yang spesifik dan terukur tentang apakah tujuan atau target telah tercapai, serta membantu dalam memonitor kemajuan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indikator berupa angka, data kuantitatif, atau kualitatif yang diukur secara objektif, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi atau fenomena yang sedang diamati. Indikator digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi.



Aspek yang diukur dalam Indeks Literasi Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu:

01. Istilah-istilah Ekonomi Syariah
02. Lembaga Keuangan/Dana Sosial Syariah
03. Produk dan Jasa Halal
04. Pengelolaan Keuangan Secara Syariah
05. Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah
06. Sikap terhadap Masa Depan



Sementara literasi dan inklusi keuangan syariah diukur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Di sisi lain, *halal awareness* belum memiliki indikator yang mengukur secara riil dan berkesinambungan.

Oleh karena itu strategi nasional ini menggunakan proxy produk domestik bruto syariah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan *brand* dan *halal awareness* (*halal lifestyle*) dirancang tiga strategi utama yaitu sebagai berikut.





# Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah

Indeks Literasi Ekonomi Syariah merupakan rangkaian survei literasi ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen evaluasi terhadap strategi-strategi yang telah diimplementasikan oleh Bank Indonesia.

Tabel 11 Elemen Survei Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia

Elemen Survei Indeks Literasi Ekonomi Syariah						
Survei Nasional Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Istilah-istilah Ekonomi Syariah	Lembaga Keuangan/ Dana Sosial Syariah	Produk dan Jasa Halal	Pengelolaan Keuangan Secara Syariah	Kemampuan Numerik Ekonomi Syariah	Sikap terhadap Masa Depan
Literasi	v	v	v	v	v	v
Inklusi	v	v	v	v	v	v
Infrastruktur Pendukung	v	v	v	v	v	v

Secara garis besar, elemen-elemen survei indeks literasi ekonomi syariah relevan dengan pilar-pilar Strategi Nasional Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji keterkaitan antara beberapa survei yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, seperti OECD, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), OJK, dan BI dengan keenam pilar indeks literasi ekonomi syariah.

Lebih lanjut, keenam parameter indeks literasi ekonomi syariah ini paling sesuai apabila dijadikan tolak ukur, mengingat adanya cakupan survei yang sangat luas, baik dari segi pengetahuan masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah secara umum, dan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, terdapat juga parameter yang dapat mengetahui tingkat preferensi masyarakat terhadap produk dan jasa halal, sikap masa depan, serta pengelolaan keuangan secara syariah. Lebih lanjut, terdapat juga parameter indikator yang dapat menunjukkan kemampuan numerik masyarakat terhadap aplikasi ekonomi dan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

## Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu indikator yang menjadi acuan tingkat pemahaman dan penggunaan/akses masyarakat Indonesia terhadap produk/layanan jasa keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah. Oleh karena itu, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu indeks penting dalam merumuskan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya adalah industri halal dan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam rangka penguatan literasi keuangan syariah, OJK telah melaksanakan berbagai bauran strategi, mulai dari peningkatan frekuensi edukasi keuangan syariah, *Training of Trainers* baik secara *offline* maupun *online*. Hal tersebut disampaikan di dokumen SNLKI 2021-2025.



Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya oleh pemerintah dan lembaga keuangan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat.



# 2.3.

## INTERKONEKSI PROGRAM DALAM SNLIEKSI

### A. SNLIEKSI SERTA MASTERPLAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Selain harmonisasi dengan strategi literasi keuangan yang sudah ada, penyusunan SNLIEKSI harus memperhatikan berbagai *blueprint* dan *masterplan* yang sudah ada agar kolaborasi berbagai program dapat dilakukan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program. Adapun keterkaitan dengan *masterplan* dan program strategis yang lain adalah sebagai berikut:

#### **RPJPN 2025-2045**

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu fokus utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional pada RPJPN 2025–2045. Upaya ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global,
2. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi,
3. Penguatan ekosistem industri halal, terutama pada sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Ini meliputi bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal.
4. Penguatan literasi, regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Tujuan dari penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Selain itu, diperlukan sektor keuangan yang kondusif untuk memastikan optimalisasi fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada pendalaman sektor keuangan, terutama melalui pengembangan diversifikasi produk, instrumen keuangan beserta penjaminannya, penguatan kelembagaan, regulasi, dan penciptaan pasar yang lebih kompetitif, serta penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya ke dalam ekosistem ekonomi syariah.

## **Blueprint ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia**

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menekankan pada tiga peran Bank Indonesia dalam hal: i. regulator pada sektor moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran; dan ii. Inisiator dan akselerator untuk aspek yang bersifat inovatif untuk sektor-sektor yang tidak secara langsung memberikan dukungan terhadap pencapaian fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. *Blueprint* yang dikembangkan memiliki 3 pilar pengembangan yang terdiri dari pengembangan sistem keuangan syariah, rantai produksi sektor halal, dan fungsi edukasi dan penelitian.

## **Blueprint OJK mengenai sektor keuangan syariah**

Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki pula peta jalan pengembangan sektor keuangan komersial syariah yang terdiri dari pengembangan sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan nonbank syariah.

## **Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan Executive Summary Penyusunan MEKSI 2025-2029**

Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan *Executive Summary* Penyusunan MEKSI 2025-2029 (KNEKS, 2024) disusun untuk menjawab tantangan keterbatasan pengembangan industri halal, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang, dan *interlinkage* industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah. Tentu dengan maksud untuk menjadi referensi mengembangkan ekonomi syariah agar memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandangan filosofis dan rencana aksi *masterplan* dituangkan dalam kerangka visi, misi, strategi, serta program yang direalisasikan pada lima tahun mendatang.

Visi Masterplan ini adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”.

Berdasarkan visi tersebut, empat target capaian utama akan dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

1. Peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah;
2. Peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Indicator*;
3. Peningkatan kemandirian ekonomi; dan
4. Peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia

Dalam penyusunan MEKSI 2025-2029, sedang dirancang Indikator Makro Pengembangan Ekonomi Syariah (yang disebut PDB Syariah) dengan tujuan untuk mengukur perkembangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Indikator ini merupakan salah satu langkah dalam pelaksanaan fase 1 RPJPN 2025-2045 terkait Pengembangan Ekonomi Syariah serta Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029. PDB Syariah tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan akan alat ukur perkembangan industri halal nasional, tetapi juga untuk menyediakan data sektor riil ekonomi dan keuangan syariah yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan di setiap sektor. Harapannya, hal ini akan menghasilkan strategi atau program pengembangan yang lebih tepat dan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Indonesia. Selain itu, indikator ini akan membantu dunia usaha dalam menghitung kelayakan investasi dan merumuskan strategi bisnis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dari perspektif riset dan pengembangan, ketersediaan data ini sangat penting bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan literatur di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

## **Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI)**

Arah dan tujuan MPIHI adalah menyelaraskan amanat rencana pembangunan nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dari waktu ke waktu, pengembangan industri halal di Indonesia akan diselaraskan dengan program terkait pengembangan industri halal sehingga dapat meningkatkan daya saing secara global.

## B. INISIATIF PENYUSUNAN *DASHBOARD* UNTUK *MONITORING* PROGRAM

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI), interaksi antara berbagai program strategis menjadi sangat krusial. Interkoneksi antar program menggambarkan posisi SNLIEKSI sebagai program strategis yang menghubungkan fungsi kementerian dan lembaga terkait dalam usaha peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai strategi nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, maka rencana besar ini merupakan tanggung jawab banyak pihak, baik itu Lembaga maupun Kementerian yang terkait. Masing masing L/K tersebut tentu ingin memberikan peran dan kontribusi maksimalnya. Agar L/K dapat mencapai tujuan/rencana besar tersebut secara lebih efisien, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi serta penggunaan sumber daya yang efektif, melalui implementasi Manajemen Risiko, yang pada tahapan berikutnya akan dilengkapi dengan pembangunan Sistem Informasi Manajemen dan *Dashboard* untuk memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan, terutama oleh KNEKS.

Tabel 12 Positioning Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/ Lembaga	Positioning dalam Program Literasi Ekonomi dan Keuangan syariah	Strategi Utama	Klaster PDB Syariah
	<b>ME KNEKS</b>	a. Merencanakan program b. Mengkoordinasikan program c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
4.	Kementerian Agama	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Keuangan syariah



(Lanjutan) Tabel 12 Positioning Kementerian/Lembaga


No.	Kementerian/ lembaga	Positioning dalam Program Literasi Ekonomi dan Keuangan syariah	Strategi Utama	Klaster PDB Syariah
5.	Kementerian Keuangan	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
6.	Kementerian Perindustrian	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal
7.	Kementerian Perdagangan	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal
8.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
9.	Kementerian BUMN	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
10.	Kementerian Koperasi dan UKM	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Keuangan syariah
11.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Bekraf	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah

(Lanjutan) Tabel 12 Positioning Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/ lembaga	Positioning dalam Program Literasi Ekonomi dan Keuangan syariah	Strategi Utama	Kluster PDB Syariah
12.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Keuangan syariah
13.	Bank Indonesia (BI)	a. Merancang/desain program b. Mengolaborasikan program literasi yang diselenggarakan dengan perencanaan program KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
14.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Keuangan syariah
15.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
16.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah
17.	Kementerian Koordinator yang membidangi urusan Polhukam	a. Merancang/desain program b. Melaksanakan program berdasarkan perencanaan KNEKS c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program	a. Peningkatan Literasi b. Peningkatan Inklusi c. Penguatan Infrastruktur Pendukung	Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Pakaian dan Feysen Muslim, Ekonomi Kreatif Syariah, Farmasi dan Kosmetik Halal, Energi Terbarukan, Keuangan syariah







# 2.4.

## PEMODELAN LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

## Tujuan Pemodelan

Pada 2022, indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih berada di angka 23,01%, dengan target peningkatan menjadi 35% pada tahun 2024 dan 50% pada tahun 2025.

Target peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam rapat pleno pada 20 Desember 2022. Pada saat itu, indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih berada di angka 23,01%, dengan target peningkatan menjadi 35% pada tahun 2024 dan 50% pada tahun 2025. Pencapaian target ini tidak hanya sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat inklusi keuangan syariah, tetapi juga untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan dalam mencapai target ini sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah di Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sebuah strategi nasional yang komprehensif dan terkoordinasi, yang mampu menyelaraskan berbagai program kerja dari seluruh pemangku kepentingan di KNEKS. Strategi ini harus responsif terhadap perubahan dinamika ekonomi dan mampu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk memastikan efektivitas strategi ini adalah dengan menggunakan pendekatan dinamika sistem (*system dynamics*) dalam proses perumusan dan implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan kementerian dan lembaga terkait untuk memahami interaksi dinamis antar variabel yang mempengaruhi literasi ekonomi syariah dan menyesuaikan strategi sesuai perubahan kondisi yang terjadi.

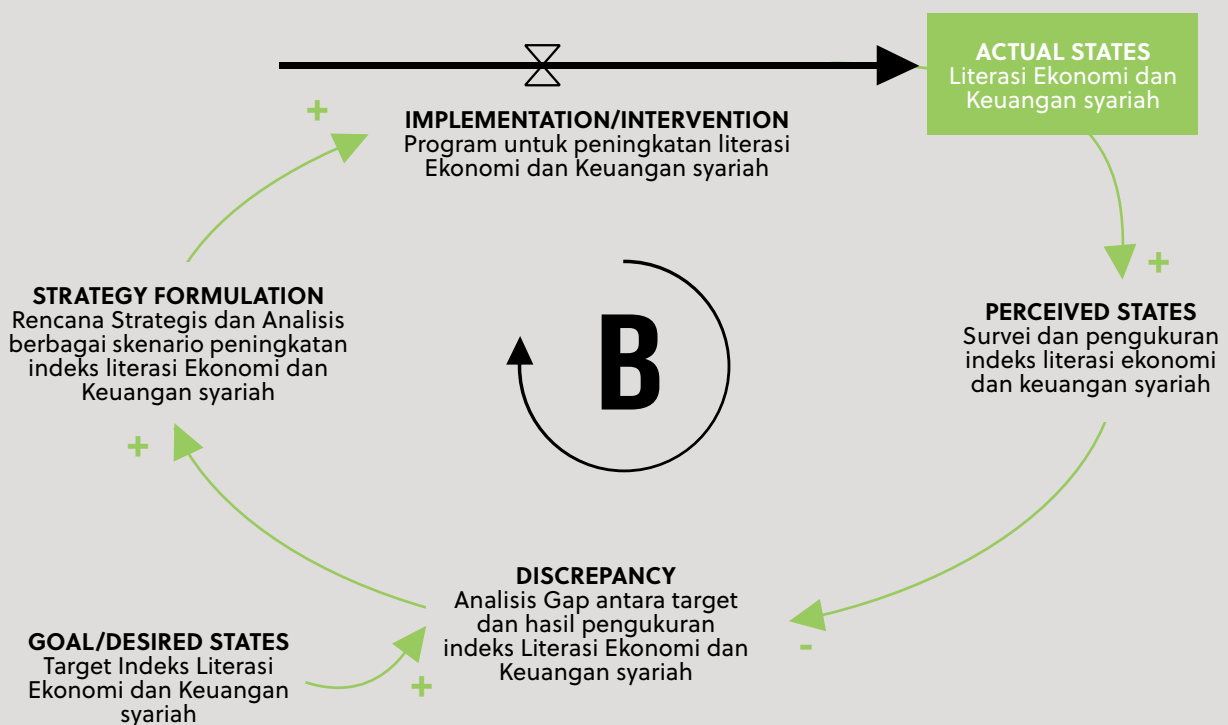
Pemodelan berbasis *system dynamics* ini sangat relevan untuk menangani kompleksitas yang melekat pada literasi ekonomi dan keuangan syariah. Sistem literasi ini melibatkan banyak variabel yang saling mempengaruhi, mulai dari pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan nilai ekonomi dan keuangan syariah, ketersediaan informasi produk dan layanan keuangan syariah, peran sosialisasi kementerian dan lembaga, peran tokoh masyarakat, hingga kebijakan regulasi.

Dengan pemodelan ini, berbagai skenario strategi dapat diuji secara *data-driven* dan *evidence-based*, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi langkah-langkah paling efektif yang harus diambil. Selain itu, pemodelan ini juga memungkinkan simulasi dampak jangka panjang dari setiap keputusan, sehingga membantu dalam pembuatan strategi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam upaya peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

# Kerangka Konseptual Model

Kerangka konseptual literasi ekonomi dan keuangan syariah didasarkan pada konsep umpan balik tertutup (*feedback loop*) yang mencerminkan interaksi dinamis antar elemen dalam sistem. Model ini tidak mengandalkan pola pikir linier, melainkan pada hubungan sebab-akibat yang berulang, di mana setiap keputusan atau intervensi akan menghasilkan dampak yang kembali mempengaruhi keputusan di masa mendatang. Kerangka ini merujuk pada pendekatan *system dynamics* yang dikembangkan oleh Forrester (1961), yang menggabungkan pemahaman tentang umpan balik dan simulasi komputer untuk memodelkan perilaku sistem yang kompleks secara holistik. Dalam konteks literasi ekonomi syariah, pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana berbagai kebijakan, program, dan faktor eksternal saling berinteraksi dan menciptakan pola perubahan perilaku yang dinamis dari waktu ke waktu.

Penggunaan *feedback loop* dalam kerangka konseptual literasi ekonomi dan keuangan syariah sangat penting karena memberikan fleksibilitas dalam strategi yang bersifat adaptif. Pengambil kebijakan dapat memanfaatkan data lapangan seperti survei dan analisis big data untuk mengidentifikasi perubahan dan tren terbaru. Berdasarkan umpan balik dari hasil implementasi, strategi dapat disesuaikan menjadi lebih proaktif. Harapannya kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar reaktif, tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perubahan kondisi di lapangan. Dengan demikian, strategi literasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi proses yang dinamis dan berkembang, memastikan efektivitasnya seiring waktu dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.



Gambar 21 Kerangka Konseptual Pemodelan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah



Diagram dalam kerangka konseptual pemodelan menggambarkan bagaimana *feedback loop* bekerja dalam mengarahkan strategi peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan kunci, mulai dari penetapan target, pengumpulan informasi, analisis gap, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki fungsi yang penting dalam memastikan agar kebijakan tetap relevan dan terarah sesuai tujuan, sambil memberikan ruang untuk evaluasi dan perbaikan secara terus menerus. Dengan mekanisme umpan balik ini, pemangku kepentingan dapat menilai efektivitas intervensi secara berkelanjutan, memastikan kebijakan yang dibuat selalu responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kerangka konseptual model terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

**a. Tujuan dan keadaan yang diinginkan (*Goals/Desired States*)**

Elemen pertama dari kerangka konseptual ini adalah penetapan tujuan atau target yang ingin dicapai. Pada tahap ini, KNEKS bersama kementerian dan lembaga terkait menentukan tujuan dan indikator keberhasilan. Tujuan dapat berupa target indeks literasi ekonomi serta keuangan syariah. Indeks literasi dijadikan sebagai ukuran tentang persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Target indeks literasi ini ditargetkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Tujuan ini menjadi acuan dalam merancang strategi dan program yang mendukung peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah secara terukur.

**b. Keadaan yang terukur/dipersepsikan (*Perceived States*)**

Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan survei dan pengukuran kondisi nyata di lapangan terkait indeks literasi ekonomi serta keuangan syariah. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi literasi ekonomi dan keuangan syariah aktual di masyarakat, serta mengevaluasi sejauh mana tingkat literasi syariah telah tercapai. Melalui survei dan analisis *big data*, dengan *sampling error* dan tingkat kepercayaan tertentu, pengambil kebijakan dapat mengetahui berapa banyak masyarakat yang telah memahami konsep dasar keuangan syariah. Hasil pengukuran ini menjadi dasar penting untuk menentukan intervensi yang tepat dalam mencapai target literasi yang diinginkan.

**c. Analisis Kesenjangan (*Discrepancy Analysis*)**

Di sini dilakukan analisis gap antara target yang telah ditetapkan (*desired states*) dengan kondisi nyata yang terukur (*perceived states*). Jika ada kesenjangan antara keduanya, analisis ini akan menunjukkan di mana letak permasalahan atau kekurangan dalam mencapai tujuan tersebut. Pada tahap "*Discrepancy*" atau analisis kesenjangan, sangat penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan spesifik. Analisis kesenjangan ini harus memperhitungkan beberapa faktor utama yang berpengaruh dalam penyebaran literasi ekonomi dan keuangan syariah.

#### d. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Berdasarkan hasil analisis gap, strategi kemudian dirumuskan. Strategi yang dimaksud ini mencakup kebijakan dan program utama untuk meningkatkan indeks literasi ekonomi serta keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk menutup gap yang teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Pendekatan *system dynamics* yang diterapkan dalam kerangka berpikir ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk melakukan simulasi terhadap berbagai skenario sebelum melakukan implementasi di dunia nyata. Dengan menggunakan simulasi, berbagai skenario strategi yang dirumuskan dapat dianalisis terlebih dahulu untuk melihat potensi dampaknya terhadap literasi ekonomi serta keuangan syariah. Keuntungan melakukan simulasi terhadap suatu rencana strategis ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Penghematan Waktu dan Biaya

Implementasi di dunia nyata sering kali memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan simulasi, strategi yang tidak efektif dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga pengambil kebijakan dapat menghindari pengeluaran sumber daya yang sia-sia. Ini membantu memastikan bahwa hanya strategi yang paling potensial yang akan diimplementasikan di lapangan.

##### 2. Perencanaan yang Lebih Matang

Melalui pendekatan ini, pengambil kebijakan dapat memvisualisasikan dampak jangka panjang dari intervensi yang mereka rencanakan. Ini memberikan perspektif yang lebih holistik dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

##### 3. Mengurangi Risiko Kegagalan

Sebelum strategi benar-benar diterapkan, simulasi dapat menunjukkan berbagai kemungkinan hasil, baik yang positif maupun negatif. Hal ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dan memperbaiki strategi sebelum diimplementasikan. Dengan demikian, risiko kegagalan strategi dapat diminimalkan.

Dengan kata lain, pendekatan *system dynamics* memungkinkan perumusan strategi yang lebih terinformasi dan berbasis data, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai target literasi ekonomi serta keuangan syariah tanpa harus menghadapi risiko dan biaya yang tinggi saat menguji strategi di dunia nyata.

---

**e. Implementasi/Intervensi (*Implementation/Intervention*)**

Setelah strategi dirumuskan, langkah-langkah implementasi atau intervensi dijalankan. Program-program dan inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah di masyarakat. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa proses perbaikan literasi ekonomi syariah tidak stagnan dan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi di lapangan. Setelah strategi dirumuskan dan diuji melalui simulasi, langkah berikutnya adalah implementasi atau intervensi. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat mulai dijalankan, dengan memperhatikan hasil dari simulasi sebelumnya untuk memastikan efektivitas intervensi.

---

**f. Kondisi Aktual (*Actual States*)**

Hasil dari implementasi program dan intervensi dievaluasi melalui pengukuran baru, yang menunjukkan keadaan aktual dari literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah setelah intervensi dilakukan. Dalam kerangka ini, teori difusi inovasi (*Diffusion of Innovations*) dari Rogers (1962) dapat memberikan gambaran, terutama dalam memahami bagaimana inovasi atau ide baru, seperti literasi ekonomi dan keuangan syariah, dapat disebarluaskan di masyarakat. Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat mengadopsi inovasi melalui beberapa tahap, dari kelompok *early adopters* hingga mayoritas masyarakat. Teori difusi inovasi ini relevan dalam konteks literasi keuangan syariah karena memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai masyarakat luas. Strategi penyebaran literasi harus mempertimbangkan saluran komunikasi yang tepat dan bagaimana berbagai kelompok masyarakat merespons inovasi yang diperkenalkan. Kondisi aktual suatu sistem umumnya tidak diketahui dan diperlukan pengukuran.

Pendekatan *feedback loop* ini juga memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dari proses implementasi kebijakan. Sistem ini tidak bersifat stagnan, melainkan terus berevolusi seiring dengan perubahan kondisi lapangan. Hasil dari implementasi kebijakan dievaluasi secara berkala, dan jika ada masalah atau kesenjangan baru yang teridentifikasi, strategi bisa segera disesuaikan tanpa menunggu evaluasi akhir.

---



# Komponen Utama Model

Sebagai suatu sistem, literasi ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari banyak sekali variabel dengan pola hubungan antar variabel yang sangat kompleks. Suatu model tidak akan cukup untuk mengakomodir semua variabel beserta korelasinya. Akan tetapi, dalam batasan tertentu suatu model akan sangat berguna untuk memberikan pemahaman terhadap suatu sistem beserta kemungkinan untuk mengintervensi sistem secara efektif. Salah satu pendekatan yang mungkin terkait literasi ekonomi adalah Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh Rogers (1962) dan Bass (1965).

Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu seiring waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu inovasi disebarkan di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk mengadopsinya.

Rogers mengidentifikasi empat komponen utama dalam suatu difusi inovasi sebagai berikut.

## **Inovasi (*Innovation*)**

Inovasi dapat berupa produk, layanan, ataupun konsep baru. Dalam konteks literasi ekonomi syariah, inovasi ini bisa berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah yang dituangkan ke dalam konten maupun modul edukasi.

## **Saluran Komunikasi (*Communication Channels*).**

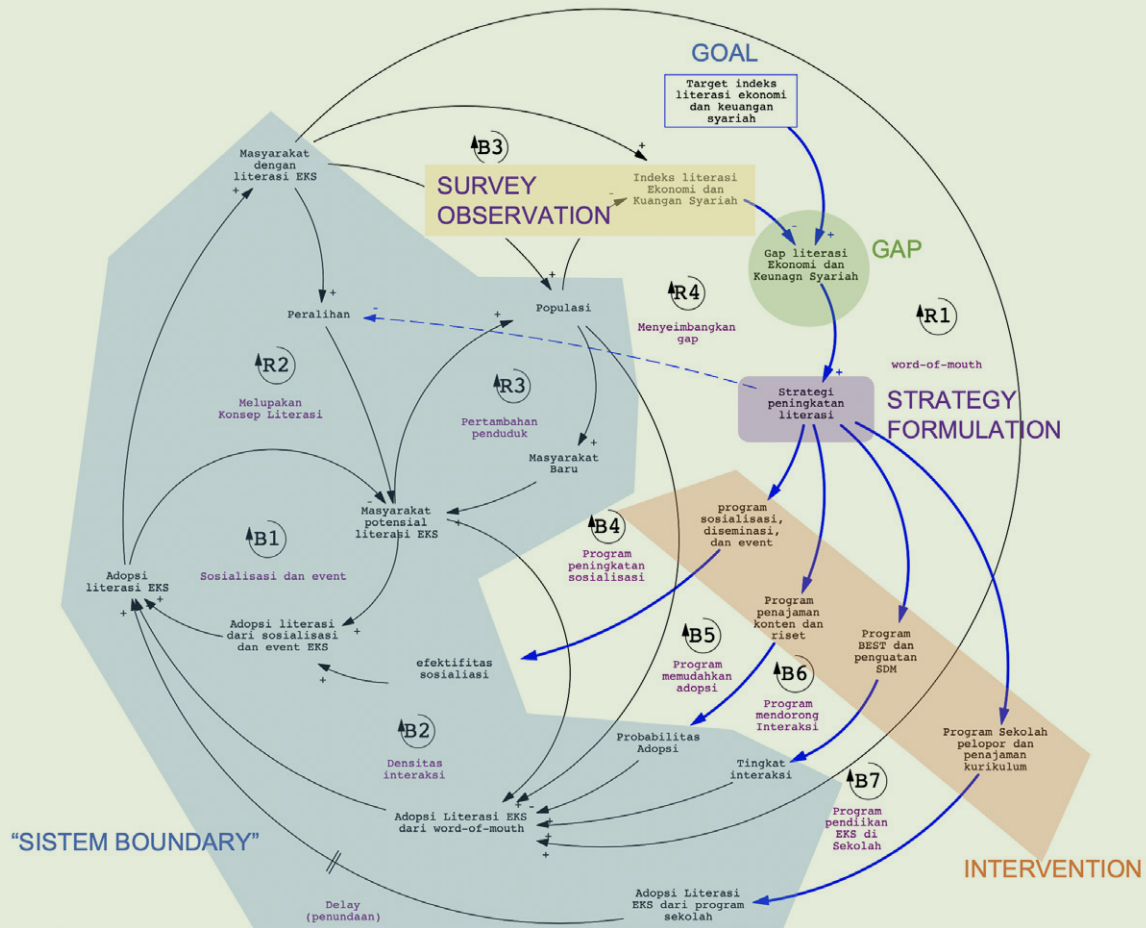
Penyebaran inovasi bergantung pada cara inovasi tersebut dikomunikasikan. Saluran komunikasi mencakup media massa, sosialisasi, seminar, pameran, atau *platform* digital yang digunakan untuk menjangkau masyarakat. Efektivitas penyebaran inovasi ditentukan oleh seberapa baik informasi mengenai inovasi dapat disampaikan melalui saluran ini.

## **Sistem Sosial (*Social System*)**

Sistem sosial adalah lingkungan di mana adopsi inovasi terjadi. Ini mencakup anggota masyarakat yang berinteraksi satu sama lain, termasuk para pemimpin opini, yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi. Dukungan dari institusi dan komunitas dalam sistem sosial berperan penting dalam mempercepat adopsi inovasi.

## **Waktu (*Time*)**

Difusi inovasi adalah proses yang membutuhkan waktu. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memerlukan waktu untuk mengenali, mengevaluasi, dan memutuskan apakah mereka akan mengadopsi inovasi tersebut.



Gambar 22 Kerangka Konseptual Pemodelan Literasi Ekonomi dan Keuangan syariah

Pemodelan difusi inovasi dengan menggunakan metodologi *system dynamics* dikembangkan oleh Milling (1991) dan Maier (1992). Sterman (2000) secara khusus membahas perkembangan difusi inovasi dari mulai *model logistic*, model difusi inovasi Bass sampai dengan model difusi inovasi dengan memasukkan konsep umpan balik *system dynamics*. Difusi inovasi digambarkan Sterman sebagai dinamika antara umpan balik positif (*positive feedback*) dan umpan balik negatif (*negative feedback*) yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan adopsi secara dinamis. Kurva pertumbuhan literasi atau kurva indeks literasi yang dihasilkan mengikuti pola sigmoid (*growth curve*). *Positive feedback* adalah mekanisme di mana adopsi suatu inovasi mendorong lebih banyak individu untuk ikut mengadopsi, sedangkan *negative feedback* adalah hambatan atau resistensi terhadap adopsi yang mengurangi tingkat pertumbuhan. Apabila *positive feedback* menjadi dominan, kurva pertumbuhan akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika *negative feedback* lebih dominan, pertumbuhan akan melambat atau bahkan menurun.

Dinamika antara *positive feedback* dan *negative feedback* ini mempengaruhi pergeseran dari satu kondisi keseimbangan (*equilibrium*) ke kondisi keseimbangan lain. Dalam hal ini, memahami dan mengelola variabel yang berpengaruh pada masing-masing *feedback loop* menjadi sangat penting untuk memastikan *positive feedback* lebih dominan sehingga adopsi inovasi terus meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Pada akhirnya, keberhasilan adopsi suatu inovasi bergantung pada bagaimana proses *feedback* ini dikelola dan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dalam *sigmoid growth curve*. Dalam konteks literasi ekonomi dan keuangan syariah, proses difusi inovasi dapat digambarkan dalam empat *loop* utama.

## Penyebaran Literasi di Masyarakat (R1)

Struktur *loop* adopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui *word-of-mouth* merupakan mekanisme kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi dan keuangan syariah. Pada tahap ini, ketika jumlah individu yang telah mengadopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah cukup signifikan, penyebaran pengetahuan dapat terjadi secara organik antar individu di masyarakat. *loop* ini, yang bersifat *reinforcing* atau penguatan, menggambarkan sebuah siklus di mana masyarakat yang telah memahami konsep ekonomi dan keuangan syariah secara sukarela memberikan informasi kepada orang di sekitarnya, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah Bank Indonesia pada tahun 2022, 56,1% masyarakat mendapatkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah dari teman dan keluarga, sementara 6,1% lainnya dari acara seperti pengajian. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial memegang peranan penting dalam memperluas pemahaman literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.

*Loop* ini bekerja melalui tiga tahapan penting

1. individu yang telah mengadopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah meningkatkan jumlah masyarakat yang *literate*;
2. mereka yang telah *literate* cenderung menyebarkan informasi kepada lingkungan sosialnya (*word-of-mouth*); dan
3. interaksi ini meningkatkan jumlah orang yang memahami dan mengadopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga memperluas lingkup penyebaran literasi di masyarakat.

### Dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas *loop* ini adalah tingkat interaksi sosial dan tingkat adopsi.

Semakin tinggi frekuensi dan intensitas interaksi antara mereka yang telah mengadopsi ekonomi dan keuangan syariah dan mereka yang belum, semakin besar peluang penyebaran pengetahuan tersebut. Selain itu, kemudahan konsep ekonomi dan keuangan syariah untuk dipahami juga menentukan tingkat adopsi, di mana konsep yang lebih sederhana cenderung lebih cepat diadopsi oleh masyarakat.

Analogi paling dekat dari adopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah ini adalah model *Susceptible-Infectious-Recovery* atau model SIR (Serman, 2000). Model SIR yang menggambarkan penyebaran virus yang dipengaruhi oleh tingkat interaksi dan infektivitas virus. Semakin banyak individu yang telah terinfeksi berinteraksi dengan individu yang potensial, semakin besar peluang penyebaran infeksi virus tersebut. Proses penyebaran inovasi, secara khusus literasi, mengikuti pola yang sama dengan model SIR. Berdasarkan model SIR tersebut, tingkat adopsi (*adoption rate*) dipengaruhi oleh *contact rate*, yaitu seberapa sering individu yang telah mengadopsi konsep ekonomi dan keuangan syariah berinteraksi dengan individu yang belum. Semakin tinggi *contact rate*, semakin besar peluang literasi ekonomi dan keuangan syariah menyebar di masyarakat. Dalam hal ini, faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan masyarakat dengan literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah tingkat adopsi. *Variable* ini mengindikasikan seberapa mudah nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat difahami dan melekat kedalam pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

Namun, *loop* penyebaran literasi di masyarakat adopsi ini memiliki kelemahan pada tahap awal. Jika tidak ada individu yang telah *literate* mengenai ekonomi dan keuangan syariah, maka penyebaran melalui *word-of-mouth* tidak akan terjadi, karena tidak ada agen pertama yang dapat memulai proses adopsi. Dalam konteks ini intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait berupa kampanye ekonomi dan keuangan syariah untuk memicu adopsi awal memainkan peran yang sangat penting.



## Sosialisasi, Diseminasi dan Event (B1)

Masyarakat mengadopsi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai kampanye yang dilakukan di media sosial, media massa, serta program-program dari kementerian dan lembaga terkait (*states agents*). Konten atau inovasi syariah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai jalur, seperti sosialisasi, pameran, seminar, acara publik, dan liputan media. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kesadaran (*awareness*) di masyarakat, sehingga mereka terdorong untuk lebih memahami konsep ekonomi syariah.

Kampanye ini menghasilkan kelompok *early adopters*, yang akan memicu adopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah hingga mencapai *critical mass* atau titik kritis (*tipping point*). Pendekatan ini sejalan dengan teori difusi inovasi dari Rogers (1962), yang menjelaskan bahwa inovasi menyebar melalui beberapa tahap, dari *innovators* hingga mayoritas awal dan akhir, hingga akhirnya seluruh populasi terpapar dan teredukasi.

Sebagaimana melalui program sosialisasi, seminar, dan acara publik yang bisa menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, strategi sosialisasi melalui media sosial juga penting untuk menjadi perhatian. Mengingat media sosial kini menjadi *platform* dominan bagi lebih dari 191 juta pengguna internet di Indonesia (We Are Social, 2023), menjadikannya medium efektif untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Survei literasi ekonomi syariah BI pada tahun 2022 juga mencatat hasil serupa ketika menanyakan tentang sumber informasi masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan tentang lembaga keuangan komersial. Masyarakat menyebut media elektronik, media sosial, spanduk/leaflet/baliho, media cetak serta portal berita sebagai sumber informasi selain lembaga perbankan.

Kombinasi adopsi literasi ekonomi dan keuangan syariah dari *loop* penyebaran literasi melalui *word-of-mouth* (R1) dan *loop* kampanye ekonomi dan keuangan syariah (B1) ini akan memicu pertumbuhan masyarakat dengan literasi ekonomi dan keuangan syariah dan mengurangi masyarakat potensial literasi ekonomi dan keuangan syariah. Persentase masyarakat dengan literasi terhadap masyarakat secara total akan membentuk kurva pertumbuhan (*growth curve*), berupa kurva *sigmoid*. Persentase inilah yang menjadi indikator dari indeks literasi dan keuangan syariah. Kurva pertumbuhan diharapkan terus meningkat sesuai target yang ditetapkan melalui implementasi program-program yang terstruktur dan berkelanjutan.

## Retensi literasi Ekonomi dan Keuangan syariah (R2)

Indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah dapat mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu, terutama karena adanya mekanisme retensi pengetahuan. Menurut teori retensi pengetahuan seperti *Ebbinghaus' forgetting curve*, informasi yang dipelajari seseorang cenderung akan menurun seiring waktu jika tidak secara aktif diulang atau digunakan. Penurunan ini terjadi terutama pada aspek pengetahuan dan kemampuan numerik, yang seringkali membutuhkan interaksi atau aplikasi berkelanjutan agar tetap dapat dipertahankan. Kurangnya interaksi atau paparan terhadap konsep-konsep ekonomi dan keuangan syariah, seperti pada masyarakat yang jarang berhubungan dengan sistem syariah secara langsung, dapat menyebabkan penurunan tingkat literasi.

Kondisi ini menciptakan *counter loop* yang menyebabkan masyarakat yang sudah pernah mengadopsi literasi ekonomi syariah dapat kembali masuk ke dalam kelompok potensial literasi. Dengan kata lain, mereka yang sebelumnya paham dengan konsep keuangan syariah dapat mengalami penurunan pemahaman jika tidak terus menerus terlibat atau menggunakan pengetahuan tersebut. Kemampuan masyarakat untuk mempertahankan tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah sangat bergantung pada faktor interaksi, penggunaan sehari-hari, serta adanya program-program yang secara rutin mengingatkan dan mengedukasi mereka. Tanpa interaksi ini, pengetahuan yang sudah ada akan semakin memudar, dan upaya untuk mempertahankan tingkat literasi yang tinggi akan semakin sulit.

Melalui kampanye yang terstruktur dan inovatif, sosialisasi ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memicu pertumbuhan literasi yang berkelanjutan, menjadikan ekonomi syariah bagian integral dari kehidupan sehari-hari."

## Dinamika Populasi

Indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah juga dapat mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia adalah sekitar 1,25% per tahun, dengan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Sementara itu, usia harapan hidup yang semakin panjang juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk secara keseluruhan. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan pembagi dalam penghitungan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih besar. Akibatnya, meskipun jumlah individu yang paham literasi syariah bertambah, jika pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada peningkatan literasi, indeks keseluruhan tetap bisa menurun.

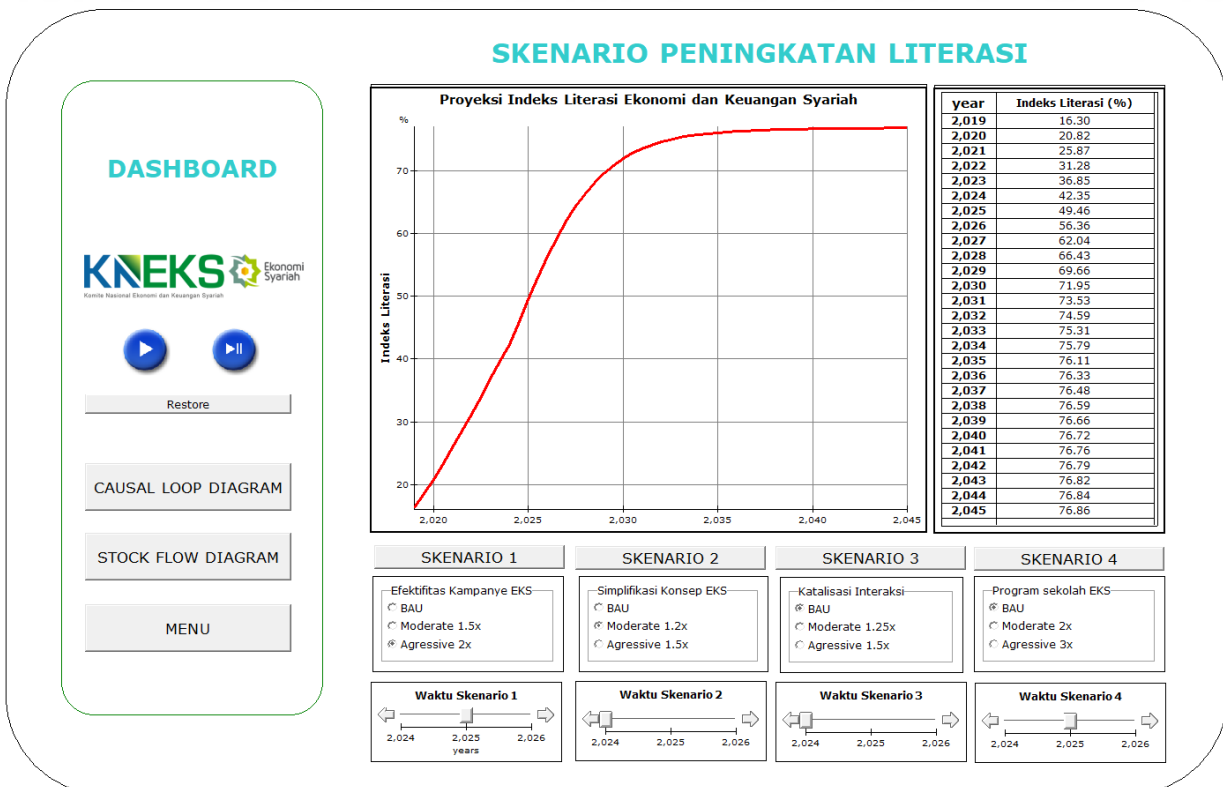
Untuk memastikan bahwa indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh, diperlukan tingkat pertumbuhan net literasi yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk. Ini berarti, upaya edukasi dan penyebaran pengetahuan literasi syariah harus berlangsung secara lebih masif dan efektif, sehingga jumlah masyarakat yang melek literasi syariah bertambah dengan kecepatan yang cukup untuk mengimbangi, bahkan melampaui, pertambahan jumlah penduduk. Tanpa pertumbuhan literasi yang signifikan, indeks literasi dapat stagnan atau bahkan menurun, mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah sementara penyebaran literasi mungkin tidak cukup cepat untuk mengikuti laju pertumbuhan tersebut.

Berdasarkan hasil survei BPS, populasi dibawah usia masyarakat produktif masih mendominasi struktur penduduk Indonesia, dengan proporsi sekitar 25% dari total populasi. Dengan menggunakan *aging model*, program literasi syariah dapat dimodelkan secara spesifik untuk kelompok usia ini, dengan pendekatan edukasi yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan kebutuhan mereka. Mengedukasi generasi muda sejak dini mengenai konsep dasar ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga menciptakan pondasi kuat bagi penerapan literasi keuangan syariah ketika mereka memasuki usia produktif. Dalam jangka panjang, program yang terstruktur dan berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi secara signifikan, karena kelompok muda ini akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan keuangan syariah di masa depan

Mengedukasi generasi muda sejak dini mengenai konsep dasar ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga menciptakan pondasi kuat bagi penerapan literasi keuangan syariah ketika mereka memasuki usia produktif.

# Dashboard Strategi Literasi

Model literasi ekonomi dan keuangan syariah berbasis pendekatan *system dynamics* dapat dikembangkan menjadi *dashboard* strategi literasi. *Dashboard* ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan simulasi perubahan pada variabel kunci (*leverage points*) guna memprediksi dan memahami perilaku sistem dalam berbagai skenario. Melalui pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat memvisualisasikan dampak dari berbagai keputusan sebelum diterapkan, sehingga meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan.



Gambar 23 Dashboard Model Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Selain itu, *dashboard* ini dapat diintegrasikan dengan *dashboard* yang memuat data aktual dari program dan kegiatan kementerian dan lembaga terkait dalam koordinasi KNEKS. Kedua *dashboard* berperan secara simultan sebagai sumber informasi yang komprehensif terkait program dan strategi yang akan mendukung sinergi antar instansi. Dengan demikian, *dashboard* tidak hanya membantu memahami dinamika sistem ekonomi syariah secara lebih baik, tetapi juga mendukung keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berbasis data.



# Variabel Pemodelan

## untuk Mendorong Peningkatan Indeks Literasi

Program utama dalam strategi peningkatan literasi yang akan dibahas pada bab selanjutnya bertujuan untuk menyorot beberapa variabel kunci yang berpengaruh dalam mendorong peningkatan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektifitas kampanye ekonomi syariah

---

- b. Katalisasi interaksi masyarakat untuk meningkatkan paparan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah

---

- c. Simplifikasi konsep ekonomi dan keuangan syariah

---

- d. Edukasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat usia muda

---

### a. Peningkatan efektifitas kampanye ekonomi syariah

Literasi ekonomi dan keuangan syariah semakin relevan di tengah berkembangnya industri keuangan Islam, baik di Indonesia maupun di dunia. Media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi ini karena jangkauannya yang luas dan aksesibilitasnya yang mudah. Pemahaman tentang instrumen keuangan syariah seperti perbankan, investasi, dan asuransi bisa lebih cepat disebarluaskan melalui *platform-platform* ini.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui media sosial, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan disesuaikan dengan karakteristik pengguna *platform*. Menggabungkan elemen edukasi yang mendalam dengan daya tarik visual dan interaktif akan membantu memastikan bahwa pesan literasi keuangan tidak hanya tersebar luas, tetapi juga dipahami dan diadopsi oleh masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik dari data yang terkumpul akan memastikan sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **b. Katalisasi interaksi masyarakat untuk meningkatkan paparan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah**

Untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, salah satu langkah penting adalah mendorong interaksi antara masyarakat yang sudah memahami konsep ini dengan masyarakat yang baru mengenalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang berbasis komunitas, seperti diskusi terbuka, *workshop*, atau seminar. Para tokoh masyarakat, pemimpin agama dan komunitas ekonomi syariah dapat berbagi pengalaman, membimbing, serta menjawab pertanyaan dari masyarakat yang belum familiar dengan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dan keuangan. Selain itu, penggunaan *platform* digital seperti media sosial dan aplikasi fintech syariah juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, sehingga memudahkan akses dan pemahaman terkait konsep konsep, produk dan layanan syariah di era digital.

Sinergi antara kegiatan syiar dan bisnis syariah perlu ditekankan, agar kegiatan ini menjadi menguntungkan baik secara ekonomi maupun aspek spiritual. Masyarakat yang baru mengenal ekonomi syariah dapat diajak untuk mencoba layanan atau produk syariah, yang tidak hanya berlandaskan pada keuntungan bisnis, tetapi juga sesuai dengan prinsip keagamaan mereka. Ini dapat meningkatkan omzet bisnis syariah secara organik karena konsumen semakin teredukasi dan termotivasi untuk menggunakan produk yang sejalan dengan keyakinan mereka. Di sisi lain, mereka yang berpartisipasi dalam menyebarkan pemahaman ini juga akan merasa mendapatkan manfaat spiritual karena ikut serta dalam menyebarkan kebaikan dan prinsip keuangan yang lebih etis menurut syariah.

---

### **c. Simplifikasi konsep ekonomi dan keuangan syariah**

Untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, salah satu langkah penting adalah mendorong interaksi antara masyarakat yang sudah memahami konsep ini dengan masyarakat yang baru mengenalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang berbasis komunitas, seperti diskusi terbuka, *workshop*, atau seminar. Para tokoh masyarakat, pemimpin agama dan komunitas ekonomi syariah dapat berbagi pengalaman, membimbing, serta menjawab pertanyaan dari masyarakat yang belum familiar dengan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dan keuangan. Selain itu, penggunaan *platform* digital seperti media sosial dan aplikasi fintech syariah juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, sehingga memudahkan akses dan pemahaman terkait konsep konsep, produk dan layanan syariah di era digital.

Sinergi antara kegiatan syiar dan bisnis syariah perlu ditekankan, agar kegiatan ini menjadi menguntungkan baik secara ekonomi maupun aspek spiritual. Masyarakat yang baru mengenal ekonomi syariah dapat diajak untuk mencoba layanan atau produk syariah, yang tidak hanya berlandaskan pada keuntungan bisnis, tetapi juga sesuai dengan prinsip keagamaan mereka. Ini dapat meningkatkan omzet bisnis syariah secara organik karena konsumen semakin teredukasi dan termotivasi untuk menggunakan produk yang sejalan dengan keyakinan mereka. Di sisi lain, mereka yang berpartisipasi dalam menyebarkan pemahaman ini juga akan merasa mendapatkan manfaat spiritual karena ikut serta dalam menyebarkan kebaikan dan prinsip keuangan yang lebih etis menurut syariah.

---

#### d. Edukasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat usia muda

Untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah sejak usia muda, pendidikan formal di sekolah menjadi salah satu strategi yang sangat efektif. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia sekolah (5-19 tahun) di Indonesia mencapai sekitar 68 juta jiwa pada 2023, menunjukkan potensi besar untuk menyebarkan literasi ini melalui lembaga pendidikan. Melalui koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, program literasi ekonomi syariah dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, terutama di madrasah dan sekolah-sekolah Islam terpadu yang memiliki basis keagamaan yang kuat. Madrasah, yang terus berkembang pesat dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, menjadi tempat ideal untuk memperkenalkan konsep-konsep keuangan syariah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Dalam mengembangkan program ini, ada dua kelompok utama yang perlu diperhatikan: murid dan guru. Murid membutuhkan materi yang relevan, menarik, dan mudah dipahami, seperti modul belajar berbasis kasus nyata dan permainan interaktif yang mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara aplikatif. Sementara itu, guru memerlukan pelatihan dan pendampingan khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajarkan literasi keuangan syariah. Penerapan Kurikulum Merdeka, yang mulai diadopsi di banyak sekolah, memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan materi ekonomi syariah ke dalam mata pelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat menjawab kebutuhan literasi ekonomi di kalangan generasi muda.

Pendidikan literasi ekonomi dan keuangan syariah sejak usia muda memiliki kecenderungan retensi yang lebih lama dibandingkan pendidikan di usia dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa informasi dan keterampilan yang diperoleh pada masa kanak-kanak dan remaja cenderung tertanam lebih dalam dan bertahan lebih lama dalam memori jangka panjang. Menurut riset yang diterbitkan oleh Harvard University (2016), anak-anak dan remaja memiliki kapasitas neuroplastisitas yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk menyerap dan mempertahankan informasi lebih efektif dibandingkan orang dewasa. Hal ini penting dalam konteks literasi ekonomi syariah, karena anak-anak yang dididik sejak dini tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan akan lebih mungkin menerapkannya secara konsisten ketika mereka dewasa.

Berdasarkan riset yang sama, pembelajaran pada usia muda juga lebih mudah membentuk kebiasaan. Jika literasi keuangan syariah diperkenalkan secara sistematis dan relevan di sekolah-sekolah, para murid dapat membangun dasar pengetahuan yang kuat dan lebih cenderung mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan finansial mereka di masa depan. Dengan demikian, program literasi yang menasar usia muda tidak hanya memiliki potensi keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan.

## Alat Bantu Pengambilan Keputusan

KNEKS sebagai *orchestrator* memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan program-program literasi ekonomi dan keuangan syariah yang lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan model literasi berbasis *system dynamics*, KNEKS memiliki kemampuan untuk tidak hanya mengkomunikasikan kebijakan dan strategi secara lebih terstruktur, tetapi juga menjadikannya sebagai alat bantu pengambilan keputusan (*decision support system*) yang handal. Pemodelan ini memungkinkan KNEKS untuk memetakan interaksi kompleks antar variabel dalam sistem literasi, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari setiap intervensi yang diusulkan. Sebagai alat bantu pengambilan keputusan, model mendukung KNEKS dalam mengidentifikasi langkah-langkah paling efektif, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan responsif terhadap perubahan dinamis di lapangan, dan menjaga agar program-program literasi tetap terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, KNEKS dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil sejalan dengan tujuan nasional untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan di Indonesia.





03

# PROGRAM UTAMA NASIONAL

SNLIEKSI terdiri dari 3 strategi utama yaitu peningkatan literasi, peningkatan inklusi, dan penguatan infrastruktur. Pada bab ini akan dijabarkan program-program utama dari masing-masing strategi utama, metode pengukuran dan rencana tindak lanjut dari program-program tersebut, rencana aksi dan implementasi program, serta penyusunan *dashboard* untuk *monitoring*.



# 3.1.

## PROGRAM PENINGKATAN LITERASI

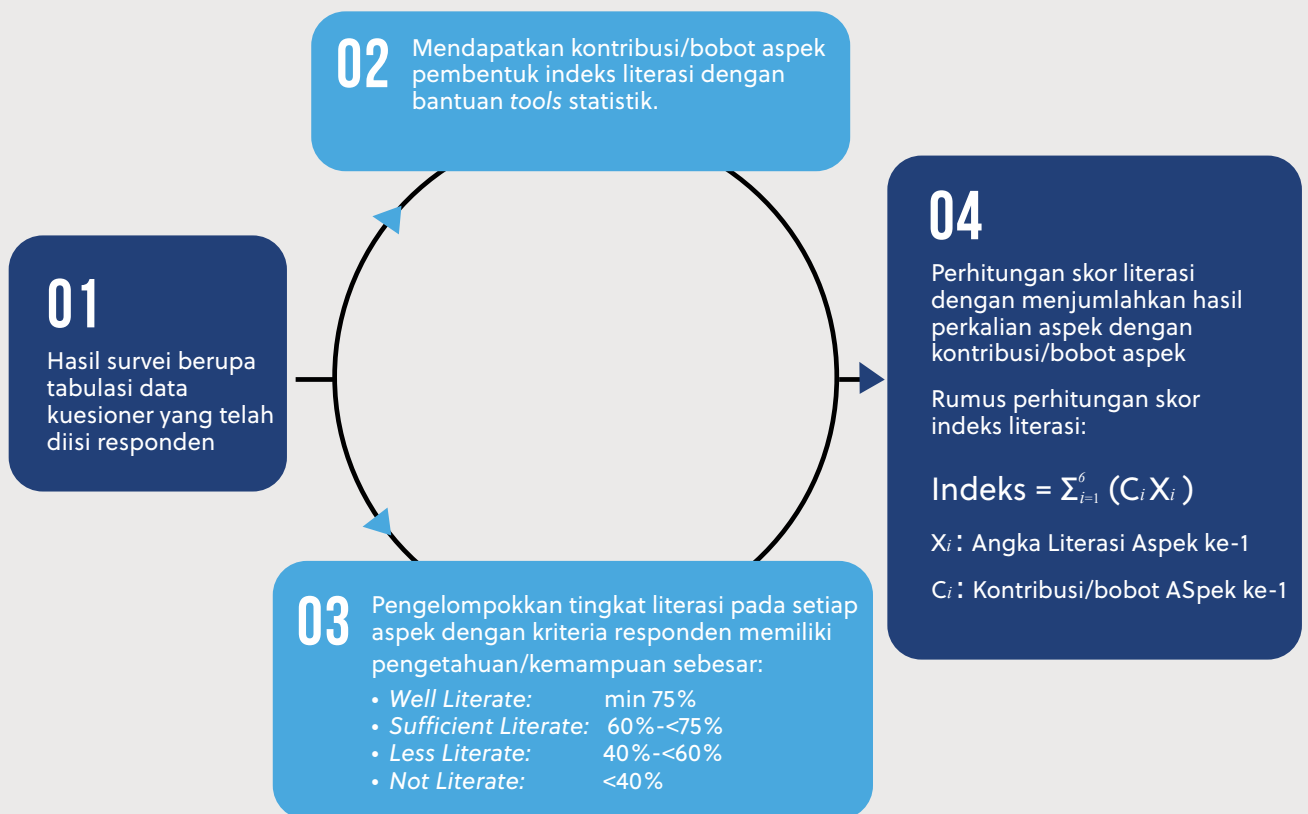
Peningkatan literasi merujuk pada proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami informasi tentang ekonomi dan keuangan syariah secara efektif. Hal ini melibatkan pembangunan keterampilan dalam memperoleh dan menyerap informasi dengan lebih baik, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi yang dibaca. Peningkatan literasi juga mencakup pengembangan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi terkait ekonomi syariah dengan tepat dalam berbagai konteks.

Dengan demikian, peningkatan literasi tidak hanya berdampak pada kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik.

# Metode Pengukuran Literasi

Pengukuran tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui dua metode utama yaitu pelaksanaan survei dan proxi melalui observasi dan analisis data sekunder (*statistical dan big data analysis*).

## A. SURVEI LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Gambar 24 Metodologi Pengukuran Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Survei

Berdasarkan gambar 24, metodologi pengukuran literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui survei dilakukan sebagai berikut:

01. Survei dilakukan melalui kuesioner yang disebar kepada responden melalui *random sampling* pada daerah yang terekspos oleh sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah.
02. Berdasarkan survei tersebut, kontribusi/bobot aspek pembentuk indeks literasi didapatkan melalui metodologi statistik.
03. Tingkat literasi pada setiap aspek penilaian dengan kriteria responden dinilai dengan *range*:
  - *Well Literate*:  $\geq 75\%$
  - *Sufficient Literate*: 60% - 75%
  - *Less Literate*: 40% - 60%
  - *Not Literate*:  $\leq 40\%$
04. Perhitungan skor literasi didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian aspek penilaian dengan bobot penilaian.



## B. ANALISIS PROKSI MELALUI *BIG DATA ANALYTICS*

Dengan melakukan *social listening* di berbagai media dan forum digital: pemahaman, opini, dan pendapat masyarakat dapat dikumpulkan menjadi *big data*. Beberapa proksi dan variabel yang dapat diambil meliputi:

i.

### Analisis Sentimen

Proses mengekstraksi dan mengidentifikasi opini, perasaan, dan emosi dari teks atau konten lain yang dihasilkan oleh pengguna. Sentimen yang diukur adalah sentimen positif dan negatif terhadap keuangan dan layanan syariah, serta lembaga keuangan dan lembaga ZISWAF.

Tujuan utama analisis tersebut adalah untuk memahami sentimen atau suasana hati yang mendasari teks tersebut, apakah positif, negatif, atau netral.

Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis data dari media sosial, ulasan produk, survei pelanggan, dan berbagai sumber teks lainnya untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi dan opini publik terkait aplikasi ekonomi dan keuangan syariah yang mereka hadapi dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

ii.

### Keyword Monitoring

Proses mengawasi kata kunci tertentu yang terkait dengan topik ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sumber data yang tersedia di media digital. Sumber data ini bisa berasal dari media sosial, artikel berita, blog, forum diskusi, dan lain-lain. Proksi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci, yaitu menentukan kata kunci yang relevan seperti: "keuangan syariah", "bank syariah", "zakat", "infaq", "saham syariah", "akad jual beli", dan sebagainya.

Melalui proses ini, dapat ditangkap bagaimana topik tersebut muncul dalam konteks yang lebih dapat dipahami dengan fenomena langsung di masyarakat.



# Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa langkah aksi yang melibatkan seluruh ekosistem dan anggota KNEKS. Dalam rencana tindak lanjut ini, dirancang program yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga anggota KNEKS untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Langkah aksi ini dijabarkan dalam lampiran satu sampai lampiran sepuluh.

## A. PENAJAMAN MODUL/*CONTENT INTEGRATED & CURRICULUM*

Penajaman modul atau konten terintegrasi dan kurikulum dapat direalisasikan dengan merancang modul-modul yang menunjang penyampaian materi-materi ekonomi syariah. Tabel 13 menunjukkan beberapa program atau kegiatan yang diharapkan dapat terlaksana, diantaranya pembuatan dan edukasi modul untuk zakat, wakaf, ekonomi dan keuangan syariah serta materi tentang *halal lifestyle*. Modul-modul dan kurikulum yang telah dirancang dapat disampaikan dalam bentuk cetak seperti buku, dan juga dalam bentuk digital seperti video juga *podcast*.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah melalui penerapan pendekatan pembelajaran komprehensif dan terintegrasi yang mencakup informasi mengenai Industri Halal, Keuangan syariah, Keuangan Sosial Syariah, dan Bisnis Syariah. Salah satu rekomendasi strategi nasional adalah pembuatan kegiatan Belajar Ekonomi Syariah Terintegrasi (BEST).

BEST merupakan salah satu wadah pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan media digital dan nondigital untuk penyebaran informasi serta pengetahuan dasar mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah sehingga mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi ekonomi syariah merupakan pondasi utama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan memperkuat literasi ekonomi syariah, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dari ekonomi syariah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini nantinya akan bermuara pada penguatan fondasi ekonomi syariah, memastikan bahwa nilai-nilai syariah terintegrasi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang mandiri, makmur dan madani. Indeks literasi ekonomi syariah mengalami peningkatan terbesar pada 2023, yaitu menjadi 28,01% dari 23,3% di tahun sebelumnya. Walau begitu, potensi literasi ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung upaya ini, penting untuk mengembangkan modul interaktif dengan elemen gamifikasi, seperti kuis, simulasi keuangan, dan *role-playing games*.

Pendekatan ini akan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, di mana peserta dapat belajar melalui pengalaman langsung. Platform digital interaktif yang mendukung gamifikasi juga akan mempermudah akses ke modul, sementara sesi pelatihan dan webinar dapat memberikan dukungan tambahan untuk mendalami konten. Dengan cara ini, diharapkan literasi ekonomi syariah semakin diperkuat, dan nilai-nilai syariah dapat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Tabel 13 *Monitoring Implementasi Strategi Utama Penajaman Kurikulum*

Kegiatan	PIC	Keterangan
Belajar Ekonomi Syariah Terintegrasi (BEST)	KNEKS	Wadah pembelajaran yang menggunakan media digital dan nondigital untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan dasar mengenai ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat Indonesia.
Pengembangan Modul Interaktif	KNEKS, BI, OJK, Kemendikbud Ristek	Pembuatan modul pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah untuk menciptakan modul pembelajaran yang lebih menarik, mudah dipahami, dan interaktif.
Kurikulum dan Sekolah Pelopor	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenag	Program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum inovatif di sekolah-sekolah terpilih, yang disebut sebagai "sekolah pelopor". Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan dan metode pengajaran yang baru, serta penggunaan teknologi pendidikan modern untuk memperluas literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan siswa.

## B. PENGUATAN SUMBER DAYA EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui aktivitas literasi kepada kelompok-kelompok strategis seperti bisnis, UMKM, calon pengantin, anggota komunitas. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa *training for trainers*, BIMTEK, pelatihan juga *workshop*. Selain itu, untuk mendorong kompetensi sumber daya, dilaksanakan pemberian beasiswa dan bantuan lainnya. Berikut adalah rekomendasi khusus dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia :

### S3E (Sertifikasi dan Standardisasi SDM Ekonomi Syariah) "Pembuatan Sertifikasi dan Standardisasi Sumber Daya Ekonomi dan Keuangan syariah"

merujuk pada proses penilaian dan penentuan standar untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah. Program ini melibatkan pengembangan dan penerapan standar kualifikasi, kompetensi, dan keterampilan yang diperlukan dalam ekonomi syariah. Proses sertifikasi melibatkan pengujian dan evaluasi terhadap individu atau organisasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan untuk kegiatan yang mencakup Ekonomi Syariah. Standardisasi ini mencakup pembuatan dan penerapan pedoman atau aturan yang harus dipatuhi oleh individu atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, Sertifikasi dan Standardisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keterampilan yang sesuai, serta untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang ada memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

Upaya lainnya dalam peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat adalah melalui penyusunan konten khutbah dan pelatihan khotib Jumat. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan pesan-pesan ekonomi syariah dalam khutbah Jumat, sehingga jamaah dapat memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan mereka. Penyusunan konten khutbah mencakup isu-isu penting seperti zakat, wakaf, keuangan syariah, dan konsep halal.

Konten yang disusun akan disampaikan kepada khotib melalui pelatihan intensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan materi ekonomi syariah dengan cara yang mudah dipahami dan menarik bagi jamaah. Materi ini juga akan didistribusikan melalui berbagai media, baik cetak seperti buku khutbah maupun digital seperti video dan podcast, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Tabel 14 *Monitoring Implementasi Program Penguatan SDM*

Kegiatan	PIC	Keterangan
<i>Training for Trainers</i> (ToT), BIMTEK, <i>Workshop</i> , dan Pelatihan Ekonomi Syariah	KNEKS, Kementerian Agama, BI, OJK	Program literasi dan peningkatan kompetensi ekonomi syariah untuk kelompok strategis seperti pelaku bisnis, UMKM, calon pengantin, dan komunitas. Kegiatan mencakup ToT, BIMTEK, <i>workshop</i> , dan pelatihan reguler.
S3E (Sertifikasi dan Standardisasi SDM Ekonomi Syariah)	KNEKS, Lembaga Sertifikasi Syariah, BNSP	Program sertifikasi dan standardisasi SDM ekonomi syariah untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi pelaku ekonomi syariah, serta kepatuhan terhadap standar syariah yang berlaku.
Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pengembangan SDM	KNEKS, Baznas, Kementerian Agama, Kemendikbudristek	Program beasiswa dan bantuan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang ekonomi syariah, dengan fokus kepada komunitas strategis yang memerlukan penguatan kompetensi.
Penyusunan Konten dan Pelatihan Khotib	KNEKS, MUI, Kementerian Agama	Penyusunan konten khutbah terkait ekonomi syariah dan pelatihan bagi khotib Jumat untuk memperkuat literasi ekonomi syariah di masyarakat melalui khutbah.



## C. SOSIALISASI DAN DISEMINASI

Sosialisasi, diseminasi regulasi, dan *event* adalah langkah-langkah penting dalam memastikan pemahaman yang baik dan dukungan yang luas terhadap regulasi atau kebijakan yang diterapkan. Sosialisasi melibatkan upaya untuk mengenalkan regulasi atau kebijakan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan yang terpengaruh melalui berbagai cara, seperti pertemuan publik, seminar, atau kampanye informasi. Diseminasi regulasi merupakan proses penyebaran informasi tentang regulasi atau kebijakan kepada berbagai pihak terkait, baik itu lembaga pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat umum, menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi. Sementara itu, *event-event* seperti peluncuran regulasi baru, forum diskusi, atau acara penghargaan dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan. Melalui serangkaian kegiatan ini, diharapkan regulasi atau kebijakan yang diterapkan dapat diterima dengan baik dan dijalankan dengan efektif oleh semua pihak yang terlibat.

Penetapan target untuk setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam satu tahun diwajibkan untuk menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam minimal 10 kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan dan mengangkat isu/konten syariah.

Salah satu inisiatif strategis dan penting dalam konteks sosialisasi dan diseminasi ini adalah *Sharia Social Media Campaign*, sebuah kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah yang dirancang khusus untuk menjangkau audiens melalui *platform* media sosial menggunakan pendekatan *multiplatform* yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna di TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Dalam kampanye ini, konten yang dibuat bersifat berlapis, dimulai dari konsep dasar hingga konsep yang lebih mendalam, dengan format berseri untuk membangun pemahaman yang progresif di kalangan pengguna.

Melalui integrasi dari program-program sosialisasi langsung serta kampanye digital, diharapkan dapat ditargetkan untuk memaksimalkan kegiatan literasi dengan konten ekonomi dan keuangan syariah.

Pada lampiran terdapat daftar kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga.

Tabel 15 *Monitoring Implementasi Program Sosialisasi dan Diseminasi*

Kegiatan	PIC	Keterangan
<i>Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)</i>	BI	ISEF merupakan kegiatan <i>flagship</i> BI tahunan yang terdiri dari <i>Shari'ah forum</i> dan <i>Shari'ah fair</i> untuk mendorong literasi ekonomi syariah nasional.
Anugerah Adinata Syariah	KNEKS	Apresiasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi di Indonesia yang menunjukkan inisiatif dan upaya signifikan dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerah mereka. Penghargaan ini mencakup berbagai kategori yang mencerminkan ekosistem ekonomi syariah, seperti keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, ekonomi hijau dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi syariah di daerah, zona kuliner halal, aman dan sehat (Zona KHAS), inkubasi usaha syariah, serta inovasi dalam sektor ekonomi syariah.
<i>National Halal Fair</i>	KNEKS	Kampanye nasional yang diselenggarakan selama bulan Ramadhan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Acara ini mencakup berbagai kegiatan seperti bazar Ramadhan, pameran produk halal, pasar UMKM, dan festival Ramadhan yang berlangsung di berbagai lokasi seperti masjid-masjid besar dan tempat umum lainnya.
Konferensi <i>Annual Islamic Finance Conference (AIFC)</i>	Kemenkeu	Acara tahunan yang diadakan untuk membahas isu-isu terkini, perkembangan, dan inovasi dalam industri keuangan syariah. Diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia bersama dengan berbagai institusi akademik dan internasional, AIFC menjadi <i>platform</i> utama bagi akademisi, praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Konferensi ini mencakup presentasi penelitian, diskusi panel, dan berbagai sesi interaktif yang membahas topik-topik penting dalam keuangan syariah.
<i>Sharia Social Media Campaign</i>	KNEKS, BI, OJK	Kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui media sosial, menggunakan pendekatan <i>multiplatform</i> yang sesuai dengan karakteristik pengguna di TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Konten dibuat berlapis, berseri, serta kolaborasi dengan pakar dan <i>influencer</i> edukatif. Kampanye ini juga menggunakan gamifikasi, <i>polling</i> , dan kuis interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Kegiatan ini dapat juga disinergikan dengan kegiatan strategis K/L lainnya seperti kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK dan Bulan Pembiayaan Syariah oleh BI.

## D. PENGUATAN RISET

Melalui penguatan riset, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan kita. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung penelitian berkualitas, termasuk dana, infrastruktur, dan tenaga peneliti yang berkualifikasi. Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, penelitian tematik bertujuan untuk mengembangkan teori dan konsep baru, menguji model dan hipotesis, serta mengumpulkan dan menganalisis data primer yang relevan. Fokusnya adalah memprediksi tren dan perilaku faktor-faktor yang mendorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.

Selain itu, penguatan riset juga memerlukan kolaborasi antara lembaga penelitian, universitas, industri, dan pemerintah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menghasilkan solusi inovatif. Topik penelitian seperti "Evaluasi Dampak Jaringan Sosial terhadap Tingkat Kontak Inovasi" dan "Optimasi Pemasaran Multi-Saluran untuk Meningkatkan Tingkat Adopsi" adalah contoh dari bagaimana riset dapat secara langsung berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif dalam adopsi inovasi dan peningkatan interaksi sosial.

Dengan penguatan riset yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan dasar pengetahuan yang kuat, mengembangkan teknologi yang lebih canggih, dan menemukan solusi yang berkelanjutan untuk masalah kompleks yang dihadapi oleh dunia saat ini.

Tabel 16 *Monitoring Implementasi Strategi Penguatan Riset*

Kegiatan	PIC	Keterangan
Pelaksanaan riset ekonomi syariah tematik ( <i>policy based research</i> )	KNEKS, BI, BRIN, OJK, BPS, Kemendikbud Ristek, Kemenkeu	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan konsep baru, menguji model dan hipotesis, serta mengumpulkan dan menganalisis data primer terkait literasi ekonomi dan keuangan syariah. Juga memprediksi tren dan perilaku faktor-faktor yang mendorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.







## 3.2. PROGRAM PENINGKATAN INKLUSI

---

Peningkatan inklusi keuangan melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan setara bagi semua orang dalam berbagai aspek.

---

Peningkatan inklusi merujuk pada usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan menerima terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan atau keunikan mereka. Inklusi keuangan adalah konsep yang memastikan bahwa individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka—seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi—yang disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut World Bank (2023), inklusi keuangan berarti bahwa semua orang dan bisnis memiliki akses ke layanan keuangan yang berguna dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka.

Tujuan utamanya adalah menyediakan akses ke layanan keuangan yang berharga yang dapat meningkatkan peluang ekonomi dan ketahanan, serta secara signifikan berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas.

Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang bertanggung jawab dan terjangkau, inklusi keuangan dapat membantu mengurangi kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, dengan membangun ketahanan terhadap guncangan finansial, inklusi keuangan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (CGAP 2022).

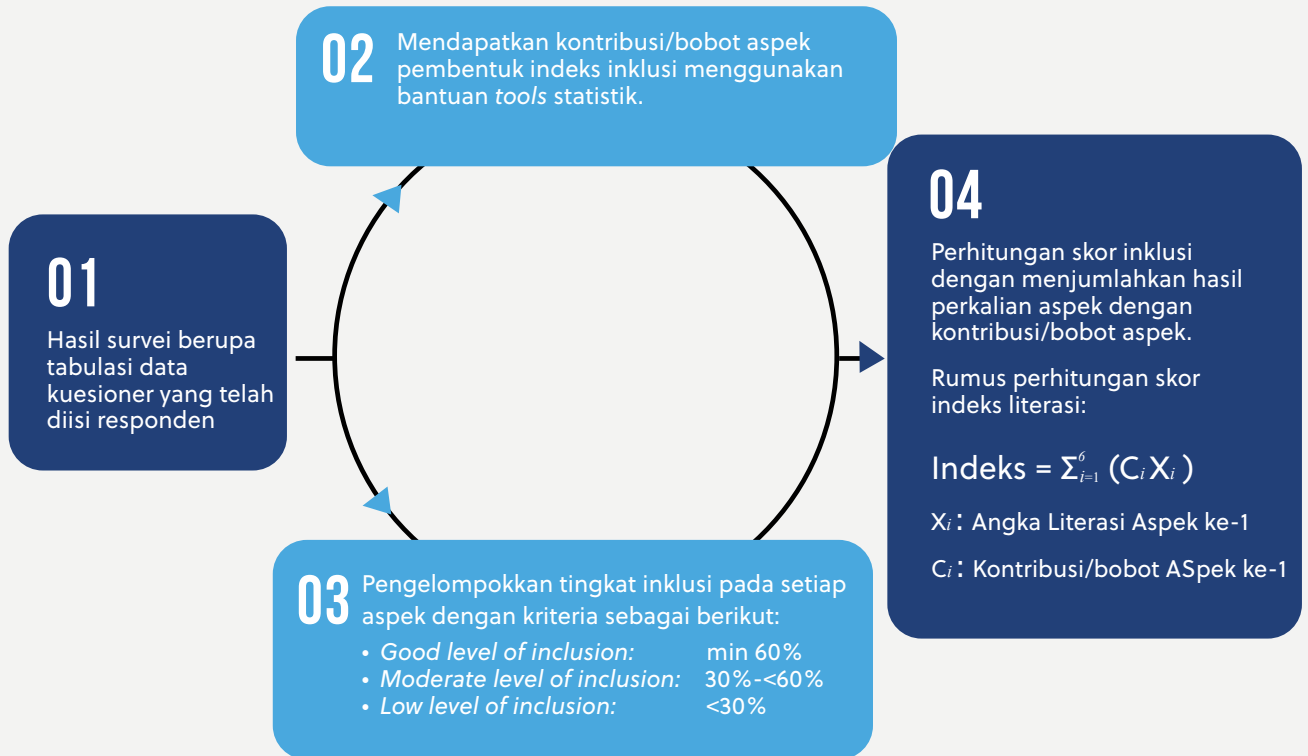
Peningkatan inklusi keuangan melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan setara bagi semua orang dalam berbagai aspek. Hal ini mencakup promosi kesetaraan hak dan peluang bagi semua individu, termasuk mereka yang mungkin menghadapi hambatan fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi. Ini juga melibatkan pendekatan yang berpusat pada keberagaman dan pengakuan akan nilai-nilai unik yang dibawa oleh setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan inklusi tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berdaya bagi semua orang, tetapi juga memperkaya masyarakat secara keseluruhan.

Inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara inklusi ekonomi syariah merupakan kondisi yang mencerminkan ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan serta produk halal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

# Metode Pengukuran Inklusi

Pengukuran tingkat inklusi ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui dua metode utama yaitu pelaksanaan survei dan *proxy* melalui observasi dan analisis data sekunder (*statistical dan big data analysis*).

## A. SURVEI INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Gambar 25 Metodologi Pengukuran Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Survei

Berdasarkan Gambar 25, metodologi pengukuran inklusi ekonomi dan keuangan syariah melalui survei dilakukan sebagai berikut:

01. Survei dilakukan melalui kuesioner yang disebar kepada responden melalui *random sampling* pada daerah yang terekspos oleh sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah
02. Berdasarkan survei tersebut, kontribusi/bobot aspek pembentuk indeks inklusi didapatkan melalui metodologi statistik.
03. Tingkat inklusi pada setiap aspek penilaian dengan kriteria responden dinilai dengan *range*:
  - *Good level of inclusion*: min 60%
  - *Moderate level of inclusion*: 30%-<60%
  - *Low level of inclusion*: <30%
04. Perhitungan skor inklusi didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian aspek penilaian dengan bobot penilaian.

## B. ANALISIS PROKSI MELALUI *BIG DATA ANALYTICS*

Inklusi ekonomi dan keuangan syariah dalam masyarakat juga dapat diukur melalui analisis *big data* dari data sekunder yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan lembaga ZISWAF. Proses tersebut meliputi:

**i.**

### Pengumpulan Sumber Data

Mengumpulkan data dari bank syariah, lembaga mikrofinansial syariah, perusahaan *fintech* syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

**ii.**

### Klasifikasi Jenis Data

Melakukan tabulasi data yang diperlukan termasuk jumlah akun, frekuensi transaksi, jenis transaksi (penarikan, penyetoran, transfer), penggunaan kredit dan tabungan, serta data demografis pengguna. Proksi data sekunder ini dapat mencakup: aktivitas dan transaksi ZISWAF, transaksi keuangan dengan instrumen syariah, data penggunaan kalkulator ZIS, investasi syariah, dan sebagainya.

**iii.**

### Pengukuran Indikator

Dari data yang didapat, beberapa indikator dapat digunakan sebagai proksi inklusi, antara lain: Mengukur jumlah individu dan bisnis yang memiliki akses ke akun keuangan syariah, frekuensi transaksi per akun, *volume* transaksi per akun, proporsi penduduk yang menggunakan akun syariah untuk berbagai aktivitas keuangan yang syar'i, dan mengukur kualitas layanan keuangan syariah.

Indikator lain yang dapat diukur antara lain:

- i. Penetrasi Rekening Bank, Lembaga Keuangan Syariah, dan Lembaga ZISWAF: Persentase populasi yang memiliki rekening di lembaga keuangan syariah dan lembaga ZISWAF tercatat

---

- ii. Frekuensi Penggunaan Akun: Rata-rata jumlah transaksi per bulan per akun.

---

- iii. Frekuensi Penunaian ZIS: Rata-rata jumlah transaksi per akun per aktivitas ZIS

---

- iv. Penyebaran Geografis: Analisis akses dan penggunaan layanan keuangan dan dana sosial syariah di berbagai wilayah di Indonesia

---

Hal tersebut dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas pemetaan potensi ekonomi dan keuangan syariah, mengidentifikasi daerah penerima ZISWAF dengan lebih akurat dan tepat sasaran.



# Rencana Tindak Lanjut

Beberapa langkah aksi yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung strategi di atas adalah sebagai berikut.

## A. PERLUASAN JANGKAUAN AKSES PRODUK KEUANGAN SYARIAH

Perluasan jangkauan akses produk atau jasa ekonomi syariah merupakan langkah krusial untuk memperluas dampak positif ekonomi syariah terhadap masyarakat. Hal ini melibatkan serangkaian upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas produk atau jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keuangan syariah, asuransi syariah, dan produk-produk lainnya. Implementasi dari langkah-langkah ini memerlukan kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga (KL) yang memiliki program strategis masing-masing.

i.

### Akses Produk Keuangan Syariah Komersial

Akses ke produk keuangan syariah komersial mencakup berbagai layanan perbankan dan non-perbankan. Di sektor perbankan syariah, terdapat berbagai produk seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi syariah yang terus berkembang. Perbankan syariah telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam aset, dengan bank umum syariah (BUS) mencatat peningkatan aset menjadi Rp513,86 triliun pada tahun 2022 dari Rp441,79 triliun pada tahun 2021. Unit usaha syariah (UUS) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Selain itu, pasar modal syariah yang terdiri dari sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksadana syariah juga mengalami peningkatan, dengan total aset pasar modal syariah mencapai Rp1.427,48 triliun pada tahun 2022. Asuransi syariah, dengan produk-produk seperti asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kesehatan syariah, juga menjadi bagian penting dari akses keuangan syariah komersial.

ii.

### Akses Produk Keuangan Sosial Syariah

Selain produk komersial, akses ke produk keuangan sosial syariah juga penting. Ini mencakup pengembangan model bisnis keuangan sosial syariah yang dapat berfungsi sebagai alternatif pembiayaan syariah, seperti pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Hingga Desember 2023, total pengumpulan keuangan sosial melalui perbankan mencapai Rp741,45 miliar, meningkat 54% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana ini didominasi oleh zakat (62%), infak/sedekah (37%), dan DSKL/kemanusiaan (1%). Penyaluran dana keuangan sosial juga meningkat, mencapai Rp671 miliar pada tahun 2023. Inisiatif lain termasuk pengembangan aset wakaf produktif melalui lembaga internasional seperti APIF-IsDB, pengembangan LP3AW, pengembangan Indonesia *Sovereign Waqf Fund* atau Bank Wakaf, serta pengembangan model bisnis Mustahik Naik Kelas, CWLS, dan *Sukuk linked wakaf*, dan lain-lain.

Langkah-langkah konkrit dalam perluasan jangkauan akses produk keuangan syariah ini meliputi pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi syariah, dan pemberdayaan pelaku usaha syariah seperti koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah. Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan insentif dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah. Program strategis dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) seperti OJK, BI, dan KNEKS memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini. Misalnya, BI mendukung stabilitas dan inklusi keuangan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial yang kondusif, sementara OJK mengawasi dan mengatur sektor keuangan syariah komersial antara lain perbankan dan asuransi syariah.

KNEKS mendorong inovasi produk dan layanan, serta memperluas akses melalui *digital banking* dan *fintech* syariah. Melalui perluasan jangkauan akses ini, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi syariah, sementara ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga dengan program strategis masing-masing akan memastikan implementasi yang efektif dan pencapaian tujuan bersama dalam memperkuat keuangan syariah di Indonesia. Tabel di bawah ini merangkum beberapa kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah yang merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai K/L terkait.

**Tabel 17 Monitoring Implementasi Strategi Perluasan Jangkauan Akses Keuangan Syariah**

Kegiatan	PIC	Keterangan
Penguatan integrasi keuangan syariah-ZISWAF pada UMKM industri halal dan ekosistem industri halal berbasis komunitas, pesantren, ormas Islam, perdesaan	ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, Kemenag, Kemenperin, BI, LPS,OJK, Kemenkop UKM	Upaya strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan syariah dan dana sosial syariah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM halal. Langkah ini diambil untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.
Pameran produk Indonesia di pasar luar negeri yang potensial	ME KNEKS, KDEKS	Acara atau kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan Indonesia kepada pasar internasional.
Penguatan industri halal nasional untuk produk substitusi impor	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin	Upaya untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan industri dalam memproduksi barang dan layanan yang memenuhi standar halal, sehingga dapat menggantikan produk impor yang saat ini mendominasi pasar dalam kategori yang sama.
Penerapan ekonomi hijau pada rantai nilai industri halal	ME KNEKS, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenag, BI	Penerapan ekonomi hijau dalam industri halal melibatkan integrasi praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga distribusi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memastikan keberlanjutan produk halal.
Pembangunan ekosistem ekspor produk halal yang terintegrasi dengan hilirisasi industri halal	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin	Strategi untuk mengembangkan infrastruktur dan proses yang mendukung ekspor produk halal Indonesia secara lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan nilai tambah produk halal melalui proses hilirisasi ( <i>downstream process</i> ) dan membangun sistem yang mendukung seluruh rantai nilai ekspor.

## B. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK/ JASA HALAL YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Peningkatan penggunaan produk atau jasa ekonomi syariah menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Langkah ini melibatkan upaya untuk memperluas kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat ekonomi syariah serta kecocokan dengan nilai-nilai mereka. Pemberdayaan lembaga-lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha syariah menjadi penting untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam mempercepat peningkatan penggunaan produk atau jasa ekonomi syariah. Dengan meningkatnya aksesibilitas dan pilihan yang lebih luas, diharapkan masyarakat akan semakin memilih untuk menggunakan produk atau jasa ekonomi syariah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 18 *Monitoring* Implementasi Strategi Penggunaan Produk/Jasa Halal

Kegiatan	PIC	Keterangan
Peningkatan penggunaan produk dan jasa yang bersertifikasi halal.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin, BPJPH	Merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang semakin meningkat terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sertifikasi halal mengacu pada proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal independen untuk memastikan bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan.



# 3.3. PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

## PILAR 3: PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Penguatan infrastruktur pendukung adalah upaya untuk memperkuat dan meningkatkan sistem dasar yang mendukung berbagai aktivitas dan layanan untuk mencapai peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini mencakup pembangunan, perawatan, dan peningkatan infrastruktur fisik serta digital. Tujuan utama dalam penguatan infrastruktur pendukung adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan aktivitas ekonomi dan sosial berjalan lancar dalam meningkatkan aksesibilitas, serta meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Beberapa langkah aksi yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung strategi diatas adalah sebagai berikut.

- a. Strategi Komunikasi
- b. Pedoman, Ketentuan atau Undang-Undang
- c. Digitalisasi
- d. Kawasan/zona
- e. Persepsi Positif (*Branding*)



## A. STRATEGI KOMUNIKASI

Media atau *platform* komunikasi memainkan peran krusial dalam mempromosikan pemahaman dan penerimaan terhadap produk atau jasa ekonomi syariah. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu *platform* yang paling berpengaruh dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Melalui kampanye edukasi yang terarah dan kreatif, informasi tentang produk dan jasa ekonomi syariah dapat dijangkau oleh pengguna yang lebih luas. Selain media sosial, kerjasama dengan media massa konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar juga tetap penting dalam mencapai berbagai segmen masyarakat. Penggunaan konten multimedia yang menarik seperti video, infografis, dan cerita inspiratif dapat membantu memperjelas konsep-konsep yang kompleks dan membuat informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan memanfaatkan media dan *platform* komunikasi dengan bijak, dapat diciptakan kesadaran yang lebih besar tentang ekonomi syariah dan memperluas basis penggunaannya di masyarakat.

Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES) merupakan *dashboard* data ekonomi dan keuangan syariah terintegrasi yang menyajikan informasi komprehensif dan analisis yang berkualitas bagi industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, data ekonomi dan keuangan syariah masih tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga dibutuhkan suatu pusat data yang bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah secara publik. Selain itu, pusat data ini dapat menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan, sarana pemantauan, dan evaluasi kinerja serta kemajuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi ketua, ketua harian, sekretaris, dan anggota KNEKS.

PSD (Perpustakaan Syariah Digital) adalah *platform* digital yang menyediakan akses kepada berbagai sumber informasi dan literatur tentang studi syariah. Ini mencakup berbagai macam materi seperti buku, jurnal, makalah, riset, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam Islam. PSD menyediakan akses *online* terhadap berbagai sumber informasi, literatur, dan konten berkaitan dengan ilmu syariah dengan minimal dua bahasa. Keberadaan PSD memungkinkan para peneliti, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mengakses informasi yang relevan dengan mudah dan efisien, serta memfasilitasi penyebaran pengetahuan dalam bidang studi Islam dan syariah secara luas dan merata.

KPJN (Kunjungan dan Pertukaran Jurnalis Negara) adalah inisiatif yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara jurnalis dari berbagai negara untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Program ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan jurnalis ke negara-negara dengan pengembangan ekonomi syariah yang maju, serta pertukaran pengalaman antar jurnalis dari berbagai media, dengan tujuan memperluas wawasan dan pemahaman tentang praktik ekonomi syariah secara global. Program KPJN melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk kunjungan ke redaksi media lokal, wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat atau politik setempat, partisipasi dalam acara atau konferensi terkait, serta pertemuan informal untuk bertukar pengalaman. Melalui KPJN, diharapkan para jurnalis dapat memperluas wawasan mereka, meningkatkan kualitas liputan berita mereka, dan memperkuat jejaring profesional mereka, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pembaca dan pemirsa, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Tabel 19 *Monitoring* Implementasi Strategi Komunikasi

Kegiatan	PIC	Keterangan
PDES (Pusat Data Ekonomi Syariah)	ME KNEKS, BPS	Inisiatif yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi masalah data yang tersebar dan bervariasi dalam pengelolaan data ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
KPJN (Kunjungan dan Pertukaran Jurnalis Negara)	ME KNEKS, Kominfo, Kemenlu	Inisiatif yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara jurnalis dari berbagai negara untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
PSD (Perpustakaan Syariah Digital)	ME KNEKS, Perpustakaan Nasional	<i>Platform</i> digital yang menyediakan akses ke berbagai sumber informasi dan literatur mengenai studi syariah. Melalui layanan ini, pengguna dapat mengakses buku, artikel, jurnal, dan dokumen digital lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

## B. PEDOMAN, KETENTUAN, ATAU UNDANG-UNDANG

Dalam upaya mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dukungan melalui regulasi nasional menjadi sangat penting. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, sebagaimana ditunjukkan dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

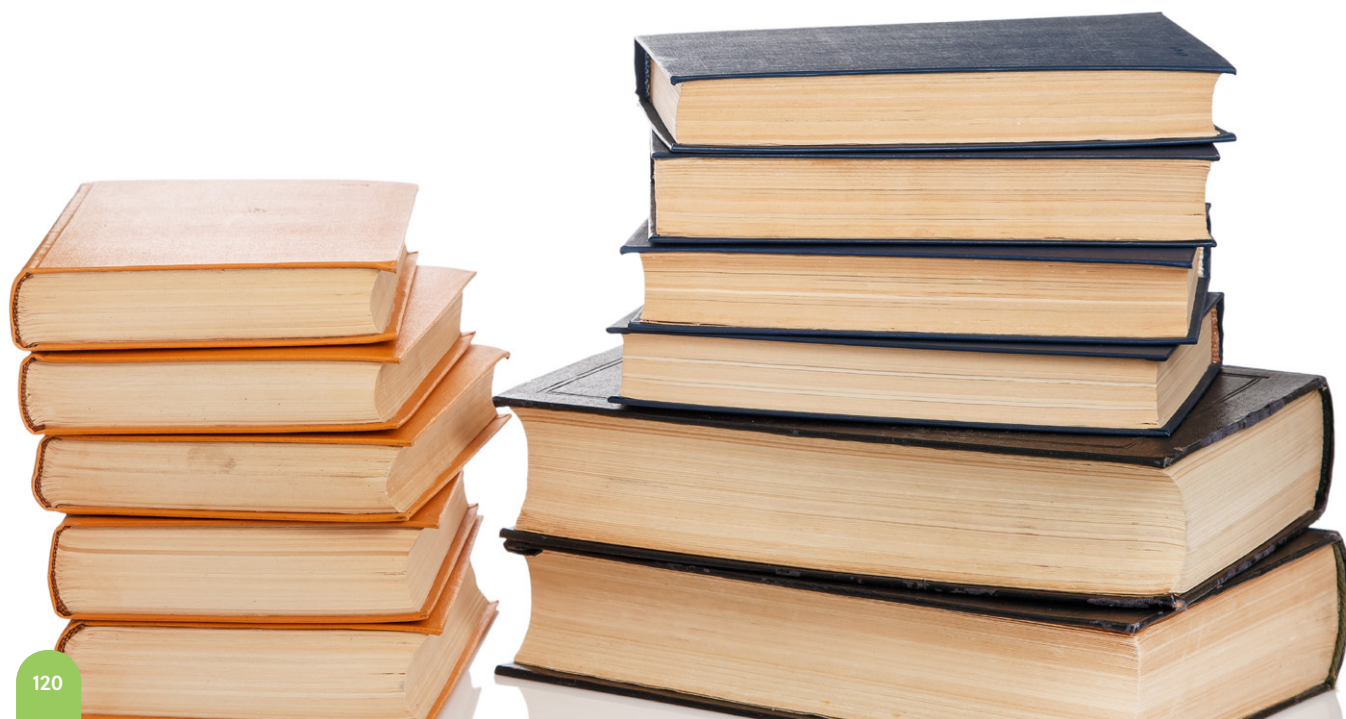
Regulasi terkait juga berfungsi sebagai pedoman implementasi program-program literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan

lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), mendukung strategi pemerintah dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Dengan adanya undang-undang, sektor ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi yang jelas akan memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah yang ditawarkan adalah sesuai dengan prinsip syariah sehingga menambah keyakinan masyarakat terhadap keuangan syariah.

Tabel 20 *Monitoring* Implementasi Penguatan Pedoman, Ketentuan, dan Undang-Undang

Kegiatan	PIC	Keterangan
Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan sektor UMKM, kewirausahaan dan industri termasuk wajib sertifikasi halal sesuai ketentuan.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin, Kemenkop UKM	Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor-sektor tersebut.
Perlu dilakukan pemantauan implementasi SOP standar layanan, biaya dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan regulator untuk masing-masing jenis Lembaga Keuangan syariah (Perbankan Syariah, IKNB, Pasar Modal, dll).	ME KNEKS, KDEKS, BI, LPS, OJK	Kegiatan krusial dalam memastikan transparansi, kepatuhan, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah. Hal ini melibatkan langkah-langkah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), biaya layanan, serta kebijakan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh regulator.
Penguatan pedoman/ ketentuan/ UU berkaitan dengan keuangan sosial syariah (salah satunya untuk mendorong inklusi ekonomi syariah)	ME KNEKS, Kemenag, BWI, BAZNAS, Kemensos, DJPPR, Kemenkeu	Inisiatif untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan syariah



## C. DIGITALISASI

Digitalisasi telah menjadi kunci dalam transformasi ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi digital, banyak aspek kehidupan sehari-hari telah berubah secara signifikan. Dalam konteks ekonomi, digitalisasi memungkinkan proses bisnis menjadi lebih efisien dan terjangkau. Pelaku usaha dapat memanfaatkan *platform* digital untuk memasarkan produk dan jasa mereka kepada pasar yang lebih luas, mengelola inventaris, dan memperluas jangkauan distribusi.

Digitalisasi membuka peluang baru dalam hal inovasi dan kewirausahaan, dengan memfasilitasi pertumbuhan *startup* dan ekosistem bisnis yang dinamis. Di sisi sosial, digitalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan mengakses informasi. *Platform* media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, sementara pendidikan dan layanan kesehatan menjadi lebih dapat diakses secara *online*. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan baru terkait dengan keamanan data, privasi, dan ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa digitalisasi diarahkan pada penciptaan nilai yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Perluasan akses masyarakat terhadap produk dan transaksi keuangan berbasis digital dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Penelitian yang dilakukan oleh Liu (2021) menyimpulkan bahwa inklusi keuangan digital

berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Cina dan berpotensi meningkat pesat melalui dukungan pengembangan infrastruktur internet dan keuangan digital yang lebih mumpuni. Lyman dan Lauer (2015) mengemukakan bahwa inklusi keuangan digital memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan formal bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses.

Kemajuan teknologi saat ini menawarkan peluang untuk menciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Inisiatif seperti *digital banking* dan *fintech* yang dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumen—termasuk pembiayaan, pembukaan rekening baru, dan peluang investasi—dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas interaksi finansial. Di sisi lain, penerapan digitalisasi di sektor ekonomi juga merupakan keniscayaan untuk meningkatkan inklusi ekonomi syariah.

Perlu terus didorong kemudahan akses produk-produk halal bagi masyarakat. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui kerjasama dengan perusahaan swasta dalam peningkatan *platform e-commerce* baik industri halal maupun keuangan syariah secara digital. Pengembangan *platform e-commerce* khusus untuk produk halal dapat memudahkan konsumen untuk menemukan dan membeli produk halal secara *online*, dengan fitur utama penyediaan pencarian khusus untuk *supplier* produk halal dan informasi terperinci tentang sertifikasi halal.

Tabel 21 *Monitoring* Implementasi Penguatan Digitalisasi

Kegiatan	PIC	Keterangan
Pengembangan layanan digital keuangan syariah untuk <i>Islamic value chain finance</i> di sepanjang rantai nilai halal terintegrasi hulu-hilir	ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, BI, OJK, Kemenkop UKM, BPJPH, Kemenparekraf	Strategi untuk memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pembiayaan berbasis nilai Islam ( <i>Islamic value chain finance</i> ) dalam rangka mengintegrasikan seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal dari hulu sampai hilir. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan keuangan syariah di sektor industri halal.
Integrasi antara layanan digital keuangan syariah dengan <i>halal lifestyle</i>	ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, Kemenag, Kemenperin, BI, LPS, OJK, Kemenkop UKM	Upaya untuk menghubungkan teknologi digital dengan kebutuhan dan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal makanan, pakaian, pariwisata, dan produk lain yang memenuhi standar halal.

## D. PERSEPSI POSITIF (*BRANDING*)

Menurut Philip Kotler, *brand* atau merek merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang membedakannya dari yang lain. Dalam rangka mendukung literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, publik perlu mengetahui mengenai sebuah konsep kebaikan yang universal dan humanis. Konsep ini dapat membantu literasi dan inklusi ekonomi syariah untuk melakukan penetrasi kesadaran (*awareness*) dengan baik ke dalam benak publik. Hal ini dilakukan dengan "*mind conditioning*," yaitu usaha untuk mengkondisikan pikiran publik agar terkonsentrasi pada pesan tunggal, yaitu "Kebaikan untuk Semua," sehingga tercipta persepsi yang positif. Salah satu upaya untuk menciptakan persepsi yang positif tersebut adalah dengan menggunakan logo. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan logo ekonomi syariah secara konsisten dan masif.

Tabel 22 Monitoring Implementasi Penguatan Persepsi Positif/Branding

Kegiatan	PIC	Keterangan
Koordinasi dan sosialisasi logo ekonomi syariah melalui pembentukan tim komunikasi yang melibatkan seluruh K/L dan pemangku kepentingan terkait	ME KNEKS, KDEKS, BI, Kemenag, Kemenko Perekonomian, OJK, MUI, Kemenkeu, Kadin, dan Kemenko Marves	Strategi untuk meningkatkan pemahaman dan visibilitas mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini melibatkan kerjasama lintas sektor dan pihak-pihak terkait untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan logo serta menyebarkan informasi secara efektif kepada masyarakat luas.
Koordinasi dan kerja sama penggunaan logo ekonomi syariah. Rencana program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kegiatan</li> <li>• Implementasi logo</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	ME KNEKS, BI, Kemenag, Kemenko Perekonomian, OJK, MUI, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf, dan Kadin	Inisiatif strategis yang bertujuan untuk menyatukan penggunaan logo ekonomi syariah secara konsisten dan efektif di berbagai kegiatan dan inisiatif yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Analisis dasar hukum penggunaan logo ekonomi syariah (contoh: perbankan, produk halal, daerah wisata, dll)	ME KNEKS, BI, OJK, Kemenag, Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf, dan MUI	Program ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan legalitas serta kepatuhan dalam penggunaan logo ekonomi syariah di berbagai sektor seperti perbankan, produk halal, dan daerah wisata. Program ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan logo tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pembuatan <i>platform</i> khusus untuk mengenalkan logo ekonomi syariah ( <i>dashboard</i> )	ME KNEKS	Inisiatif untuk memberikan akses yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat terkait informasi dan pemahaman mengenai logo ekonomi syariah. <i>Platform</i> ini akan menyediakan berbagai fitur yang mendukung penyebaran informasi yang akurat, edukasi yang terkait dengan ekonomi syariah, dan mengelola penggunaan logo tersebut di berbagai sektor ekonomi.



## E. KAWASAN/ZONA

Pemilihan kawasan atau zona merupakan hal penting dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah. Kawasan ini biasanya merupakan wilayah geografis tertentu yang diidentifikasi dan diatur untuk mengembangkan industri halal dan keuangan syariah. Salah satu indikator utamanya adalah besarnya populasi muslim di daerah tersebut. Kawasan ini difasilitasi untuk mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal secara menyeluruh, serta menyediakan fasilitas keuangan syariah.

Peningkatan infrastruktur di kawasan atau zona ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi makanan, kosmetik, farmasi, dan lainnya, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan pengawasan mutu sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi pusat pelatihan, riset, dan pengembangan untuk industri halal, serta menjadi destinasi wisata halal bagi wisatawan yang mencari pengalaman dan produk sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya kawasan atau zona halal, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri halal dan keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong perdagangan internasional dalam bidang ekonomi syariah.

Tabel 23 *Monitoring* Implementasi Pengembangan Zona Halal

Kegiatan	PIC	Keterangan
Pengembangan kawasan bahan baku substitusi nonhalal untuk industri pengolahan makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin, BPJPH, dan Kemenparekraf	Langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal bagi konsumen muslim.



# 3.4.

## RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI), interaksi antara berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mengimplementasikan berbagai program strategis menjadi sangat krusial. Tabel berikut ini disusun untuk merinci unsur-unsur penting yang mencakup Strategi Utama, Program Utama, Rencana Aksi (*Action Plan*), Indikator Kinerja Utama (KPI), dan Penanggung Jawab (PIC) program.

### A. PROGRAM PENINGKATAN LITERASI

Tabel-tabel berikut ini disusun untuk merinci unsur-unsur penting yang mencakup Strategi Utama, Kegiatan, Rencana Aksi (*Action Plan*), Indikator Kinerja Utama (KPI), dan Penanggung Jawab (PIC) program.

Selain itu, tabel-tabel tersebut telah disesuaikan dengan 4 variabel pemodelan (ref: sub bab 2.4), yaitu:

1. Peningkatan efektivitas kampanye ekonomi syariah
2. Katalisasi interaksi masyarakat untuk meningkatkan paparan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah
3. Simplifikasi konsep ekonomi dan keuangan syariah
4. Edukasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat usia muda.

Penyesuaian ini memastikan bahwa setiap kegiatan strategis selaras dengan tujuan utama untuk memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Tabel 24 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam peningkatan literasi melalui kegiatan peningkatan efektifitas kampanye ekonomi syariah.

Tabel 24 *Action Plan* & KPI Peningkatan Efektifitas Kampanye Ekonomi Syariah  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. <i>Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)</i>	ISEF merupakan kegiatan <i>flagship</i> BI tahunan yang terdiri dari Shari'ah forum dan Shari'ah fair untuk mendorong literasi ekonomi syariah nasional.	BI	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah peserta yang hadir 2. Jumlah pembicara dan panelis 3. Jumlah peserta pameran 4. Jumlah pembicara dan narasumber 5. Tingkat kepuasan peserta 6. Jumlah publikasi media 7. Jumlah partisipasi kompetisi 8. Umpan balik pasca-acara
			1. Pembentukan Panitia						
			2. Penetapan Tujuan dan Tema Acara						
			3. Penjadwalan dan Lokasi						
			<b>Pengembangan Program dan Konten :</b>						
			1. Pemilihan Pembicara dan Panelis						
			2. Pengembangan Materi Seminar dan Konferensi						
			3. Penyusunan Pameran Produk dan Jasa Syariah						
			4. Kompetisi Ekonomi Syariah						
			5. Promosi dan Pemasaran						
			6. Kolaborasi <i>Media partner</i>						
			<b>Pelaksanaan Acara, Evaluasi dan Tindak Lanjut:</b>						
			1. Pelaksanaan Seminar, Konferensi, Pameran, dan Kompetisi						
			2. Evaluasi Pasca-Acara						
3. Publikasi Hasil dan Laporan Akhir									
2. <i>National Halal Fair</i>	Kampanye nasional yang diselenggarakan selama bulan Ramadhan oleh KNEKS. Acara ini mencakup berbagai kegiatan seperti bazar Ramadhan, pameran produk halal, pasar UMKM, dan festival Ramadhan yang berlangsung di berbagai lokasi seperti masjid-masjid besar dan tempat umum lainnya.	KNEKS	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah provinsi yang berpartisipasi 2. Jumlah peserta yang hadir 3. Jumlah pembicara dan panelis 4. Jumlah peserta pameran 5. Tingkat kepuasan peserta 6. Jumlah publikasi media 7. Umpan balik positif
			1. Pembentukan Panitia						
			2. Penetapan Tujuan dan Tema Acara						
			3. Penjadwalan dan Lokasi						
			<b>Pengembangan Program dan Konten :</b>						
			1. Pemilihan Pembicara dan Panelis						
			2. Pengembangan Materi Seminar dan <i>Workshop</i>						
			3. Penyusunan Pameran Produk Halal						
			4. Kompetisi dan Kegiatan Edukatif						
			5. Promosi dan Pemasaran						
			6. Kolaborasi <i>media partner</i>						
			<b>Pelaksanaan Acara, Evaluasi dan Tindak Lanjut:</b>						
			1. Pelaksanaan Seminar, <i>Workshop</i> , Pameran, dan Kompetisi						
			2. Evaluasi Pasca Acara						
3. Publikasi Hasil dan Laporan Akhir									

(Lanjutan) Tabel 24 *Action Plan* & KPI Peningkatan Efektifitas Kampanye Ekonomi Syariah

**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
<b>3. Sharia Social Media Campaign</b>	Kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui media sosial, menggunakan pendekatan <i>multiplatform</i> yang sesuai dengan karakteristik pengguna di TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Konten dibuat berlapis, berseri, serta kolaborasi dengan pakar dan <i>influencer</i> edukatif. Kampanye ini juga menggunakan gamifikasi, <i>polling</i> , dan kuis interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.	KNEKS, BI, OJK	<b>Perencanaan dan Persiapan :</b>	■		■			1. Jumlah total views dan <i>engagement rate</i> per <i>platform</i> (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook). 2. Jumlah interaksi pengguna ( <i>polling</i> , kuis, gamifikasi). 3. Jumlah <i>follower/ subscriber</i> baru yang diperoleh. 4. Jumlah konten yang diproduksi dan distribusi <i>multiplatform</i> . 5. Jumlah <i>influencer</i> dan pakar yang berkolaborasi. 6. Umpan balik positif dari pengguna dan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.
			1. Penelitian tentang perilaku dan demografi pengguna media sosial	■		■			
			2. Identifikasi topik dan tema kampanye	■		■			
			3. Kolaborasi dengan <i>influencer</i> syariah dan pakar edukasi keuangan	■		■			
			4. Pengembangan strategi konten <i>multiplatform</i> (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook)	■		■			
			5. Penyusunan konten awal, termasuk artikel, video, infografis, dan <i>polling</i> interaktif	■		■			
			<b>Implementasi dan Pengembangan Konten :</b>	■		■			
			1. Peluncuran kampanye <i>multiplatform</i>	■		■			
			2. Penjadwalan konten secara teratur dan konsisten di semua <i>platform</i>	■		■			
			3. Pelaksanaan <i>polling</i> , kuis interaktif, dan gamifikasi untuk meningkatkan <i>engagement</i>	■		■			
			4. <i>Monitoring</i> keterlibatan pengguna dan penyesuaian konten berdasarkan data analitik	■		■			
			5. Kolaborasi berkelanjutan dengan <i>influencer</i> , pakar ekonomi syariah, dan mitra media sosial	■		■			
			<b>Evaluasi dan Tindak Lanjut :</b>		■		■	■	
			1. Evaluasi keterlibatan pengguna dan efektivitas kampanye		■		■	■	
			2. Penyempurnaan konten berdasarkan umpan balik pengguna		■		■	■	
			3. Publikasi laporan hasil kampanye dan rekomendasi untuk kampanye berikutnya		■		■	■	



Tabel 25 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam peningkatan literasi melalui kegiatan katalisasi eksposur ekonomi dan keuangan syariah melalui interaksi masyarakat.

Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. Anugerah Adinata Syariah	Apresiasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi di Indonesia yang menunjukkan inisiatif dan upaya signifikan dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerah mereka. Penghargaan ini mencakup berbagai kategori yang mencerminkan ekosistem ekonomi syariah	KNEKS	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah provinsi yang berpartisipasi 2. Jumlah finalis yang dipilih 3. Tingkat kepuasan peserta 4. Jumlah publikasi media 5. Umpan balik positif 6. Implementasi best practices oleh provinsi lain
			1. Pembentukan Panitia						
			2. Penetapan Kriteria Penghargaan						
			3. Sosialisasi Program Penghargaan						
			<b>Pengembangan Program dan Konten :</b>						
			1. Pengajuan Kandidat						
			2. Evaluasi dan Penilaian						
			3. Seleksi Finalis						
			4. Penetapan Pemenang						
			<b>Pelaksanaan Acara, Evaluasi dan Tindak Lanjut:</b>						
			1. Pelaksanaan Acara Penghargaan						
2. Evaluasi dan Umpan Balik									
3. Publikasi Hasil dan Laporan Akhir									
2. <i>Training for Trainers</i> (ToT), BIMTEK, <i>Workshop</i> , dan Pelatihan Ekonomi Syariah	Program literasi dan peningkatan kompetensi ekonomi syariah untuk kelompok strategis seperti pelaku bisnis, UMKM, calon pengantin, dan komunitas. Kegiatan mencakup ToT, BIMTEK, <i>Workshop</i> , dan pelatihan reguler.	KNEKS, Kemen terian Agama, BI, OJK	<b>Perencanaan dan Persiapan :</b>						1. Jumlah kelompok sasaran yang dilatih 2. Tingkat kepuasan peserta 3. Peningkatan literasi dan keterampilan ekonomi syariah di lapangan 4. Jumlah kerjasama lembaga 5. Jumlah pelatihan yang terlaksana
			1. Identifikasi kelompok strategis						
			2. Penentuan target peserta (pelaku bisnis, UMKM, calon pengantin, komunitas)						
			3. Survei dan pemetaan kebutuhan pelatihan						
			4. Pendataan calon peserta dan pembentukan basis data						
			5. Pengembangan modul pelatihan berbasis syariah						
			6. Pengkajian literatur dan penyusunan kurikulum berbasis syariah						
			7. Diskusi dengan ahli syariah dan pakar ekonomi						
			8. Uji coba materi pada kelompok kecil ( <i>pilot test</i> )						
			9. Kerjasama dengan lembaga terkait						
			10. MoU dengan Kementerian Agama, BI, OJK, dan lembaga ekonomi syariah lainnya						
11. Penggalangan sumber daya dan dukungan dari sponsor									

(Lanjutan) Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
2. <i>Training for Trainers (ToT)</i> , BIMTEK, <i>Workshop</i> , dan Pelatihan Ekonomi Syariah	Program literasi dan peningkatan kompetensi ekonomi syariah untuk kelompok strategis seperti pelaku bisnis, UMKM, calon pengantin, dan komunitas. Kegiatan mencakup ToT, BIMTEK, <i>Workshop</i> , dan pelatihan reguler.	KNEKS, Kementerian Agama, BI, OJK	<b>Pelaksanaan Program :</b>						1. Jumlah kelompok sasaran yang dilatih 2. Tingkat kepuasan peserta 3. Peningkatan literasi dan keterampilan ekonomi syariah di lapangan 4. Jumlah kerjasama lembaga 5. Jumlah pelatihan yang terlaksana
			1. Pelaksanaan pelatihan & ToT						
			2. Implementasi pelatihan secara bertahap di berbagai wilayah						
			3. Peningkatan kapasitas fasilitator melalui ToT						
			4. Penggunaan <i>platform</i> digital untuk pembelajaran daring ( <i>online</i> )						
			5. <i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan						
			6. Survei kepuasan peserta pasca pelatihan						
			7. Evaluasi ketercapaian tujuan dan dampak langsung pelatihan.						
			8. Pemutakhiran materi sesuai perkembangan						
			9. <i>Review</i> dan <i>update</i> modul sesuai perubahan regulasi syariah dan tren ekonomi						
			<b>Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan :</b>						
			1. Pelaksanaan evaluasi dampak pelatihan pada penerapan ekonomi syariah di lapangan						
			2. Peninjauan dampak pada bisnis peserta (penerapan ekonomi syariah)						
			3. Pelaksanaan FGD dengan alumni pelatihan						
			4. Penyusunan laporan akhir mengenai pencapaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan program						
5. Pengembangan pelatihan yang berkelanjutan									

(Lanjutan) Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
3. S3E (Sertifikasi dan Standardisasi SDM Ekonomi Syariah)	Program sertifikasi dan standardisasi SDM ekonomi syariah untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi pelaku ekonomi syariah, serta kepatuhan terhadap standar syariah yang berlaku.	KNEKS, Lembaga Sertifikasi Syariah, BNSP	<b>Perencanaan dan Persiapan :</b>						1. Jumlah SDM tersertifikasi  2. Tingkat kepuasan peserta sertifikasi  3. Kesesuaian kompetensi SDM dengan standar syariah  4. Jumlah standar yang diterapkan
			1. Pembentukan komite standardisasi						
			2. Pembentukan tim kerja yang terdiri dari pakar ekonomi syariah, akademisi, dan praktisi industri						
			3. Penyusunan TOR ( <i>Term of Reference</i> ) dan SOP komite						
			4. Pengembangan standar kompetensi SDM ekonomi syariah						
			5. Konsultasi dengan industri dan lembaga sertifikasi internasional						
			6. Penyusunan kerangka standar kompetensi ekonomi syariah (kualifikasi SDM, pengetahuan syariah, dan keterampilan teknis).						
			7. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi						
			8. Negosiasi dan MoU dengan lembaga sertifikasi nasional dan internasional						
			<b>Pelaksanaan Program :</b>						
			1. Pelaksanaan sertifikasi						
			2. Peluncuran program sertifikasi di 5 wilayah <i>pilot project</i>						
			3. Penggunaan <i>platform e-learning</i> dan ujian <i>online</i>						
			4. Evaluasi kualitas SDM yang tersertifikasi						
			5. Survei dampak sertifikasi pada pengembangan karir dan kepatuhan syariah di perusahaan						
			6. Penyempurnaan standar kompetensi						
			7. Penyesuaian standar berdasarkan umpan balik dari industri dan alumni sertifikasi						
			<b>Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan :</b>						
			1. Pengembangan sertifikasi lanjutan untuk jenjang SDM lebih tinggi (manajer, direktur)						
			2. Laporan dampak jangka panjang sertifikasi terhadap industri ekonomi syariah nasional						

(Lanjutan) Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI	
				1	2	3	4	5		
4. Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pengembangan SDM	Program beasiswa dan bantuan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang ekonomi syariah, dengan fokus kepada komunitas strategis yang memerlukan penguatan kompetensi.	KNEKS, Kemen dikbud ristek Baznas, Kemen terian Agama	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah beasiswa yang diberikan  2. Peningkatan kompetensi SDM penerima  3. Dampak pada usaha atau karier penerima beasiswa  4. Evaluasi keberhasilan program yang menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan SDM di bidang ekonomi syariah.	
			1. Identifikasi kelompok penerima beasiswa							
			2. Survei kebutuhan dan seleksi target penerima beasiswa dari komunitas							
			3. Penentuan kriteria seleksi							
			4. Penyusunan kriteria berdasarkan kebutuhan ekonomi syariah dan kebijakan pemerintah							
			5. Penyusunan program beasiswa							
			6. Pengembangan program beasiswa berbasis pendidikan formal dan informal (kursus/ sertifikasi)							
			<b>Pelaksanaan Program :</b>							
			1. Proses seleksi calon penerima beasiswa secara terbuka dan transparan							
			2. Pemberian beasiswa kepada penerima terpilih							
			3. <i>Monitoring</i> perkembangan penerima beasiswa							
			4. <i>Monitoring</i> perkembangan akademik dan profesional dari penerima							
			5. Pelaksanaan mentoring dan bimbingan berkala							
			<b>Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan :</b>							
			1. Evaluasi dampak program beasiswa terhadap pengembangan SDM							
			2. Survei dampak beasiswa terhadap peningkatan karir dan kontribusi penerima di ekonomi syariah							
			3. Penyesuaian program untuk tahun berikutnya							
			4. Review dan revisi kriteria seleksi dan program beasiswa							



(Lanjutan) Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
5. Penyusunan Konten dan Pelatihan Khotib	Penyusunan konten khutbah terkait ekonomi syariah dan pelatihan bagi khotib Jumat untuk memperkuat literasi ekonomi syariah di masyarakat melalui khutbah.	KNEKS, MUI, Kementerian Agama	<b>Perencanaan dan Persiapan :</b>						1. Jumlah khotib yang dilatih 2. Jumlah konten khutbah yang disebarakan 3. Tingkat kepuasan khotib terhadap pelatihan 4. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap khutbah ekonomi syariah 5. Dampak terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah 6. Jumlah wilayah yang tercakup oleh program pelatihan
			1. Penyusunan kurikulum dan konten khutbah						
			2. Identifikasi isu-isu ekonomi syariah yang relevan melalui kajian literatur dan konsultasi dengan pakar syariah serta tokoh agama						
			3. Pengembangan konten khutbah dengan tema yang mencakup pengelolaan keuangan pribadi, prinsip halal, keadilan ekonomi, serta literasi zakat dan wakaf.						
			4. Penyusunan pedoman khutbah dalam format cetak dan digital, dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah umum						
			5. Identifikasi khotib						
			6. Identifikasi khotib potensial dari kalangan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan komunitas berbasis ekonomi syariah di berbagai wilayah.						
			7. Pemilihan khotib berdasarkan kriteria kemampuan komunikasi, pemahaman prinsip ekonomi syariah, dan pengaruh di komunitas.						
			8. Pembentukan jaringan khotib yang siap menerima pelatihan dan penyebaran materi.						

(Lanjutan) Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
5. Penyusunan Konten dan Pelatihan Khotib	Penyusunan konten khutbah terkait ekonomi syariah dan pelatihan bagi khotib Jumat untuk memperkuat literasi ekonomi syariah di masyarakat melalui khutbah.	KNEKS, MUI, Kementerian Agama	<b>Pelaksanaan Program :</b>						1. Jumlah khotib yang dilatih 2. Jumlah konten khutbah yang disebar 3. Tingkat kepuasan khotib terhadap pelatihan 4. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap khutbah ekonomi syariah 5. Dampak terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah 6. Jumlah wilayah yang tercakup oleh program pelatihan
			1. Pelatihan khotib di berbagai wilayah						
			2. Pelaksanaan pelatihan di 10 provinsi dengan prioritas wilayah yang memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi syariah.						
			3. Pengembangan modul pelatihan untuk khotib dengan fokus pada teknik penyampaian pesan yang menarik, relevansi materi ekonomi syariah, dan pembinaan komunitas.						
			4. Penggunaan media audio-visual dan praktik langsung dalam pelatihan khotib untuk meningkatkan efektivitas penyampaian.						
			5. Penyebaran konten khutbah						
			6. Distribusi materi khutbah melalui <i>platform digital</i> (aplikasi <i>mobile</i> , situs web) dan media cetak (buku panduan khutbah) kepada khotib di berbagai wilayah.						
			7. Penyebaran konten khutbah melalui video khutbah singkat di media sosial, seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, untuk menjangkau jamaah lebih luas.						
			8. Kolaborasi dengan radio dan TV lokal untuk menyiarkan khutbah bertema ekonomi syariah.						

(Lanjutan) Tabel 25 *Action Plan* & KPI Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat  
**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
5. Penyusunan Konten dan Pelatihan Khotib	Penyusunan konten khutbah terkait ekonomi syariah dan pelatihan bagi khotib Jumat untuk memperkuat literasi ekonomi syariah di masyarakat melalui khutbah.	KNEKS, MUI, Kementerian Agama	<b>Monitoring dan Evaluasi Program :</b>						1. Jumlah khotib yang dilatih 2. Jumlah konten khutbah yang disebarkan 3. Tingkat kepuasan khotib terhadap pelatihan 4. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap khutbah ekonomi syariah 5. Dampak terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah 6. Jumlah wilayah yang tercakup oleh program pelatihan
			1. <i>Monitoring</i> dan evaluasi efektivitas konten khutbah						
			2. Pelaksanaan survei <i>online</i> dan <i>offline</i> kepada jamaah untuk mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman mereka terhadap materi khutbah ekonomi syariah.						
			3. Analisis data survei untuk mengevaluasi apakah konten khutbah telah efektif meningkatkan literasi ekonomi syariah dan memotivasi praktik ekonomi syariah di komunitas.						
			4. Penilaian dampak terhadap literasi ekonomi syariah di kalangan jamaah						
			5. Fokus grup diskusi (FGD) dengan khotib, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat untuk menilai dampak khutbah dalam membentuk perilaku ekonomi syariah.						
			6. Penyusunan laporan akhir mengenai efektivitas pelatihan dan penyebaran konten khutbah, serta rekomendasi pengembangan program untuk masa depan.						

Tabel 26 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam peningkatan literasi melalui kegiatan simplifikasi konsep ekonomi dan keuangan syariah

Tabel 26 *Action Plan* & KPI Simplifikasi Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah

### STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. Belajar Ekonomi Syariah Terintegrasi (BEST)	Wadah pembelajaran yang menggunakan media digital dan nondigital untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan dasar mengenai ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat Indonesia.	KNEKS	<b>Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum :</b>						1. Jumlah modul pembelajaran yang disusun
			1. Pembentukan Tim Kurikulum						2. Jumlah peserta yang mendaftar pada peluncuran pertama
			2. Analisis Kebutuhan dan Penelitian						3. Tingkat kepuasan peserta Jumlah kelas dan <i>workshop</i> yang diselenggarakan
			3. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran						4. Jumlah peserta per kelas/ <i>workshop</i>
			4. Uji Coba Kurikulum						5. Jumlah konten digital yang dikembangkan
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan Program :</b>						6. Jumlah pengguna <i>platform online</i>
			1. Peluncuran Program						7. Frekuensi pembaruan kurikulum
			2. Pelaksanaan Kelas dan <i>Workshop</i>						8. Jumlah program dan tingkat partisipasi pada pelatihan lanjutan yang diselenggarakan
			3. Pembelajaran <i>Online</i> dan Sumber Daya Digital"						
			4. <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan Pengembangan Lanjutan :						
			5. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Berkala						
			6. Pembaruan dan Penyempurnaan Kurikulum						
			7. Pengembangan Profesional Berkelanjutan						



## STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
2. Pengembangan Modul Interaktif	Pembuatan modul pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah untuk menciptakan modul pembelajaran yang lebih menarik, mudah dipahami, dan interaktif	KNEKS, BI, OJK, Kemendikbud Ristek	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah modul interaktif dan cetak yang berhasil dikembangkan dan diluncurkan, baik dalam bentuk digital maupun nondigital. 2. Jumlah peserta yang menggunakan modul melalui <i>platform</i> digital, kelas <i>offline</i> , atau materi cetak. 3. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei dan wawancara terhadap format dan konten yang diimplementasikan. 4. Persentase peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip ekonomi syariah setelah menggunakan modul pembelajaran. 5. Jumlah kolaborasi baru yang terjalin dengan lembaga terkait untuk penyebaran dan pengembangan modul lebih lanjut. 6. Jumlah pembaruan modul berdasarkan <i>Feedback</i> dan monitoring dari pengguna dan pengajar. 7. Jumlah peserta yang dijangkau melalui kampanye promosi dan kolaborasi dengan institusi dan lembaga pendidikan.
			1. Membentuk tim multidisipliner yang terdiri dari pakar ekonomi syariah, desainer pembelajaran, pakar modul interaktif, dan ahli teknologi pendidikan						
			2. Melakukan penelitian dan analisis modul pembelajaran yang sudah ada, baik yang berbasis digital maupun nondigital, termasuk metode tradisional dan inovatif dalam penyampaian materi ekonomi syariah.						
			3. Mengidentifikasi materi kunci ekonomi syariah yang akan diintegrasikan ke dalam modul interaktif, cetak, atau multimedia						
			4. Merancang alat bantu pembelajaran seperti kuis interaktif, simulasi, video pembelajaran, dan infografis untuk menguji pemahaman tentang prinsip ekonomi syariah						
			5. Mendesain modul pembelajaran dengan variasi format: buku cetak, <i>e-book</i> , <i>podcast</i> , video interaktif, dan <i>platform</i> pembelajaran online yang memungkinkan fleksibilitas dan aksesibilitas.						
			6. Memilih <i>platform</i> digital yang sesuai untuk peluncuran dan implementasi modul interaktif						

## STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
2. Pengembangan Modul Interaktif	Pembuatan modul pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah untuk menciptakan modul pembelajaran yang lebih menarik, mudah dipahami, dan interaktif.	KNEKS, BI, OJK, Kemendikbud Ristek	<b>Implementasi dan Pelaksanaan Program :</b>						1. Jumlah modul interaktif dan cetak yang berhasil dikembangkan dan diluncurkan, baik dalam bentuk digital maupun nondigital. 2. Jumlah peserta yang menggunakan modul melalui <i>platform</i> digital, kelas <i>offline</i> , atau materi cetak. 3. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei dan wawancara terhadap format dan konten yang diimplementasikan. 4. Persentase peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip ekonomi syariah setelah menggunakan modul pembelajaran. 5. Jumlah kolaborasi baru yang terjalin dengan lembaga terkait untuk penyebaran dan pengembangan modul lebih lanjut. 6. Jumlah pembaruan modul berdasarkan <i>feedback</i> dan <i>monitoring</i> dari pengguna dan pengajar. 7. Jumlah peserta yang dijangkau melalui kampanye promosi dan kolaborasi dengan institusi dan lembaga pendidikan.
			1. Mengembangkan dan memfinalisasi konten modul yang berbasis berbagai format, termasuk kuis, simulasi, <i>role-playing games</i> (jika relevan), video pembelajaran, atau materi cetak.						
			2. Menguji coba modul ke segmen kecil pengguna ( <i>pilot testing</i> ) dan mengumpulkan <i>feedback</i> dari peserta						
			3. Meluncurkan modul secara luas melalui <i>platform</i> yang dipilih, baik online (misalnya <i>website</i> , aplikasi) maupun <i>offline</i> (misalnya materi cetak, kelas pelatihan), ataupun kombinasi						
			4. Meluncurkan modul secara luas melalui <i>platform</i> yang dipilih, baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> (kombinasi)						
			5. Melakukan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi menggunakan media sosial, situs web resmi, seminar, dan kolaborasi dengan lembaga terkait						
			<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Lanjutan :</b>						
			1. Mengumpulkan umpan balik secara berkala dari pengguna modul melalui survei, wawancara, dan analisis data penggunaan untuk evaluasi kinerja						
			2. Memantau efektivitas modul dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah dengan mengumpulkan data dari berbagai <i>platform</i> dan format, serta melalui <i>Feedback</i> dari pengguna						
			3. Menganalisis dampak pembelajaran terhadap pemahaman ekonomi syariah dan aplikasi praktis bagi peserta						
			4. Memperluas jangkauan modul ke wilayah yang lebih luas dan menjalin kolaborasi baru dengan institusi terkait						
			5. Mengembangkan strategi distribusi lintas <i>platform</i> , baik untuk materi cetak, digital, maupun multimedia, agar bisa diterapkan di berbagai konteks pembelajaran						

(Lanjutan) Tabel 26 Action Plan &amp; KPI Simplifikasi Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah

## STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
3. Pelaksanaan riset ekonomi syariah tematik ( <i>policy based research</i> )	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan konsep baru, menguji model dan hipotesis, serta mengumpulkan dan menganalisis data primer terkait literasi ekonomi dan keuangan syariah. Juga memprediksi tren dan perilaku faktor-faktor yang mendorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.	KNEKS, BI, BRIN, OJK, BPS, Kemendikbud Ristek, Kemenkeu	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah topik riset yang diidentifikasi dan disetujui. 2. Jumlah tim riset yang terbentuk dengan keahlian lintas disiplin. 3. Jumlah instrumen riset yang dikembangkan. 4. Jumlah data primer dan sekunder yang dikumpulkan sesuai metodologi. 5. Jumlah rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. 6. Jumlah publikasi di jurnal akademik dan media. 7. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan hasil riset
			1. Identifikasi topik riset strategis terkait ekonomi dan keuangan syariah.						
			2. Pembentukan tim riset multidisipliner.						
			3. Pengembangan metodologi riset dan perencanaan pengumpulan data primer.						
			4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi.						
			5. Pengajuan proposal riset ke lembaga terkait untuk pendanaan.						
			<b>Pelaksanaan Penelitian:</b>						
			1. Pengumpulan data primer dan sekunder melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD).						
			2. Analisis data secara mendalam.						
			3. Pelaporan hasil sementara kepada pemangku kepentingan.						
			4. Penyusunan rekomendasi kebijakan sementara.						
			<b>Publikasi dan Implementasi:</b>						
			1. Penyelesaian laporan akhir riset dan diseminasi hasil kepada publik dan pemangku kepentingan.						
			2. Evaluasi berkala hasil penelitian dan implikasi kebijakan.						
			3. Pengembangan kebijakan berdasarkan hasil riset.						
			4. <i>Monitoring</i> implementasi kebijakan dan riset lanjutan untuk memastikan keberlanjutan.						
			5. Publikasi hasil riset di jurnal akademik dan media nasional/ internasional.						

**STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
4. Konferensi <i>Annual Islamic Finance Conference</i> (AIFC) atau Seminar Internasional Keuangan Islam	Konferensi tahunan untuk membahas isu-isu terkini, perkembangan, dan inovasi dalam industri keuangan syariah. Diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu bersama dengan berbagai institusi akademik dan internasional, AIFC menjadi <i>platform</i> utama bagi akademisi, praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk presentasi penelitian, diskusi panel, dan berbagai sesi interaktif yang membahas topik-topik penting dalam keuangan syariah	Kemenkeu	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah peserta yang hadir 2. Jumlah pembicara dan panelis 3. Tingkat kepuasan peserta 4. Jumlah lokakarya dan seminar 5. Liputan media 6. Implementasi umpan balik 7. Keterlibatan kemitraan
			1. Pembentukan Panitia						
			2. Penetapan Tujuan dan Tema						
			3. Penjadwalan dan Lokasi						
			<b>Pengembangan Program dan Konten :</b>						
			1. Pemilihan Pembicara dan Panelis						
			2. Penyusunan Agenda dan Materi						
			3. Pengaturan Lokakarya dan Seminar						
			4. Kampanye Promosi						
			5. Kolaborasi <i>Media partner</i>						
			<b>Pelaksanaan Acara, Evaluasi dan Tindak Lanjut:</b>						
			1. Pelaksanaan Konferensi						
			2. Evaluasi dan Umpan Balik						
3. Publikasi Hasil dan Laporan Akhir									



Tabel 27 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam peningkatan literasi melalui kegiatan edukasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat usia muda.

Tabel 27 *Action Plan* & KPI Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Pada Masyarakat Usia Muda

### STRATEGI UTAMA PENINGKATAN LITERASI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI	
				1	2	3	4	5		
Kurikulum dan Sekolah Pelopor	Program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum inovatif di sekolah-sekolah terpilih, yang disebut sebagai "sekolah pelopor". Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan dan metode pengajaran yang baru, serta penggunaan teknologi pendidikan modern untuk memperluas literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan siswa.	KNEKS, Kemendikbud ristek, Kemenag	<b>Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum :</b>							1. Jumlah modul pembelajaran yang disusun
			1. Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum							2. Jumlah sekolah yang dipilih
			2. Penelitian dan <i>Benchmarking</i>							3. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk guru dan tenaga pengajar
			3. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran							4. Tingkat partisipasi pada pelatihan yang diselenggarakan
			4. Pemilihan Sekolah Pelopor							5. Jumlah perangkat digital yang disediakan
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan Program :</b>							6. Jumlah sekolah yang berhasil mengimplemen tasikan kurikulum baru
			1. Pelatihan dan Pengembangan Guru							7. Jumlah program pelatihan lanjutan yang diselenggarakan
			2. Integrasi Teknologi Pendidikan							8. Tingkat partisipasi dalam program lanjutan
			3. Pelaksanaan Kurikulum di Sekolah Pelopor							
			<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Lanjutan :</b>							
			1. Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Berkala							
			2. Pembaruan dan Penyempurnaan Kurikulum							
			3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan							

Adapun hubungan antara 4 variabel pemodelan dan kegiatan-kegiatan dalam 4 program utama di strategi peningkatan literasi dapat digambarkan melalui matriks pada tabel 28 sebagai berikut:

Tabel 28: Matriks Variabel Pemodelan dan Kegiatan Program Utama dalam Strategi Peningkatan Literasi

KEGIATAN DALAM 4 PROGRAM UTAMA DI STRATEGI PENINGKATAN LITERASI				
	Kegiatan Program Utama <b>Penajaman Kurikulum</b>	Kegiatan Program Utama <b>Penguatan SDM</b>	Kegiatan Program Utama <b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>	Kegiatan Program Utama <b>Penguatan Riset</b>
<b>1. Simplifikasi Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah</b>	Belajar Ekonomi Syariah Terintegrasi (BEST)		Konferensi <i>Annual Islamic Finance Conference</i> (AIFC) atau Seminar Internasional Keuangan Islam	Pelaksanaan riset ekonomi syariah tematik ( <i>policy based research</i> )
	Pengembangan Modul Interaktif			
<b>2. Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Pada Masyarakat Usia Muda</b>	Kurikulum dan Sekolah Pelopor			
<b>3. Peningkatan Efektifitas Kampanye Ekonomi Syariah</b>			<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i> (ISEF)	
			<i>National Halal Fair</i>	
			<i>Sharia Social Media Campaign</i>	
<b>4. Katalisasi Eksposur Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Interaksi Masyarakat</b>			Anugerah Adinata Syariah	
		<i>Training for Trainers</i> (ToT), BIMTEK, <i>Workshop</i> , dan Pelatihan Ekonomi Syariah		
		S3E (Sertifikasi dan Standardisasi SDM Ekonomi Syariah)		
		Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pengembangan SDM		
		Penyusunan Konten dan Pelatihan Khotib		

## B. PROGRAM PENINGKATAN INKLUSI

Tabel 29 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam peningkatan inklusi program perluasan jangkauan akses produk keuangan syariah.

Tabel 29 *Action Plan* & KPI Program Perluasan Jangkauan Akses Produk Keuangan Syariah

### STRATEGI UTAMA PENINGKATAN INKLUSI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. Penguatan integrasi keuangan syariah-ZISWAF pada UMKM industri halal dan ekosistem industri halal berbasis komunitas, pesantren, ormas Islam, perdesaan	Upaya strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan syariah dan dana sosial syariah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM halal. Langkah ini diambil untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.	ME KNEKS, KDEKS, KemenKeu, Kemenag, Kemenperin, BI, LPS,OJK, Kemenkop UMK	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>	■					1. Jumlah UMKM Halal yang mendapatkan dukungan keuangan syariah 2. Penyaluran dana ZISWAF 3. Pelatihan dan pendampingan UMKM 4. Pembangunan infrastruktur keuangan syariah 5. Kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah
			1. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	■					
			2. Penetapan Tujuan dan Sasaran	■					
			3. Pengembangan Program Edukasi dan Pelatihan	■					
			4. Desain Mekanisme Pembiayaan Syariah	■					
			5. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan ZISWAF	■					
			<b>Implementasi:</b>		■				
			1. Sosialisasi dan Edukasi		■				
			2. Implementasi Produk Keuangan Syariah dan ZISWAF		■				
			3. Pendampingan UMKM		■				
			4. Penguatan Jaringan dan Pemasaran		■				
			<b>Evaluasi:</b>			■			
			1. Pengukuran Kinerja			■			
			2. Audit Internal dan Eksternal			■			
			3. Penyesuaian Program Berdasarkan Umpan Balik			■			
			4. Pelaporan dan Komunikasi			■			
			2. Pameran produk Indonesia di pasar luar negeri yang potensial	Acara atau kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan Indonesia kepada pasar internasional.	ME KNEKS, KDEKS	<b>Identifikasi dan Persiapan Kegiatan:</b>	■		
1. Identifikasi Pasar Potensial	■								
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran	■								
3. Pemilihan Produk Unggulan	■								
4. Pengembangan Materi Promosi	■								
5. Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	■								
<b>Implementasi:</b>		■							
1. Penyelenggaraan Pameran		■							
2. Promosi dan Publisitas		■							
3. <i>Meeting</i> dan <i>Networking</i>		■							
4. Demo Produk dan Presentasi		■							
<b>Evaluasi</b>						■			
1. Pengukuran Kinerja						■			
2. Survei Kepuasan Peserta						■			
3. Audit dan Penyesuaian Strategi			■						
4. Pelaporan kepada <i>Stakeholder</i>			■						

(Lanjutan) Tabel 29 Action Plan &amp; KPI Program Perluasan Jangkauan Akses Produk Keuangan Syariah

## STRATEGI UTAMA PENINGKATAN INKLUSI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
3. Penguatan industri halal nasional untuk produk substitusi impor.	Upaya untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan industri dalam memproduksi barang dan layanan yang memenuhi standar halal, sehingga dapat menggantikan produk impor yang saat ini mendominasi pasar dalam kategori yang sama.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah produk potensial 2. Strategi dan roadmap disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati 3. Kebijakan dan insentif disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati 4. Jumlah kampanye pemasaran dan partisipasi dalam pameran dagang internasional 5. Laporan kinerja dan evaluasi tahunan lengkap disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati
			1. Analisis Pasar dan Rantai Nilai						
			2. Pengembangan Standar dan Pedoman						
			3. Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan Kemitraan						
			4. Pengembangan Kebijakan dan Insentif						
			<b>Implementasi &amp; Sosialisasi:</b>						
			1. Penerapan Praktik Produksi Hijau						
			2. Edukasi dan Pelatihan						
			3. Sertifikasi dan Verifikasi						
			4. Promosi dan Kampanye Kesadaran						
			<b>Evaluasi &amp; Pelaporan:</b>						
			1. Pengukuran Kinerja						
			2. Survei Kepuasan Industri						
			3. Audit dan Penyesuaian Strategi						
			4. Pelaporan kepada <i>Stakeholder</i>						
4. Penerapan ekonomi hijau pada rantai nilai industri halal	Penerapan ekonomi hijau dalam industri halal melibatkan integrasi praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga distribusi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memastikan keberlanjutan produk halal.	ME KNEKS, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenag, BI	<b>Perencanaan dan Persiapan</b>						1. Laporan penilaian rantai nilai dengan rekomendasi untuk peningkatan keberlanjutan 2. Penerbitan standar hijau halal yang disetujui dan diadopsi oleh pelaku industri 3. Jumlah pelaksanaan minimal pelatihan dan <i>workshop</i> dan tingkat partisipasi dari pelaku industri 4. Jumlah industri halal yang mengimplementasikan teknologi hijau 5. Laporan evaluasi tahunan dengan indikator keberlanjutan yang terukur
			1. Identifikasi dan Penilaian Rantai Nilai						
			2. Pengembangan Standar Hijau Halal						
			3. Pelatihan dan Pendidikan untuk Industri						
			4. Implementasi & Sosialisasi:						
			5. Penerapan Praktik Produksi Hijau						
			6. Implementasi Teknologi Hijau						
			<b>Evaluasi &amp; Pelaporan:</b>						
			1. Pengukuran Kinerja						
			2. Survei Kepuasan Industri						
			3. Audit dan Penyesuaian Strategi						
			4. Pelaporan kepada <i>Stakeholder</i>						
			5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi praktik ekonomi hijau di industri halal						



(Lanjutan) Tabel 29 Action Plan &amp; KPI Program Perluasan Jangkauan Akses Produk Keuangan Syariah

## STRATEGI UTAMA PENINGKATAN INKLUSI

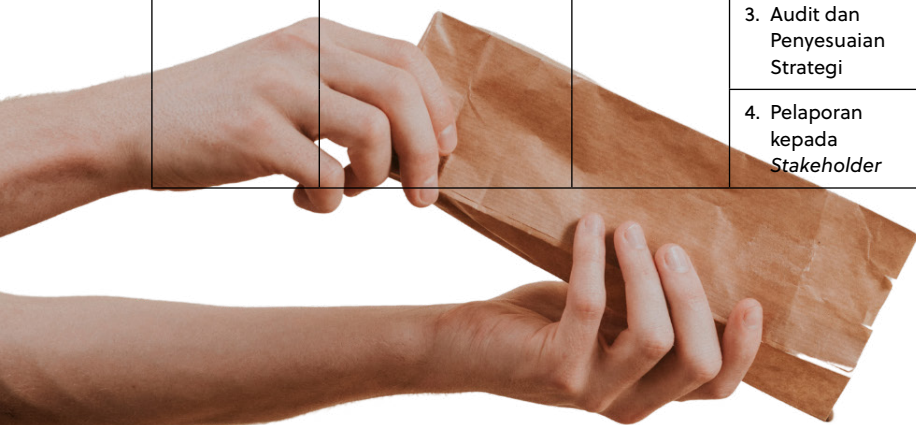
Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
5. Pembangunan ekosistem ekspor produk halal yang terintegrasi dengan hilirisasi industri halal	Strategi untuk mengembangkan infrastruktur dan proses yang mendukung ekspor produk halal Indonesia secara lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan nilai tambah produk halal melalui proses hilirisasi ( <i>downstream process</i> ) dan membangun sistem yang mendukung seluruh rantai nilai ekspor.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin	<b>Perencanaan dan Persiapan :</b>						1. Laporan disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati 2. Strategi dan <i>roadmap</i> disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati 3. Kebijakan dan insentif disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati 4. Jumlah produk halal melalui hilirisasi 5. Jumlah fasilitas baru atau yang ditingkatkan 6. Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i>
			1. Analisis Pasar Ekspor dan Hilirisasi						
			2. Pengembangan Strategi Ekosistem Ekspor						
			3. Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan Kemitraan Pengembangan Kebijakan dan Insentif						
			4. Pengembangan Kebijakan dan Insentif						
			<b>Implementasi dan Sosialisasi:</b>						
			1. Fasilitasi Hilirisasi Produk Halal						
			2. Peningkatan Kapasitas Ekspor						
			3. Penyediaan Infrastruktur Ekspor						
			4. Promosi dan Kampanye Ekspor						
			<b>Evaluasi dan Pelaporan:</b>						
			1. Pengukuran Kinerja Ekosistem						
			2. Survei Kepuasan <i>Stakeholder</i>						
			3. Audit dan Penyesuaian Strategi						
4. Pelaporan kepada <i>Stakeholder</i>									

Tabel 30 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam peningkatan Inklusi program peningkatan penggunaan produk/jasa halal yang bersertifikasi halal.

Tabel 30 *Action Plan* & KPI Program Peningkatan Penggunaan Produk/Jasa Halal yang Bersertifikasi Halal

### STRATEGI UTAMA PENINGKATAN INKLUSI

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
Peningkatan penggunaan produk dan jasa yang bersertifikasi halal.	Merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sertifikasi halal mengacu pada proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal independen untuk memastikan bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin, BPJPH	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Strategi dan rencana kampanye disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati 2. Jumlah kemitraan strategis 3. Jumlah pelatihan/ seminar dan tingkat partisipasi peserta 4. Jumlah produsen mendapatkan insentif sertifikasi 5. Platform diluncurkan sesuai dengan target waktu yang disepakati 6. Jumlah pengguna platform 7. Laporan dan evaluasi tahunan lengkap disampaikan sesuai dengan target waktu yang disepakati
			1. Analisis Pasar dan Identifikasi Kebutuhan						
			2. Pengembangan Strategi dan Kampanye						
			3. Kemitraan dengan Lembaga Sertifikasi dan Produsen						
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>						
			1. Edukasi dan Pelatihan						
			2. Kampanye Kesadaran Publik						
			3. Penyediaan Insentif						
			4. Pengembangan Infrastruktur Digital						
			<b>Monitoring dan Evaluasi:</b>						
			1. Pengukuran Kinerja Ekosistem						
			2. Survei Kepuasan Stakeholder						
			3. Audit dan Penyesuaian Strategi						
			4. Pelaporan kepada Stakeholder						



Tabel 31 Action Plan &amp; KPI Program Perluasan Media/Platform Komunikasi

## STRATEGI UTAMA Penguatan Infrastruktur Pendukung

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. PDES (Pusat Data Ekonomi Syariah)	Inisiatif yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi masalah data yang tersebar dan bervariasi dalam pengelolaan data ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia	ME KNEKS, BPS	<b>Analisis dan Desain:</b>						1. Persentase pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi dan terlibat 2. Jumlah kebutuhan data yang teridentifikasi. 3. Persentase penyelesaian pembangunan infrastruktur IT 4. Persentase pengujian pengembangan sistem 5. Jumlah sesi pelatihan yang diadakan 6. Tingkat kepuasan peserta pelatihan 7. Jumlah pertemuan forum kolaborasi yang diadakan 8. Persentase penyelesaian laporan berkala
			1. Analisis Kebutuhan dan Pemangku Kepentingan						
			2. Membangun Tim Kerja						
			3. Desain Arsitektur Data						
			<b>Pembangunan &amp; Implementasi:</b>						
			1. Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Data						
			2. Pengembangan dan Implementasi Sistem						
			<b>Pelatihan, Sosialisasi, dan Evaluasi:</b>						
			1. Pelatihan dan Sosialisasi						
			2. Pemantauan dan Evaluasi						
			3. Kolaborasi dan Komunikasi						
2. KPJN (Kunjungan dan Pertukaran Jurnalis Negara)	Inisiatif yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara jurnalis dari berbagai negara untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.	ME KNEKS, Kominfo, dan Kemenlu	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah jurnalis yang direkrut dan diseleksi. 2. Waktu pembentukan tim pengarah dan panitia. 3. Persentase kehadiran jurnalis dalam setiap sesi 4. Jumlah kunjungan lapangan yang dilaksanakan 5. Tingkat kepuasan peserta 6. Jumlah publikasi yang diterbitkan 7. Jumlah pemangku kepentingan yang menerima informasi 8. Pembentukan jaringan jurnalis ASEAN. 9. Jumlah program yang direvisi dan disempurnakan
			1. Identifikasi dan Rekrutmen Jurnalis						
			2. Pembentukan Tim Pengarah dan Panitia						
			3. Penyusunan Program dan Kurikulum						
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>						
			1. Pelaksanaan Program Pertukaran						
			2. Pertukaran Pengalaman dan Pengetahuan						
			3. Evaluasi dan <i>Feedback</i>						
			<b>Pelaporan dan Tindak Lanjut:</b>						
			1. Penyusunan Laporan Program						
			2. Publikasi dan Diseminasi Hasil						
			3. Tindak Lanjut dan Rencana di Masa Depan						

**STRATEGI UTAMA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
3. PSD (Perpustakaan Syariah Digital)	Platform digital yang menyediakan akses ke berbagai sumber informasi dan literatur mengenai studi syariah. Melalui layanan ini, pengguna dapat mengakses buku, artikel, jurnal, dan dokumen digital lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.	ME KNEKS, Perpustakaan Nasional	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah pemangku kepentingan dan mitra yang terlibat 2. Jumlah konten yang didigitalkan 3. Persentase pembangunan infrastruktur yang selesai 4. Jumlah sesi pelatihan yang diadakan 5. Jumlah kampanye dan materi promosi yang disebarluaskan 6. Jumlah komunitas yang terlibat 7. Tingkat peningkatan literasi syariah 8. Waktu penyusunan laporan akhir 9. Rencana perluasan yang disusun 10. Jumlah fitur dan layanan baru yang diimplementasikan
			1. Analisis Kebutuhan dan Pemangku Kepentingan						
			2. Pembentukan Tim dan Pengembangan Platform						
			3. Pengadaan dan Penyediaan Konten						
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>						
			1. Pembangunan Infrastruktur dan Distribusi Perangkat						
			2. Pelatihan dan Pendampingan						
			3. Promosi dan Sosialisasi						
			<b>Pelatihan, Sosialisasi, dan Evaluasi:</b>						
			1. Pemantauan dan Evaluasi						
			2. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi						
			3. Rencana Tindak Lanjut						





Tabel 32 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam penguatan infrastruktur pendukung program penguatan pedoman, ketentuan, dan Undang-undang.

Tabel 32 *Action Plan* & KPI Program Penguatan Pedoman, Ketentuan, dan Undang-undang

### STRATEGI UTAMA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan sektor UMKM, kewirausahaan dan industri termasuk wajib sertifikasi halal sesuai ketentuan.	Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor-sektor tersebut.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenkop UKM, BPJPH	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah jenis sertifikasi yang perlu ditambahkan. 2. Jumlah UMKM dan industri yang dipetakan untuk sertifikasi 3. Jumlah sesi konsultasi yang diadakan 4. Penyelesaian pengembangan standar sertifikasi 5. Jumlah peserta pelatihan yang terlibat 6. Jumlah UMKM dan industri yang tersertifikasi awal 7. Tingkat kepatuhan UMKM dan industri terhadap sertifikasi halal 8. Waktu penyusunan laporan akhir
			1. Analisis Kebutuhan Sertifikasi						
			2. Pemetaan UMKM dan Industri yang Membutuhkan Sertifikasi						
			3. Konsultasi dengan Pihak Terkait						
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>						
			1. Pengembangan Standar Sertifikasi						
			2. Pelatihan dan Sosialisasi						
			3. Penerapan Sertifikasi Awal						
			<b>Monitoring dan Evaluasi:</b>						
			1. Pemantauan dan Evaluasi						
			2. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi						
			2. Pemantauan implementasi SOP standar layanan, biaya dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan regulator untuk masing-masing jenis Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah, IKNB, Pasar Modal, dll)	Kegiatan krusial dalam memastikan transparansi, kepatuhan, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah. Hal ini melibatkan langkah-langkah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), biaya layanan, serta kebijakan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh regulator.	ME KNEKS, KDEKS, BI, LPS, OJK	<b>Evaluasi dan Perencanaan:</b>			
1. Audit Awal Implementasi SOP									
2. Review Biaya Layanan									
3. Analisis Kebijakan Perlindungan Konsumen									
<b>Implementasi Perbaikan:</b>									
1. Pengembangan Panduan SOP Terbaru									
2. Pelatihan dan Edukasi Internal									
3. Implementasi SOP Terbaru									
<b>Monitoring dan Evaluasi Lanjutan:</b>									
1. Pemantauan Berkala									
2. Evaluasi Kinerja dan Efisiensi									

Tabel 33 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam penguatan infrastruktur pendukung program penguatan digitalisasi

Tabel 33 *Action Plan* & KPI Program Penguatan Digitalisasi

**STRATEGI UTAMA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI				
				1	2	3	4	5					
1. Pengembangan layanan digital keuangan syariah untuk <i>Islamic value chain finance</i> di sepanjang rantai nilai halal terintegrasi hulu-hilir	Strategi untuk memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pembiayaan berbasis nilai Islam ( <i>Islamic value chain finance</i> ) dalam rangka mengintegrasikan seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal dari hulu sampai hilir. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan keuangan syariah di sektor industri halal.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, BI, OJK, Kemenkop UKM, BPJPH dan Kemenparekraf	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>	■			■	■	1. Penyelesaian studi kelayakan 2. Penyelesaian pengembangan kerangka kerja 3. Jumlah sesi konsultasi yang diadakan 4. Penyelesaian pengembangan platform 5. Jumlah rantai nilai halal yang terlibat dalam uji coba 6. Jumlah peserta pelatihan yang terlibat 7. Tingkat adopsi dan penggunaan platform digital 8. Penyelesaian evaluasi dan rekomendasi perbaikan				
			1. Studi Kelayakan Teknis dan Regulasi	■			■	■					
			2. Pengembangan Kerangka Kerja Digital	■			■	■					
			3. Konsultasi dengan Pihak Terkait	■			■	■					
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>		■	■	■	■					
			1. Pengembangan Platform Digital		■	■	■	■					
			2. Uji Coba dan Validasi		■	■	■	■					
			3. Pelatihan Penggunaan Platform		■	■	■	■					
			<b>Monitoring dan Evaluasi:</b>			■	■	■					
			1. Pemantauan Implementasi			■	■	■					
			2. Evaluasi Dampak dan Efisiensi			■	■	■					
			2. Integrasi antara layanan digital keuangan syariah dengan <i>halal lifestyle</i> .	Upaya untuk menghubungkan teknologi digital dengan kebutuhan dan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal makanan, pakaian, pariwisata, dan produk lain yang memenuhi standar halal	ME KNEKS, KDEKS, Kemenkeu, Kemenag, Kemenperin, BI, LPS, OJK, Kemenkop UKM	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>	■				■	■	1. Penyelesaian studi potensi pasar 2. Penyelesaian pengembangan konsep 3. Jumlah sesi konsultasi yang diadakan 4. Penyelesaian pengembangan platform 5. Jumlah pengguna dan transaksi dalam uji coba 6. Jumlah peserta pelatihan yang terlibat 7. Tingkat kepuasan pengguna platform 8. Hasil evaluasi dengan rekomendasi perbaikan.
						1. Studi Potensi Pasar dan Kebutuhan Konsumen	■				■	■	
2. Pengembangan Konsep Integrasi Syariah Digital Lifestyle	■						■	■					
3. Konsultasi dengan Stakeholder	■						■	■					
<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>		■				■	■	■					
1. Pengembangan Platform Digital Syariah Lifestyle		■				■	■	■					
2. Uji Coba dan Validasi		■				■	■	■					
3. Pelatihan dan Edukasi Pengguna		■				■	■	■					
<b>Monitoring dan Evaluasi:</b>						■	■	■					
1. Pemantauan dan Pengembangan Lanjutan						■	■	■					
2. Evaluasi Dampak dan Efisiensi						■	■	■					

Tabel 34 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam penguatan infrastruktur pendukung program kawasan zona.

Tabel 34 *Action Plan* & KPI Program Pengembangan Kawasan/Zona Halal

### STRATEGI UTAMA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
Pengembangan kawasan bahan baku substitusi nonhalal untuk industri pengolahan makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik	Langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal bagi konsumen Muslim.	ME KNEKS, KDEKS, Kemenag, Kemenperin, BPJPH, dan Kemenparekraf	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Jumlah sesi konsultasi yang diadakan 2. Penyelesaian pengembangan prototipe 3. Jumlah industri yang terlibat dalam uji coba 4. Jumlah peserta pelatihan yang terlibat 5. Tingkat adopsi dan kepatuhan industri terhadap penggunaan bahan baku substitusi halal 6. Evaluasi hasil dengan rekomendasi untuk perbaikan
			1. Studi Potensi Pasar dan Kebutuhan Konsumen						
			2. Pengembangan Kerangka Kerja Teknis dan Regulasi						
			3. Konsultasi dengan Stakeholder						
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>						
			1. Pengembangan Prototipe Bahan Baku Substitusi Halal						
			2. Uji Coba dan Validasi						
			3. Pelatihan dan Sosialisasi						
			<b>Monitoring dan Evaluasi:</b>						
			1. Pemantauan Implementasi dan Penerapan						
			2. Evaluasi Dampak dan Efisiensi						

Tabel 35 menjelaskan tentang *Action Plan* beserta KPI untuk strategi utama dalam program penguatan persepsi positif (*Branding*).

Tabel 35 *Action Plan* & KPI Program Penguatan Persepsi Positif (*Branding*)

**STRATEGI UTAMA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG**

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
1. Koordinasi dan sosialisasi logo ekonomi syariah melalui pembentukan tim komunikasi yang melibatkan seluruh K/L dan pemangku kepentingan terkait.	Strategi untuk meningkatkan pemahaman dan visibilitas mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini melibatkan kerjasama lintas sektor dan pihak-pihak terkait untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan logo serta menyebarkan informasi secara efektif kepada masyarakat luas	ME KNEKS, KDEKS, BI, Kemenag, Kemenko Perekonomian, OJK, MUI, Kemenkeu, Kadin, dan Kemenko Marves	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						1. Penyelesaian studi evaluasi 2. Tim komunikasi terbentuk 3. Penyelesaian rencana sosialisasi 4. Penyelesaian harmonisasi logo 5. Jumlah sesi sosialisasi yang diadakan 6. Evaluasi tingkat adopsi logo ekonomi syariah 7. Laporan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan 8. Implementasi perbaikan dalam penggunaan logo
			1. Studi dan Evaluasi Logo Ekonomi Syariah						
			2. Pembentukan Tim Komunikasi						
			3. Penyusunan Rencana Sosialisasi						
			<b>Implementasi dan Pelaksanaan:</b>						
			1. Harmonisasi Logo Ekonomi Syariah						
			2. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Logo						
			3. Monitoring dan Evaluasi Awal						
			<b>Evaluasi dan Peningkatan:</b>						
			1. Evaluasi Lanjutan						
2. Peningkatan Kontinu									
2. Koordinasi dan kerja sama penggunaan logo ekonomi syariah.  Rencana program: • Identifikasi kegiatan • Implementasi logo • Evaluasi	Inisiatif strategis yang bertujuan untuk menyatukan penggunaan logo ekonomi syariah secara konsisten dan efektif di berbagai kegiatan dan inisiatif yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.	ME KNEKS, BI, Kemenag, Kemenko Perekonomian, OJK, MUI, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf, dan Kadin	<b>Identifikasi Kegiatan:</b>						1. Penyelesaian studi identifikasi 2. Tim koordinasi terbentuk 3. Penyelesaian rencana sinkronisasi 4. Peningkatan penggunaan logo dalam kegiatan terkait 5. Tingkat kepatuhan penggunaan logo oleh kegiatan terkait 6. Jumlah peserta pelatihan yang terlibat 7. Laporan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan 8. Implementasi perbaikan dalam penggunaan logo
			1. Studi dan Identifikasi Kegiatan yang Terkait						
			2. Pembentukan Tim Koordinasi						
			3. Pengembangan Rencana Sinkronisasi						
			<b>Implementasi Logo:</b>						
			1. Implementasi Logo Ekonomi Syariah						
			2. Monitoring dan Pemantauan Penggunaan Logo						
			3. Pelatihan dan Bimbingan						
			<b>Evaluasi:</b>						
			1. Evaluasi Implementasi						
2. Implementasi Perbaikan									



(Lanjutan) Tabel 35 Action Plan &amp; KPI Program Penguatan Persepsi Positif (Branding)

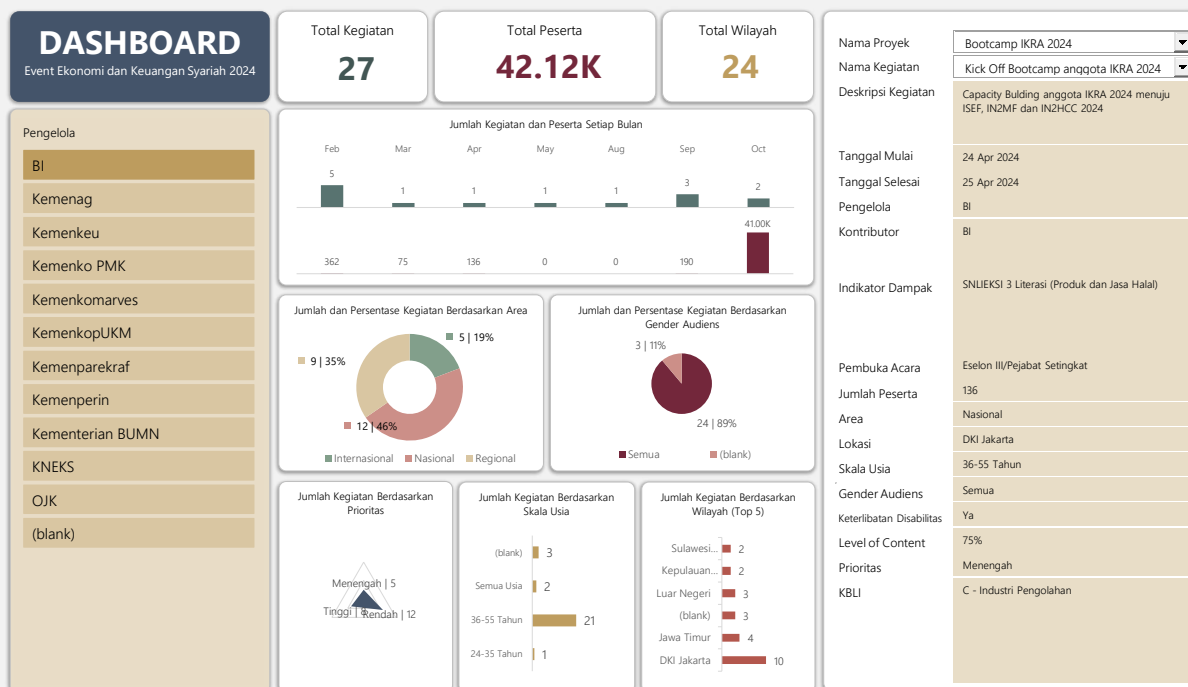
## STRATEGI UTAMA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Kegiatan	Keterangan	PIC	Action Plan	Tahun					KPI
				1	2	3	4	5	
3. Analisis dasar hukum penggunaan logo Ekonomi syariah (contoh: perbankan, produk halal, daerah wisata, dll)	Program ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan legalitas serta kepatuhan dalam penggunaan logo ekonomi syariah di berbagai sektor seperti perbankan, produk halal, dan daerah wisata. Program ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan logo tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.	ME KNEKS, BI, OJK, Kemenag, Kemenperin, Kemendag, Kemenparekraf, dan MUI	<b>Persiapan dan Analisis Awal:</b>						1. Penyelesaian studi literatur dan kumpulan data 2. Identifikasi lengkap aspek hukum 3. Tim analisis hukum terbentuk 4. Penyelesaian analisis hukum 5. Tingkat kesesuaian penggunaan logo 6. Penyelesaian laporan 7. Persentase peningkatan kepatuhan penggunaan logo 8. Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala
			1. Studi Literatur dan Kumpulan Data						
			2. Identifikasi Aspek Hukum yang Relevan						
			3. Pembentukan Tim Analisis Hukum						
			<b>Implementasi Logo:</b>						
			1. Analisis Hukum Lanjutan						
			2. Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Logo Ekonomi syariah						
			3. Pembuatan Laporan Analisis dan Rekomendasi						
			<b>Evaluasi:</b>						
			1. Implementasi Rekomendasi						
2. Monitoring dan Evaluasi Periodik									
4. Pembuatan Platform khusus untuk mengenalkan logo ekonomi syariah (dashboard)	Inisiatif untuk memberikan akses yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat terkait informasi dan pemahaman mengenai logo ekonomi syariah. Platform ini akan menyediakan berbagai fitur yang mendukung penyebaran informasi yang akurat, edukasi yang terkait dengan ekonomi syariah, dan mengelola penggunaan logo tersebut di berbagai sektor ekonomi	ME KNEKS	<b>Perencanaan dan Persiapan:</b>						3. Penyelesaian studi kebutuhan dan konsep platform 4. Tim pengembangan platform terbentuk 5. Penyelesaian desain UI/UX 6. Penyelesaian pengembangan platform 7. Jumlah pengguna baru platform 8. Tingkat kepuasan pengguna platform 9. Laporan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan 10. Persentase peningkatan efektivitas platform
			1. Studi Kebutuhan dan Persiapan Konsep Platform						
			2. Pembentukan Tim Pengembangan Platform						
			3. Desain UI/UX Platform						
			<b>Pengembangan dan implementasi:</b>						
			1. Pengembangan Platform						
			2. Peluncuran dan Sosialisasi Platform						
			3. Pelatihan Pengguna dan Administrasi Platform						
			<b>Evaluasi dan Peningkatan:</b>						
			1. Evaluasi Penggunaan Platform						
2. Implementasi Perbaikan									

# 3.5.

## ***DASHBOARD MONITORING***

Pengembangan *dashboard* bertujuan untuk menjadi alat *monitoring* dan evaluasi bersama dari pelaksanaan implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. *Dashboard* dapat memberikan informasi kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, *output* atau capaian yang diharapkan dari kegiatan tersebut, serta pemetaan sebaran kegiatan baik secara demografi maupun spasial. Selain itu, untuk mendukung perluasan akses informasi sosialisasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, *dashboard* juga dapat dilengkapi dengan repositori materi sosialisasi dan edukasi bersama dari masing-masing K/L terkait.



Gambar 26 Dashboard Monitoring Version 1.1.

Adapun cakupan informasi yang dibutuhkan dalam *dashboard* antara lain sebagai berikut.

#### a. Kalender Kegiatan

Kalender ini berisi informasi mengenai kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) selama satu tahun berjalan. Kalender ini dapat dimanfaatkan untuk sinergi dan kolaborasi kegiatan yang memiliki tema yang sama serta untuk penjadwalan kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

#### b. Detail Kegiatan

Mencakup informasi detail dari masing-masing K/L antara lain nama kegiatan, deskripsi, jadwal, pengelola, mitra kontributor, lokasi, target jumlah peserta, sasaran peserta, skala kegiatan, serta keterkaitan dampak terhadap indikator yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Detail kegiatan juga dapat mencakup informasi tambahan seperti keterlibatan disabilitas.

#### c. Indikator Capaian

Informasi terkait perkembangan masing-masing indikator dalam implementasi strategi nasional inklusi dan literasi oleh K/L terkait.

#### d. Peta Sebaran

Menggambarkan konsentrasi fokus dari *outcome* implementasi strategi nasional inklusi dan literasi oleh K/L terkait serta sebaran geografis pelaksanaan *event* strategis.

#### e. Repositori Materi

Mencakup materi-materi sosialisasi dan edukasi dari masing-masing K/L yang dapat dipergunakan kembali. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi berikutnya dalam rangka mencapai target dari Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.

## f. Sistem Informasi Berbasis *Big Data Analytics*

Sistem informasi berbasis *big data analytics* yang secara umum dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis sejumlah besar data (*big data*) guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang bisnis dan teknologi. Sistem ini menggabungkan teknologi *big data* dan teknik analitik canggih untuk mengekstraksi wawasan yang bermakna dari data yang beragam, berukuran besar, dan bergerak cepat.

Dalam implementasi konsep Sistem Informasi berbasis *big data analytics* pada Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, beberapa komponen dan karakteristik utama yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- i. **Volume** - Mengelola data dalam jumlah besar yang mungkin mencapai *terabyte* atau *petabyte*. Sistem ini dirancang untuk menangani skala data yang sangat besar.
- ii. **Variety** - Mengelola berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur seperti teks, gambar, video, dan data sensor.
- i. **Velocity** - Memproses data dengan cepat untuk memberikan wawasan yang *real-time* atau mendekati *real-time*. Ini penting terutama untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti analitik perkembangan literasi dan inklusi di suatu daerah/wilayah tertentu, atau suatu *event* tertentu, dalam kurun waktu tertentu, atau secara nasional.
- ii. **Veracity** - Memastikan akurasi dan kualitas data. Dalam *big data*, data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi hasil analisis, sehingga penting untuk memiliki mekanisme untuk memverifikasi dan membersihkan data.
- iii. **Value** - Menyediakan nilai atau indeks literasi atau inklusi ekonomi dan keuangan syariah atau ukuran lain yang dapat ditindaklanjuti dari data yang dianalisis. Ini adalah tujuan utama dari *big data analytics*.

## Komponen Utama

- i. **Data Sources** - Berbagai sumber data seperti media sosial, perangkat IoT, transaksi bisnis, log server, dan lainnya.
- ii. **Data Storage** - Penyimpanan data yang efisien menggunakan teknologi seperti Hadoop HDFS, NoSQL databases, *data lakes*, dan lainnya.
- iii. **Data Processing** - Pemrosesan data menggunakan alat seperti *Apache Spark*, *Apache Flink*, atau *MapReduce* untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat.
- iv. **Data Analysis** - Teknik analitik canggih seperti *machine learning*, *data mining*, dan statistik untuk menemukan pola dan wawasan dari data.
- v. **Data Visualization** - Alat visualisasi data seperti Tableau, Power BI, atau D3.js untuk mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami.

Dengan menggunakan sistem informasi berbasis *big data analytics*, KNEKS atau K/L yang terkait dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat berdasarkan analisis data yang mendalam. Dengan kemampuan untuk menangani *volume* besar, variasi data, kecepatan pengolahan, dan nilai yang dihasilkan, sistem ini menjadi alat yang sangat berharga dalam era *data-driven* saat ini.



# Prinsip Penyusunan Dashboard

Penyusunan *dashboard* yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang tujuan, audiens, dan data yang akan ditampilkan. *Dashboard* yang baik harus menyampaikan informasi yang relevan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut adalah prinsip-prinsip penyusunan *dashboard* yang efektif.

## Tujuan

Penyusunan *dashboard* bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam menyusun suatu pesan strategis secara efektif dan efisien. Keberadaan *dashboard monitoring* akan dapat mengurangi *redundancy* kegiatan diseminasi informasi baik dalam suatu program serupa maupun konten informasi yang sama. Selain itu, melalui *platform* ini, ruang-ruang penyempurnaan dapat dideteksi oleh lembaga dan kementerian terkait, sehingga memungkinkan adanya program koordinasi yang lebih efektif.

## Informasi

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, *dashboard monitoring* akan memuat informasi mengenai jadwal program literasi dan paket-paket informasi dari setiap lembaga dan kementerian terkait dalam suatu *repository knowledge*. Pengaturan informasi dan program dilakukan oleh lembaga koordinator literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional yang dipegang oleh KNEKS. Pada tahapan selanjutnya, jenis informasi yang terdapat dalam *dashboard monitoring* ini dapat ditingkatkan untuk mencakup segmen-segmen masyarakat yang lebih spesifik, baik dari sisi konsumen maupun produsen dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah.

## Assessment dan respon

Koordinator program literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah secara reguler melakukan analisis terhadap perkembangan di dalam industri dan menyusun program inisiasi yang bertujuan untuk merespon perkembangan tersebut



## Process Flow

Operasionalisasi *dashboard monitoring* akan secara aktif melibatkan koordinator program dan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Setelah mendapatkan informasi dan masukan dari koordinator, kementerian dan lembaga tersebut akan menyusun berbagai program literasi yang sesuai dengan target audiens yang dituju. Materi dan program tersebut disusun berdasarkan kewenangan yang ada pada masing-masing lembaga.

Dalam pelaksanaannya, formalitas penunjukkan tim penyusun akan mengoptimalkan efektivitas program literasi. Selanjutnya, KNEKS sebagai *orchestrator* juga memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan implementasi *dashboard* berikutnya.











PENUTUP

04



Tindak lanjut dari SNLIEKSI 2024 merupakan elemen krusial dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang terkoordinasi oleh berbagai pemangku kepentingan, sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas, serta sinergi lintas sektor antara kementerian, lembaga, dan pihak lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan peningkatan indeks literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah dapat tercapai secara signifikan.

Kolaborasi yang solid antar kementerian dan lembaga sangat diperlukan, mengingat program ini berfokus pada tiga area strategis: literasi, inklusi, dan infrastruktur. Dalam hal literasi, penajaman modul dan kurikulum, peningkatan kompetensi SDM, serta sosialisasi regulasi yang jelas menjadi langkah prioritas, didukung oleh penguatan riset. Sementara itu, peningkatan inklusi berfokus pada perluasan akses terhadap produk dan jasa keuangan syariah, dengan penekanan khusus pada peningkatan penggunaan produk halal. Di sisi infrastruktur, penting untuk memperluas *platform* komunikasi, memperkuat regulasi hukum, mendorong digitalisasi, dan menciptakan persepsi positif melalui *branding* yang efektif. Langkah-langkah ini akan mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dokumen Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) harus terus disempurnakan agar tetap relevan dengan perubahan dalam struktur pemerintahan, dinamika kebijakan, dan perkembangan sosial-ekonomi di masa mendatang.

Kemudian, mengingat potensi perubahan dalam *landscape* politik dan ekonomi, diharapkan dokumen SNLIEKSI dapat menjadi *living document* yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai skenario. Oleh karena itu, setiap strategi dan kebijakan dalam dokumen ini harus dapat diperbarui dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi, sosial-ekonomi, dan preferensi masyarakat.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penyempurnaan dan pembaruan SNLIEKSI selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI). Keselarasan ini akan memastikan bahwa strategi literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya mendukung tujuan jangka panjang pembangunan nasional, tetapi juga sejalan dengan prioritas pembangunan menengah dan program kerja yang diusung dalam kerangka MEKSI. Berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan prioritas harus dipertimbangkan secara strategis untuk memastikan bahwa dokumen ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberi fleksibilitas dalam merespons perubahan dan tantangan baru di masa depan.

Kolaborasi yang solid antar kementerian dan lembaga sangat diperlukan, mengingat program ini berfokus pada tiga area strategis:

1. literasi

2. inklusi,

3. infrastruktur.



A woman wearing a pink hijab and a light pink blouse is seated at a dark wooden table. She is looking down at a black smartphone held in her right hand, while her left hand rests on the keyboard of a silver laptop. The background is a bright, blurred outdoor setting with greenery and a wooden fence. The word "LAMPIRAN" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters on the left side of the image.

**LAMPIRAN**













# REFERENSI

1. antaranews.com. (2022, March 14). *BI: Konsumsi produk halal RI bakal tumbuh mencapai 281,6 miliar dolar*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2758557/bi-konsumsi-produk-halal-ri-bakal-tumbuh-mencapai-2816-miliar-dolar>
2. Bank Indonesia. (2022). *Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah Tahun 2022: Indeks Literasi Ekonomi Syariah*. Dokumen Internal.
3. Bank Indonesia. (2024). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. <https://www.bi.go.id/id/keksi/default.aspx>
4. Bank Indonesia. (2024). *Prinsip Indonesia Islamic Super Corridor*. Dokumen Internal.
5. Bank Indonesia. (2023). *Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah Tahun 2023: Indeks Literasi Ekonomi Syariah*. Dokumen Internal
6. Bappenas. (2023). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>
7. Bass, F. M (1969). *New Product Growth Model for Consumer Durables*. *Management Science* 15:215-227
8. BAZNAS Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Baznas 2023*. <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-kinerja>
9. Center on the Developing Child at Harvard University (2016). *From Best Practices to Breakthrough Impacts: A Science-Based Approach to Building a More Promising Future for Young Children and Families*. <https://developingchild.harvard.edu/resources/from-best-practices-to-breakthrough-impacts/>
10. CGAP. (2024). *Financial Inclusion*. <https://www.cgap.org/financial-inclusion>
11. Clark, R. L., Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2021). *Financial Fragility during the COVID-19 Pandemic*. *AEA Papers and Proceedings*, 111, 292–296. <https://doi.org/10.1257/pandp.20211000>
12. Demertzis, M., Domínguez-Jiménez, M., & Lusardi, A. (2020). *The financial fragility of European households in the time of COVID-19*. *Bruegel, Policy Contribution 2020(15)*.
13. DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
14. Forrester, J.W. (1961). *Industrial Dynamics*. MIT Press, Cambridge, Mass.
15. Indonesia Halal Lifestyle Center, & DinarStandard. (2021). *Indonesia Halal Market Report 2021/2022*. [https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021\\_2022.pdf](https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf)
16. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
17. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara*. Dokumen Internal.
18. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2022*. <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Laporan-Pelaksanaan-SNKI-2022.pdf>
19. KNEKS. (2023). *Bahan Rapat Pleno Mei 2023*. Dokumen Internal.



20. Krämer-Eis, H., Block, J., Botsari, A., Diegel, W., Lang, F., Legnani, D., Lorenzen, S., Mandys, F., & Tzoumas, I. (2022). EIF VC Survey 2022: *Market sentiment and impact of the current geopolitical & macroeconomic environment* (Working Paper 2022/82). EIF Working Paper. <https://www.econstor.eu/handle/10419/265477>
- Lusardi, A., Michaud, P.-C., & Mitchell, O. S. (2017). *Optimal Financial Knowledge and Wealth Inequality*. *Journal of Political Economy*, 125(2), 431–477. <https://doi.org/10.1086/690950>
21. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). *The Importance of Financial Literacy: Opening a New Field*. *Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 137–154. <https://doi.org/10.1257/jep.37.4.137>
22. Maier F. H. (1992). *R&D Strategies and the Diffusion of Innovations*. In *Proceeding system dynamics 1992*, eds. Vennix, J.A.M; J. Faber, W. J. Scheper; C.A.Th. Takkenberg. Utrecht: 395-404
23. Milling P. M. (1991). *An Integrative view of R&D and Innovation Processed*. In *Modelling and Simulation 1991*, ed E. Mosekilde. San Diego, CA: 509-514
24. Nasution. (2023). *Kajian Kondisi Ekonomi Indonesia*. Dokumen Internal Bank Indonesia
25. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>
26. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan syariah Indonesia 2022*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>
27. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>
28. Populix. (2023). *Insight and Customer Perspective of Halal Industry in Indonesia*. Populix. <https://info.populix.co/articles/report/halal-industry/>
29. Purwanto. (2023). *Kajian Kondisi Ekonomi Indonesia*. Dokumen Internal Bank Indonesia
30. Pusat Pemberdayaan Industri Halal. (2024, February 7). *Kemenperin Genjot Kolaborasi Percepatan Industri Halal Nasional—Pusat Pemberdayaan Industri Halal*. <https://halal.kemenperin.go.id/kemenperin-genjot-kolaborasi-percepatan-industri-halal-nasional/>
31. Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. New York: Free Press of Glencoe. Chicago.
32. Sethi, D., & Acharya, D. (2018). *Financial inclusion and economic growth linkage: Some cross country evidence*. *Journal of Financial Economic Policy*, 10(3), 369–385. <https://doi.org/10.1108/JFEP-11-2016-0073>
33. Serman, J. D. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill Higher Education
34. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
35. World Bank. (2022). *Context of Financial Inclusion*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>
36. World Economic Forum. (2022). *The Global Risks Report 2022*. [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_The\\_Global\\_Risks\\_Report\\_2022.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf)

# STRATEGI NASIONAL

Literasi dan Inklusi Ekonomi  
dan Keuangan Syariah  
Indonesia

20  
24